



UNIVERSITAS INDONESIA

**“RUJUK” NEGARA SERUMPUN: MEREKAM JEJAK KERJASAMA
KEBAHASAAN INDONESIA-MALAYSIA, 1966-1985**

TESIS

SETYADI SULAIMAN

NPM. 0906587501

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**“RUJUK” NEGARA SERUMPUN: MEREKAM JEJAK KERJASAMA
KEBAHASAAN INDONESIA-MALAYSIA, 1966-1985**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Humaniora

SETYADI SULAIMAN

NPM. 0906587501


**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JULI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia.

Depok, 12 Juli 2012



Setyadi Sulaiman

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Setyadi Sulaiman

NPM : 0906587501

Tanda Tangan :



Tanggal : 12 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :
Nama : Setyadi Sulaiman
NPM : 0906587501
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : "Rujuk" Negara Serumpun: Merekam Jejak
Kerjasama Kebahasaan Indonesia-Malaysia,
1966-1985

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Priyanto Wibowo ()

Penguji : Mona Lohanda, M.Phil ()

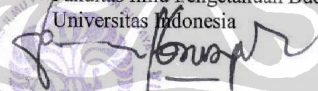
Penguji : Dr. Bondan Kanumoyoso ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2012.

Oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia


Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 196510231990031002

UCAPAN TERIMAKASIH

Luapan rasa syukur penulis panjatkan keharibaan Ilahi Rabbi yang telah memberikan beragam nikmat, kesempatan serta kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Shalawat teriring do'a semoga tercurah kepada penerang semesta nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa perubahan bagi peradaban manusia, dari peradaban yang kelam dan sempit akan ilmu pengetahuan, menjadi peradaban yang penuh dengan warna-warni ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Humaniora Jurusan Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dengan penuh khidmat penulis berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyusun sebuah tesis yang terbaik. Namun, keparipurnaan bukanlah hak manusia dan karyanya, dan begitulah pada akhirnya tesis ini dihasilkan, ia sarat dengan cacat dan kekurangan. Oleh karenanya, ia sangat meminta hadirnya kritik, saran, maupun komentar dari berbagai pihak untuk memperbaiki kekurangan dari karya ini.

Tesis ini hadir dengan berhutang budi kepada sejumlah individu dan berbagai pihak. Pertama-tama, saya ingin menyatakan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Mona Lohanda M.Phil. Ia tidak hanya meyakinkan saya untuk mengangkat tema ini, melainkan juga tak kenal lelah memberi masukan,

baik kritik maupun komentar, terhadap studi ini, dan tak kenal jemu mendorong penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada (Alm.) Anton Meoliono, Mien A Rifai, Harimurti Kridalaksana, Djoko Kentjono, Liek Wilardjo, Sri Sukesi Adimimarta, Benny H Hoed, Sugiyono, dan Meity Takdir Qodratillah, yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis di tengah kesibukannya masing-masing, dan memberikan bahan-bahan mengenai MBIM.

Selanjutnya, selayaknya saya menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada kepada staf Perpustakaan Pusat Bahasa, Arsip Nasional RI, Perpustakaan UI Depok, dan Perpustakaan Nasional yang telah memberikan bahan-bahan yang penulis butuhkan untuk penulisan tesis ini.

Penghargaan tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Tri Wahyuning Mundayanti, M. Si (pembimbing akademik), Dr. Priyanto Wibowo (Kepala Departemen Sejarah FIB), dan Bondan Kanumoyoso, M.Hum (Sekretaris Departemen Sejarah FIB), yang telah menyetujui penulis mengambil tema tesis ini. Tentunya juga, Dekan FIB UI, Dr. Bambang Wibawarta, serta segenap dosen program Ilmu Sejarah FIB yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang berbagai tema di seputar ilmu kesejarahan.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai individu. Untuk itu saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Santi dan Eva yang telah menjadi teman diskusi dalam proses pengerjaan tesis ini. Lebih jauh, dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Hadi Sukarno dan Siti Sumiyati yang telah

membesarkan, mendidik, dan mengenalkan penulis pada kehidupan. Juga, pada adikku, Tika Nova Lian, terimakasih untuk dorongannya.

Dan penghargaan saya yang terbesar, tentu saja saya alamatkan kepada yang terkasih, Siti Nurhayati, yang dengan penuh kelembutan dan kasih sayang telah menjadi pendamping setia penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Kesabaran dan pengertiannya membuat tahun-tahun terakhir kuliah saya di Depok menjadi lebih bermakna.

Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi siapa saja yang meminati kajian sejarah, terkhusus bagi mereka yang hendak mendalami tema seputar persoalan kebahasaan di Asia Tenggara.



Depok, Juli 2012

Setyadi Sulaiman

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyadi Sulaiman
NPM : 0906587501
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Sejarah FIB UI
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

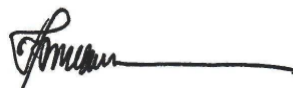
“Rujuk” Negara Serumpun: Merekam Jejak Kerjasama Kebahasaan Indonesia-Malaysia, 1966-1985

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 12 Juli 2012

Yang menyatakan


(Setyadi Sulaiman)

ABSTRAK

Nama : Setyadi Sulaiman
Program Studi : Ilmu Sejarah FIB UI
Judul : “Rujuk” Negara Serumpun: Merekam Jejak Kerjasama
Kebahasaan Indonesia-Malaysia, 1966-1985

Subjek penelitian ini adalah kerjasama kebahasaan Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan pasca konfrontasi tahun 1966 hingga tahun 1985. Fokus kajiannya diarahkan pada pembahasan sekitar sejarah perjalanan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) sejak resmi didirikan pada 29 Desember 1972 hingga tahun 1985 ketika kerjasama ini berubah nama menjadi Majelis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MABBIM) seiring diikutsertakannya Brunei Darussalam sebagai anggota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif-analisis.

Dengan apa yang telah diperagakan selama kurang lebih 14 tahun, MBIM berhasil menjadi sebuah forum unik—tidak ada di wilayah manapun—yang sangat efektif dan membawa banyak perubahan, khususnya dalam aspek kebahasaan, baik bagi Indonesia maupun Malaysia. Selain mampu menenggelamkan trauma konfrontasi yang pernah dirasakan oleh kedua negara, MBIM juga tercatat mampu menghadirkan ragam hasil di ranah kebahasaan.

Salah satu keluaran penting yang dihasilkan dari adanya serangkaian persidangan MBIM adalah semakin kuatnya kedua negara dalam konteks merancang dan menyempurnakan—termasuk mempergunakan—sistem ejaan yang di Indonesia dikenal sebagai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan di Malaysia dinamakan Ejaan Rumi Baru Bahasa Malaysia (ERB). Selain ejaan, keluaran lain yang juga penting dicatat adalah pedoman pembentukan istilah. Di Malaysia pedoman ini dikenal sebagai *Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu* (PUPIBM), sementara di Indonesia pedoman ini dikenal sebagai *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (PUI). Pedoman tersebut serentak mulai digunakan oleh masing-masing negara sejak tahun 1975.

Namun seiring banyaknya keluaran yang dihasilkan dari serangkaian sidang MBIM, tak pelak MBIM pun harus menghadapi beragam persoalan. Akan tetapi, meskipun dihadapkan pada beberapa persoalan, MBIM tetap dipandang sebagai sebuah forum kerjasama yang berhasil memberikan kontribusi tidak hanya pada proses pengembangan bahasa kedua negara tapi juga pada proses membangkitkan memori kolektif kesejarahan Indonesia-Malaysia.

Kata Kunci:

Kerjasama Kebahasaan, Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM), EYD.

ABSTRACT

Name : Setyadi Sulaiman
Study Program : History, Faculty of Culture Studies, University of Indonesia
Title : “Rujuk” of the Clump Nation: Record Traces Linguistic
Indonesia-Malaysia Cooperation, 1966-1985

This study aims to describe and explore the language cooperation between Indonesia and Malaysia, initiated in 1966, just after the end of Confrontation of the two countries, and lasted until 1985. Resulted from historical research, this thesis presents the subject in descriptive-analyses writing. The main point is discussion on the establishment of the Language Council of Indonesia-Malaysia called MBIM-*Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia*; and how this language cooperation implemented in both countries from 1972 to 1985.

By what has been executed for about 14 years under the Language Council showed changes and progress, in particular of the Malaya and Indonesian languages, given that both share the same roots, i.e. the Malay language. The cooperation, in its own way, had diminished the trauma and bitterness underwent in both countries, due to political divergences.

The most significant result of this language cooperation could be observed in the fields of policy language planning and designing, new formulation of word-spelling, due to historical background of colonialism, in which Indonesia has strong influence of the Dutch and Malaysia of the British. This way, both Malay spoken in Indonesia and Malaysia found new form agreed by both countries. Indonesia called it *Ejaan Yang Disempurnakan* (New Better-Formed Spelling) and Malaysia launched *Ejaan Rumi Baru* (Rumi New Spelling).

Other notable result is the guidelines of terms accorded by the Language Council during these 14 formative years, covering scientific terms of pure, natural and social sciences. Malaysia published the *General Guides for Establishment of Term in Malay* and Indonesia issued *Petunjuk Umum Penggunaan Istillah*, both were implemented in 1975.

Despite such a success story of the Language Council of Indonesia-Malaysia, problems were to be managed under friendly Malay way of problem-solving. However, MBIM was still considered a model cooperation, contributing not only to language development of both countries but also in making progress of reawakening collective memories shared by both nations, Indonesian and Malaysian.

Keywords: Linguistic Cooperation, Language Council of Indonesia-Malaysia (MBIM), EYD.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iii
Lembar Pengesahan	iv
Ucapan Terimakasih	v
Lembar Persetujuan Publikasi Ilmiah	viii
Abstrak	ix
Abstract	x
Daftar Isi	xi
Daftar Akronim	xiii
Daftar Istilah (Glosarium)	xvi
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Batasan Penelitian	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teori	9
1.6. Tinjauan Pustaka	14
1.7. Metodologi Penelitian	16
1.8. Sistematika Penulisan	21
BAB II Indonesia-Malaysia Pasca Konfrontasi	
2.1. Setelah Konfrontasi Berakhir: Indonesia 1966-1985	23
2.2. Malaysia Selepas Konfrontasi	34
2.3. Indonesia-Malaysia dalam Bingkai Kerjasama	45

BAB III Sejarah Berdirinya MBIM	
3.1. Awal Kerjasama	54
3.2. Sejarah Pendirian	60
3.2.1. Tahap Perencanaan/Kebijakan	64
3.2.2. Tahap Pelaksanaan dan Perkembangan	67
3.3. Struktur Kelembagaan dan Cara Kerja	73
BAB IV Dinamika Perkembangan MBIM	
4.1. Kronologi Persidangan MBIM	77
4.2. Memperkuat Sistem Ejaan: Misi Awal MBIM	79
4.3. Hasil Sidang MBIM dalam bidang Peristilahan	82
4.4. MBIM: Catatan dari Mereka yang terlibat	92
BAB V Dampak Kerjasama bagi Kedua Negara	
5.1. Penyempurnaan Sistem Ejaan (EYD/ERB)	106
5.2. Penguatan Aspek Peristilahan	115
BAB VI Kesimpulan	121
Daftar Pustaka	124
Lampiran	134

DAFTAR AKRONIM

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AIPI	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
AMS	Algemeene Middelbare School
ASASI	Akademi Sains Islam Malaysia
ASEAN	Association of South East Asian Nations
BAKIN	Badan Koordinasi Intelijen Negara
BATAN	Badan Tenaga Nuklir Nasional
BIN	Badan Intelijen Negara
BPI	Badan Pusat Intelijen
BN	Barisan Nasional
BTA	Border Trade Agreement
CBTA	Cross- Border Trade Agreement
COCC	Combined Operation Coordinator Committee
DBP	Dewan Bahasa dan Pustaka
DEB	Dasar Ekonomi Baru
Depdikbud	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Dirjen	Direktur Jenderal
Ejaan Melindo	Ejaan Melayu-Indonesia
ELS	Europesche Lagere School
EYD	Ejaan Yang Disempurnakan (Indonesia)
ERB	Ejaan Rumi Bersama (Malaysia)
FIPA	Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam
FSUI	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
FT UKSW	Fakultas Teknik Universitas Kristen Satya Wacana
GAPENA	Gabungan Persatuan Penulis Nasional
GBC	General Border Committee

Golkar	Golongan Karya
IKJ	Institut Kesenian Jakarta
JKI	Jawatankuasa Istilah
JKTBM	Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia
JMN	Johan Mangku Negara
KAPPI	Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KI	Komisi Istilah
KIN	Komando Intelijen Negara
KSAD	Kepala Staf Angkatan Darat
KSAL	Kepala Staf Angkatan Laut
LBB	Lembaga Bahasa dan Budaya
LBK	Lembaga Bahasa dan Kesusastraan
LBN	Lembaga Bahasa Nasional
MABBIM	Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia
MAGERAN	Majlis Gerakan Negara
Malari	Malapetaka Januari
MASTERA	Majelis Sastra Asia Tenggara
MBIM	Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia
MCA	Malaysian Chinese Association
MIC	Malaysian Indian Congress
MULO	Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
NEP	New Economy Policy
P3B	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Parmusi	Partai Muslim Indonesia
PAS	Partai Islam SeMalaysia
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa.
Pepelrada	Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah
PDI	Partai Demokrasi Indonesia
PERBARA	Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
PKI	Partai Komunis Indonesia
PKIM	Panitia Kerjasama Kebahasaan Indonesia-Malaysia
PNI	Partai Nasional Indonesia
PPBI	Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PPSMI	Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggris
PSM	Panglima Setia Mahkota
PUPIBM	Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu
PUEBIYD	Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
PUPI	Pedoman Umum Pembentukan Istilah
REPELITA	Rencana Pembangunan Lima Tahun
RUTI	Riset Unggulan Terpadu Internasional
SESKO	Sekolah Staf Komando
THS	Technische Hogeschool
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UDA	Urban Development Authority
UI	Universitas Indonesia
UITM	Universiti Teknologi Mara
UGM	Universitas Gadjah Mada
UKM	Universitas Kebangsaan Malaysia
UPSI	Universitas Pendidikan Sultan Idris
UNAS	Universitas Nasional
UM	Universitas Malaya
UMNO	United Malays National Organisation
USM	Universitas Sains Malaysia
UTM	Universitas Teknologi Malaysia
UUM	Universitas Utara Malaysia

GLOSARIUM

Anatomi	Cabang ilmu biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup.
Dialek	Variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai bahasa.
Diakronik/Diagronis	Berkenaan dengan pendekatan terhadap bahasa dengan melihat perkembangannya sepanjang masa, atau bersifat historis.
Diftong	Dua huruf vokal yang tidak dapat dipisahkan dan selalu diucapkan sekaligus.
Divergensi Linguistik	Proses terpecah belahnya suatu bahasa menjadi beberapa dialek karena tiadanya fasilitas pendidikan yang standar dan kurang cukupnya komunikasi sehingga akhirnya menimbulkan perbedaan corak penuturan.
Etimologi	Penyelidikan mengenai asal-usul kata serta perubahan-perubahannya dalam bentuk dan makna.
Etnolinguistik	Cabang linguistik yang menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat pedesaan atau masyarakat yang belum mempunyai tulisan.
Fonetik	Bidang linguistik tentang pengucapan (penghasilan) bunyi ujar atau sistem bunyi suatu bahasa.
Fonem	Satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna, misalnya, /h/ adalah fonem karena membedakan makna kata harus dan arus, /b/ dan /p/ adalah dua fonem yang berbeda karena bara dan para beda maknanya.
Hidrogeologi	Ilmu tentang air tanah yang mementingkan hubungan lingkungan geologi dengan berbagai segi air permukaan yang berkaitan.
Hidrologi	Ilmu tentang air di bawah tanah, keterdapatannya, peredaran dan sebarannya, persifatan kimia dan fisiknya, reaksi dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup.
Intonasi	Lagu kalimat.
Geologi	Ilmu tentang komposisi, struktur, dan sejarah bumi.
Konstruksi Sintaktis	Pengelompokan satuan yang sesuai dengan kaidah sintaktis suatu bahasa, misalnya, rumah makan (dan bukan makan rumah).

Leksikografi	Cabang ilmu bahasa mengenai teknik penyusunan kamus.
Metalinguistik	Penelitian tentang hubungan antara faktor bahasa dan faktor bukan bahasa dalam masyarakat.
Meteorologi	Ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri fisika dan kimia atmosfer (untuk meramalkan keadaan cuaca).
Mikologi	Ilmu tentang seluk-beluk kehidupan jamur.
Modernisasi Leksikal	Berkaitan dengan agenda pemodernan kata/kosa kata.
Morfologi (Linguistik)	Cabang linguistik tentang morfem dan kombinasinya; bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun semantik.
Morfologi (Biologi)	Ilmu pengetahuan tentang bentuk luar dan susunan makhluk hidup.
Nomina	Kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak, misal rumah adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah, biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa.
Ortografi	Gambaran bunyi bahasa yang berupa tulisan atau lambang; sistem ejaan suatu bahasa.
Pepet	Tanda "u" untuk menyatakan bunyi /ʔ/ dalam kata seperti segar, lekas.
Petrologi	Ilmu tentang asal muasal, sejarah terjadinya bentuk, komposisi kimia, dan klasifikasi batuan.
Semantis	Berhubungan dengan ilmu tentang makna dalam bahasa.
Sosiolinguistik	Ilmu tentang bahasa yang digunakan di dalam interaksi sosial; cabang linguistik tentang hubungan dan saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial.
Terminologi	Peristilahan (tentang kata-kata); perangkat peraturan pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkan dalam suatu bidang satau suatu bahasa.
Zoologi	Ilmu tentang kehidupan binatang dan pembuatan klasifikasi aneka macam bentuk binatang di dunia.

BAB I

PENDAHULUAN

“Malaysians are blood brothers of the Indonesians. We are few in number. I sometimes wonder whether the Malays would have come into being if it had not been for the Indonesians. Thanks to Allah, Confrontation is over. It was not Indonesians confronting Malays, but communists opposing non-communists.” (Tunku Abdul Rahman, Maret, 1968)¹

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam spektrum kehidupan Asia Tenggara, pola hubungan antara Indonesia dan Malaysia tergolong unik. Satu sisi, keduanya dipadukan dalam *setting* budaya yang hampir sama, Melayu. Pun dalam ranah kehidupan keagamaan yang dalam hal ini sama-sama menjadikan Islam sebagai agama mayoritas kedua wilayah. Namun disisi lain, dan ini yang banyak diperbincangkan, adalah bahwa di antara ragam kesamaan tersebut, cerita perselisihan di antara keduanya, justru tampak lebih mengemuka.

Melihat sejarah perjalanan kedua negara, awal tahun 60-an, kebijakan Sukarno yang menghendaki konfrontasi dengan Malaysia, menjadi titik awal perselisihan tersebut. Dengan anggapan bahwa Malaysia merupakan kaki tangan imperialis Inggris, Sukarno mengeluarkan *statement* tegas, “Ganjang Malaysia!”. Kontan, pernyataan ini membawa rentang tahun 1963 hingga 1966, sebagai era yang diwarnai konflik “perang dingin” antar kedua negara.

Meskipun pada akhirnya muncul kesepakatan untuk melakukan normalisasi hubungan di antara kedua negara,² namun sangat nyata bahwa atmosfer perdamaian baru mulai terasa tatkala Indonesia berada di bawah kepemimpinan Suharto yang mulai menjabat sebagai presiden RI pada 12 Maret

¹ Korespondensi antara British High Commission, Kuala Lumpur, dan Commonwealth Office, London, 16 March 1968, FCO 24/243, PRO, seperti dikutip Joseph Chin Yong Liow, *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*, (London: RoutledgeCurzon, 2005) hal.23.

² Upaya untuk melakukan normalisasi hubungan di antara kedua negara tersebut didahului oleh pertemuan dua hari antara Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik dan Tun Abdul Razak di Bangkok pada bulan Agustus 1966. Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan damai antara pihak Indonesia dan Malaysia dengan didasarkan pada sebuah surat perjanjian tertanggal 11 Agustus 1966. Lihat “Agreement to Normalise Relations between The Republic of Indonesia And Malaysia,” *International Legal Materials*, Vol. 5, No. 5 (September 1966), hal. 867.

1967. Sejak saat itu, atmosfir perdamaian dihadirkan oleh Suharto dan beberapa tokoh Indonesia melalui serangkaian aksi dan kebijakan yang mengarah pada agenda rekonsiliasi—beberapa tokoh menyebutnya sebagai agenda “rujuk”—guna menutup keran perselisihan antar kedua negara.

Agenda rekonsiliasi antar kedua negara tersebut terjabar dalam beberapa pola kegiatan. Dengan harapan utama mengeratkan kembali hubungan kedua negara yang sempat terhenti karena adanya konfrontasi, baik Indonesia maupun Malaysia bersepakat untuk melancarkan beberapa agenda kerjasama. Setelah berhasil membentuk ASEAN pada tahun 1967 kedua negara juga menjalin kerjasama dalam beberapa bidang, seperti kerjasama dalam bidang keamanan dan intelijen (1969), kerjasama dalam bidang Perdagangan Lintas Batas atau *Border Trade Agreement/BTA* (1970), dan kerjasama dalam bidang ketentaraan/militer atau *General Border Committee/GBC* (1972).

Memasuki awal tahun 70-an, jalinan kedua negara tampak semakin menguat. Dihasilkannya sebuah “komunike bersama” yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia pada tanggal 23 Mei 1972, menjadi awal masa keemasan di antara kedua negara. Secara umum, isi komunike bersama tersebut menyatakan bahwa kedua negara bersepakat untuk mengadakan kerjasama jangka panjang yang terwujud pada dua bentuk kerjasama.

Pertama, pengiriman tenaga pengajar untuk tingkat menengah dan tingkat tinggi dari Indonesia ke Malaysia. *Kedua*, penguatan kebahasaan kedua negara dalam bentuk meresmikan berlakunya ejaan yang disempurnakan (EYD) dengan Surat Keputusan Menteri masing-masing yang akan diperkuat melalui pembentukan majelis atau panitia tetap pengembangan bahasa nasional masing-masing yang akan mengadakan pertemuan-pertemuan berkala di kedua negara secara bergilir.

Terkait program pengiriman tenaga pengajar (guru dan dosen) dari Indonesia ke Malaysia khususnya pada bidang MIPA dan sastra, agenda ini mulai berjalan efektif pada awal tahun 1970 setelah pihak pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pelajaran Malaysia yang diketuai oleh Tan Sri Hamdan Sheikh Tahir mengadakan perundingan dengan pihak Kementerian Pendidikan Indonesia yang

kala itu dipercayakan kepada Sumantri Brodjonegoro selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.³

Sejak saat itu, dimulailah program pengiriman tenaga pengajar (guru dan dosen) dari Indonesia ke Malaysia khususnya pada bidang MIPA (Sains/Teknologi dan Matematika) serta dalam bidang Sastra. Oleh pemerintah Malaysia, beberapa guru dan beberapa kalangan akademisi Indonesia tersebut diminta untuk mengajar di beberapa institusi pendidikan Malaysia. Selain kelompok guru dari berbagai wilayah di Indonesia, kalangan sarjana dan pengajar asal Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), pun didaulat menjadi perwakilan Indonesia dalam kerjasama tersebut.

Sementara, untuk program penggantian ejaan bahasa Indonesia yang seragam, agenda tersebut mulai bergulir ketika kedua negara bersepakat untuk membuat satu pernyataan bersama terkait pengembangan kebahasaan yang kala itu ditandatangani oleh Tun Hussein Onn selaku Menteri Pendidikan Malaysia, dan Mashuri Saleh, S.H., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari agenda yang berjalan lancar pada 23 Mei 1972 di Jakarta dihasilkanlah dua agenda penting yang coba diketengahkan kedua negara saat itu.

Salah satu agenda yang dijadikan fokus utama yaitu tentang upaya pengembangan bahasa nasional masing-masing negara yang meliputi: ejaan, istilah, dan tata bahasa. Untuk misi pengembangan itu, kedua pemerintah bersepakat untuk melakukan beberapa hal. *Pertama*, melanjutkan agenda pertemuan 27 Juni 1967 yang telah membahas dan mematangkan konsep ejaan yang telah disempurnakan. *Kedua*, meresmikan sekaligus mengumumkan berlakunya ejaan tersebut dengan Surat Keputusan Menteri masing-masing negara pada waktu yang bersamaan. *Ketiga*, membentuk panitia tetap bersama tentang pengembangan bahasa nasional masing-masing yang akan mengadakan pertemuan-pertemuan berkala di kedua negara secara bergilir. Adapun panitia

³ Dato' Haji Omar bin Moh. Hasyim, "Sumbangan Tenaga Pengajar Indonesia dalam Bidang Sains dan Matematik di Sekolah-sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia", dalam Musni Umar dan Pudentia MPSS, *Membangkitkan Memori Kolektif Kesenjangan Indonesia-Malaysia* (Jakarta: INSED dan EPG Indonesia, 2011), hal. 102-103.

tersebut sudah harus bersidang selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1972 di tempat yang ditetapkan bersama.⁴

Dari sana, dihasilkanlah apa yang kemudian dikenal dengan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) yang resmi disepakati keberadaannya pada tanggal 29 Desember 1972. Pada perjalanannya, MBIM berhasil menjadi sebuah forum unik—tidak ada di wilayah manapun—yang sangat efektif dan membawa banyak perubahan, khususnya dalam aspek kebahasaan bagi kedua negara. Bahkan munculnya MBIM oleh sebagian kalangan dipandang sebagai sebuah penegasan bahwa Indonesia dan Malaysia bukanlah dua negara yang setia dalam pertikaian. Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun yang bisa hidup dalam *setting* damai tanpa konflik serta memiliki hubungan spesial dan sangat jauh dari kesan berjarak oleh sebab perselisihan.

Akan tetapi memasuki pertengahan tahun 1980-an, terjadi beberapa perubahan penting terkait hubungan kedua negara. Dari segi ekonomi-politik, baik Indonesia maupun Malaysia berada di masa keemasan dengan segudang prestasi yang layak dibanggakan, khususnya terkait menguatnya konsolidasi ekonomi dan politik di masing-masing negara. Problemanya dengan beragam keberhasilan itu, alih-alih mengefektifkan kerjasama, kedua negara justru seakan makin terpisah, khususnya secara ekonomi. Dalam hal ini terlihat ada pembatas di antara keduanya ketika harus dipertemukan dalam konteks ekonomi. Fakta pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kala itu melebihi Indonesia,⁵ sedikit banyak turut menyumbang pada terjadinya situasi yang kurang kondusif di antara kedua negara.

Maka kondisi yang berlaku saat itulah yang sedikit banyak membawa pengaruh bagi pemimpin pemerintahan Malaysia dalam melihat Indonesia. Perasaan bahwa Malaysia mampu bergerak sendiri tanpa lagi berharap kepada

⁴ Lihat “Persetujuan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia tentang Kerdjasama dibidang Pendidikan, 23 Mei 1972”, dalam Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hal.xxvii.

⁵ Pada tingkat pertumbuhan ekonomi, tercatat bahwa Malaysia mampu menghasilkan GNP sebesar 1900 juta dollar AS pada tahun 1982. Dan ini jelas sangat jauh meninggalkan Indonesia yang hanya mampu menghasilkan GNP sebesar 600 juta dollar AS pada tahun 1982. Data lengkap tentang perbandingan perolehan GNP kedua negara, lihat World Tables, 1994, Baltimore, Johns Hopkins University Press, tabel 1. Seperti dikutip dalam, Alasdair Bowie & Danny Unger, *The Politics of Open Economies: Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand*, (New York: Cambridge University Press, 1997), hal.2.

Indonesia tak ayal mendatangkan perubahan sikap pemerintah Malaysia kepada Indonesia. Sejak saat itu dimensi politik lebih dijadikan target utama oleh kedua negara. Dan dasar inilah yang dalam batas tertentu membuat pemerintah Malaysia di era 80-an memutuskan untuk mengganti arah kebijakan, termasuk dalam hal kerjasama dengan Indonesia.

Meski demikian Indonesia tetap merasa bahwa keberhasilan yang mereka dapat kala itu sudah menunjukkan betapa Indonesia telah berubah, dan siap tampil sebagai negara dengan perekonomian yang stabil dan maju di wilayah Asia Tenggara. Maka dengan kekuatan dan keberhasilan kedua negara, khususnya dalam membangun negaranya masing-masing, fakta yang justru menguat di era 80-an adalah aroma persaingan kedua negara. Hal ini misalnya tercermin dalam beberapa kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia terkait bidang diplomasi internasional yang sangat terkesan berupaya menonjolkan keunggulan politik masing-masing. Sehingga sejarah mencatat, era 80-an ketika Malaysia dipimpin oleh Mahathir, hubungan Indonesia dan Malaysia kembali masuk pada situasi yang menjauh dari cita-cita “rujuk” seperti yang telah terbangun pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun yang penting dicatat seiring terjadinya perubahan tersebut adalah bahwa kedua negara seringkali berada pada posisi berseberangan manakala yang dijadikan acuan adalah ranah politik-ekonomi. Pada dimensi ini seperti terungkap dalam beberapa jalinan kerjasama politik dan ekonomi kedua negara, sensitifitas begitu menonjol dan bahkan mengalahkan ide kebersamaan yang sebenarnya terjalin erat pada ranah lain, yakni ranah kebahasaan.

Pada ranah kebahasaan, meskipun juga tak menutup kemungkinan menimbulkan konflik, terbentuknya kerjasama kebahasaan (MBIM) antara kedua negara mulai tahun 1972 hingga tahun 1985, nyatanya berhasil memperkuat jalinan relasi kedua negara yang akhirnya menutupi setiap celah konflik yang seringkali bergejolak. Dengan kata lain, selain telah menghadirkan beragam hasil yang bermanfaat bagi perkembangan dimensi kebahasaan Indonesia-Malaysia, pembentukan MBIM juga telah berhasil menciptakan harmonisasi kedua negara pasca berlangsungnya konfrontasi di era Orde Lama.

Persoalannya, meski tampak kokoh dan terlihat berhasil menciptakan harmonisasi antara Indonesia dan Malaysia, MBIM pun tak pelak harus menghadapi berbagai persoalan. Salah satu yang dapat dicatat adalah perihail mulai hilangnya fungsi dan kekuatan MBIM sebagai sebuah forum kebahasaan antara kedua negara. Bergabungnya Brunei Darussalam menjadi anggota Majelis ini pada 4 November 1985,⁶ menurut beberapa pelaku sejarah awal MBIM, mulai merubah pola hubungan kedua negara.⁷

Jika pada masa awal berjalannya MBIM kedua negara selalu menekankan aspek informal dalam setiap pelaksanaan sidang MBIM—dan hal ini menjadi ciri khas yang sempat bertahan beberapa tahun—namun memasuki dasawarsa tahun 80-an, kondisi tersebut mulai mengalami perubahan. Sejak itu Malaysia mulai menekankan aspek protokoler/formal dalam setiap sidang MBIM. Dalam konteks tempat pelaksanaan forum misalnya, jika sebelumnya, forum MBIM diadakan di tempat-tempat yang sederhana, di kantor DBP ataupun di Pusat Bahasa, maka pada era tahun 80-an—terlebih ketika Brunei turut bergabung sebagai anggota—pelaksanaan sidang berpindah ke ruang-ruang hotel berbintang. Tradisi ini semakin membudaya manakala “kebijakan” pelaksanaan sidang tersebut didukung oleh Malaysia yang pada rentang tahun tersebut diketahui telah berubah menjadi negara yang cukup berhasil secara ekonomi di Asia Tenggara. Sejak itu, pihak Malaysia mulai “latah” untuk juga tinggal di hotel berbintang, meskipun tetap saja, hotel tersebut memiliki standar kualitas di bawah Brunei.⁸

Dari kondisi tersebut terlihat bahwa sebagai sebuah forum kerjasama, MBIM bergerak dengan sangat dinamis. Dalam perjalanannya, selain berhasil membawa ragam dampak yang positif di awal kehadirannya MBIM juga terpaksa harus menghadapi beragam persoalan, termasuk salah satunya persoalan pemberlakuan “kebijakan” pelaksanaan persidangan seperti telah dijelaskan di atas.

⁶ Tentang perjalanan awal MABBIM, lihat Tim P3B, *Sosok Pokok Tokoh MABBIM, Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), Dr. Raja Masittah Raja Ariffin, *Tokoh Pembinaan Bahasa Melayu Serantau: 35 Tahun MABBIM* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010).

⁷ Wawancara dengan Anton Meoliono, 11 Februari 2011, Mien A Rifai, 10 Februari 2012, Harimurti Kridalaksana, 24 Februari 2012, dan Liek Wilardjo, 29 Februari 2012.

⁸ Wawancara dengan Mien A Rifai, 22 Februari 2012 dan Liek Wilardjo, 29 Februari 2012.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas dinamika kerjasama kebahasaan antara Indonesia dengan Malaysia pasca konfrontasi yang terwujud dalam Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) hingga bergabungnya Brunei Darussalam pada tahun 1985 dalam kerjasama kebahasaan tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diajukan beberapa pertanyaan penelitian, seperti:

1. Apa yang melatarbelakangi kemunculan kerjasama kebahasaan antara Indonesia-Malaysia?
2. Bagaimanakah dinamika perkembangan kerjasama kebahasaan antara Indonesia-Malaysia?
3. Apa hasil kongkrit dari adanya kerjasama kebahasaan (MBIM) mulai tahun 1972 hingga tahun 1985?
4. Seperti apakah dampak terjadinya beragam kerjasama kebahasaan (MBIM) dalam konteks hubungan kedua negara?
5. Bagaimana pandangan para pelaku kerjasama kebahasaan (MBIM) asal Indonesia tentang dinamika perkembangan MBIM sejak awal berdiri hingga tahun 1985?
6. Perubahan apa yang dirasakan oleh para pelaku kerjasama kebahasaan (MBIM) asal Indonesia dari awal kemunculan MBIM hingga tahun 1985 ketika kerjasama ini berubah nama menjadi MABBIM?
7. Bagaimana sikap dan dukungan masing-masing pemerintah, baik Indonesia maupun Malaysia, dalam konteks penguatan kerjasama kebahasaan (MBIM)?

1.3. Batasan Penelitian

Studi ini terfokus pada sejarah kerjasama bidang kebahasaan antara Indonesia dengan Malaysia pasca konfrontasi dan akan difokuskan selanjutnya pada perkembangan MBIM sejak pertama kali didirikan hingga tahun 1985 ketika Brunei Darussalam bergabung dalam forum kerjasama tersebut. Secara umum, pengambilan rentang tahun tersebut dikarenakan beberapa sebab.

Pertama, dalam sejarahnya rentang era tersebut merupakan masa dimana hubungan kerjasama kebahasaan antara Indonesia dan Malaysia berjalan dengan baik. Karena sejauh pengamatan penulis, selain rentang era tersebut, hubungan kedua negara tampak selalu diwarnai oleh beragam perselisihan. *Kedua*, pada rentang era tersebut terjadi beberapa perkembangan menarik khususnya di ranah kebahasaan kedua negara. Selain karena posisi dunia kebahasaan Indonesia yang “sedikit lebih unggul” dari Malaysia, era tersebut juga ditandai oleh beberapa perkembangan signifikan dalam dunia kebahasaan di masing-masing negara. Hadirnya Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Bersama dan juga Pedoman Pembentukan Istilah pada pertengahan tahun 70-an baik di Indonesia maupun Malaysia dalam perkembangannya sangat berdampak positif bagi perkembangan bahasa di masing-masing negara. Dengan kedua produk yang dihasilkan dari forum MBIM tersebut, kedua negara semakin mampu menata sekaligus membangun dimensi kebahasaan mereka.

Ketiga, era tersebut dapat disebut era membangun bagi masing-masing negara. Di satu sisi, konsekuensi dari agenda pembangunan jelas akan mampu menghadirkan ragam fakta, khususnya langkah-langkah kongkrit masing-masing negara dalam konteks membangun negara mereka dengan beragam cara dan pola. Namun di sisi lain, era membangun terkadang juga membawa perubahan sikap di masing-masing negara dalam berbagai hal, terlebih ketika negara tersebut sudah merasa berada di titik berhasil dalam proses pembangunan tersebut.

Dengan merujuk pada *setting* perjalanan kedua negara di era tersebut, tampak bahwa dibanding aroma perselisihan, era pasca konfrontasi hingga tahun 1985 lebih menonjolkan aroma keakraban yang memang menjadi visi bersama kedua negara pasca konfrontasi. Maka inilah alasan dasar mengapa rentang era tersebut dijadikan batasan utama penelitian ini.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan mengacu kepada perumusan masalah dan batasan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- (1) Melihat *setting* kehidupan Indonesia dan Malaysia sejak awal pemerintahan Orde Baru, khususnya akhir tahun 1960-an hingga pertengahan tahun 1980-an.
- (2) Melihat dampak atas terjadinya agenda kerjasama kebahasaan (MBIM) antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1972 hingga tahun 1985, khususnya dalam proses penciptaan harmonisasi kedua negara.
- (3) Melacak berbagai persoalan yang muncul seiring berjalannya kerjasama kebahasaan (MBIM) antara Indonesia dan Malaysia.
- (4) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sejarah di Indonesia.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini di antaranya:

- (1) Memberikan fakta-fakta baru sekitar kerjasama kebahasaan (MBIM) yang pernah dilancarkan kedua negara sejak akhir tahun 1960-an hingga tahun 1985.
- (2) Memberikan perspektif baru dalam melihat pola hubungan Indonesia dan Malaysia, khususnya melalui dimensi kerjasama kebahasaan.
- (3) Memberikan sumbangan informasi bagi dunia akademis, khususnya dalam bidang kesejarahan, terkait dengan tema kerjasama di antara negara-negara di Asia Tenggara, dalam hal ini antara Indonesia dan Malaysia.

1.5. Kerangka Teori

Dalam konteks hubungan Indonesia dan Malaysia, satu istilah yang seringkali muncul mengiringi laju perjalanan bersama kedua negara adalah tentang bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang dikenal sebagai “Diplomasi Serumpun”. Konsep diplomasi tersebut sejatinya dipahami sebagai sebuah bentuk kerjasama yang mengandalkan sentimen personal elit politik antar kedua negara. Perasaan bahwa keduanya berangkat dari identitas yang sama sebagai negara serumpun yang memiliki banyak kesamaan akar budaya, silsilah kerajaan, bahkan kecenderungan keberagaman yang tak jauh berbeda, menyebabkan para elit kedua negara bergerak melalui sebuah prinsip kebersamaan dalam menangani beragam permasalahan yang muncul di antara keduanya.

Pada gilirannya, prinsip inilah yang selanjutnya membawa kedua negara serumpun ini terlibat dalam rasa yang lebih luas, yang dalam konteks ini dinaungi oleh sebuah prinsip identitas kolektif (*collective identity*). Dalam spektrum politik internasional, khususnya dalam kerangka relasi internasional, *term* identitas kolektif seringkali digunakan untuk mendedah perihal relasi antar beberapa negara, khususnya negara-negara yang disatukan dalam *setting* kondisi, tujuan dan harapan yang sama. Kesamaan tujuan dan harapan itulah yang dalam perkembangannya akan membentuk sebuah identitas kolektif.

Beberapa akademisi yang menggunakan konsep ini di antaranya Alexander Wendt, melalui karyanya *Social Theory of International Politics*.⁹ Meminjam analisa Wendt, identitas kolektif (*collective identity*) setidaknya terbentuk melalui serangkaian variabel yang saling berkaitan di antaranya kesalingtergantungan (*interdependence*), nasib bersama (*common fate*), kesamaan atau homogenitas (*homogeneity*) dan menahan diri (*self-restraint*). Keempat variabel ini, seyogyanya harus selalu berkaitan dan bergerak bersama guna membentuk identitas. Karenanya, kekuatan dari identitas kolektif demikian bergantung pada intensitas dari gabungan keempat faktor tersebut.¹⁰

Dalam konteks ini, keempat variabel tersebut akan digunakan untuk melihat pola hubungan antara Indonesia dan Malaysia sejak akhir masa konfrontasi hingga pertengahan tahun 80-an. Variabel kesalingtergantungan (*interdependence*) misalnya, jelas diperlukan bagi terbentuknya relasi antara Indonesia dan Malaysia yang dalam beberapa kasus tampak saling bergantung antara satu dengan lainnya.

Saling ketergantungan Malaysia dan Indonesia antara lain ditunjukkan selain oleh kebutuhan Malaysia akan tenaga pengajar dari Indonesia juga kebutuhan akan perlunya memperkuat kerjasama kebahasaan dengan Indonesia guna memperkuat dimensi bahasa nasional Malaysia. Sementara Indonesia, selain hendak membangun kembali hubungannya dengan Malaysia yang sempat terhenti akibat konfrontasi, juga membutuhkan sumber pemasukan ekonomi yang sedikit

⁹ Tentang konsep ini lihat lebih jauh dalam Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, (USA: Cambridge University Press, 1999).

¹⁰ Wendt, "*Social Theory*...hal.343-344.

banyak disediakan oleh Malaysia dan itu bisa didapatkan ketika Indonesia setuju untuk melakukan agenda pengiriman tenaga pengajar ke Malaysia.

Karenanya, idealisasi Malaysia yang hendak memfokuskan diri pada aspek pendidikan pasca menjadi negara merdeka, nyatanya menambah kebutuhan Malaysia akan tenaga pengajar dari Indonesia. Lebih jauh, sebagai upaya memperkuat tata bangun kebangsaan pasca merdeka, Malaysia pun memerlukan mitra yang mampu turut serta membangun dimensi kebahasaan—bahasa nasional—mereka. Dalam konteks ini, pengiriman tenaga pengajar, baik guru dan dosen, dari Indonesia pada awal tahun 70-an dan terbentuknya MBIM pada tahun 1972, setidaknya dapat menjadi cerminan prinsip saling ketergantungan tersebut.

Sementara terkait prinsip nasib bersama (*common fate*), Wendt menjelaskan bahwa identitas kolektif menguat manakala ada pemahaman tentang nasib yang sama di antara aktor-aktor yang ada. Aktor-aktor menghadapi suatu kesamaan nasib bila kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka bergantung pada apa yang terjadi kepada kelompok secara keseluruhan. Adapun persamaan nasib bersama seringkali tercipta setelah adanya ancaman terhadap kedua negara yang merasa sedang berada dalam sebuah ruang—dalam imajinasi Wendt diandaikan sebagai sebuah kapal pesiar—yang sama.¹¹

Dalam kaitan dengan hubungan Indonesia-Malaysia, perasaan tentang nasib bersama ini menguat setidaknya pada saat-saat di mana masing-masing negara mempersiapkan kemerdekaan.¹² Nasib sebagai negara terjajah akhirnya mampu mempersatukan semangat kedua bangsa untuk saling membantu. Disinilah para tokoh pejuang kemerdekaan seperti Burhanudin Al-Helmy, Ibrahim Yakoob, Ahmad Boestaman, Mokhtaruddin Lasso di Malaysia, dan Muhammad Yamin, Mohammad Hatta dan Sukarno di Indonesia, tampak bersatu padu seraya terus bersimpati satu dengan lainnya dalam melawan penjajah. Meskipun masing-masing kelompok muncul dengan nama berbeda, Indonesia Raya (Greater Indonesia) bagi Indonesia dan Melayu Raya (The Greater Malay Kingdom) bagi

¹¹ Wendt, "*Social Theory*...hal.349.

¹² Indonesia memulai upaya perjuangan kemerdekaan lebih dahulu daripada Malaysia. Karena itulah, ketika tahun 1945 Indonesia sudah berhasil meraih kemerdekaan, Malaysia baru berhasil meraihnya pada tahun 1957.

Malaysia, kehadiran mereka kala itu jelas dipengaruhi oleh perasaan bahwa mereka berasal dari rumpun yang sama yang juga memiliki kesamaan cita-cita.¹³

Selanjutnya, unsur identitas kolektif lain menurut Wendt adalah homogenitas. Menurutnya, homogenitas cenderung menghasilkan perilaku pro-sosial di antara para aktor, dalam hal ini pemerintah atau elit negara, yang merasa hidup dalam satu rumpun bersama. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Malaysia, unsur ini sangat kuat mengembang di antara kedua pihak. Fakta bahwa keduanya memiliki kesamaan bahasa, agama serta budaya, membuat prinsip homogenitas dipahami dengan sangat baik oleh para elit negara baik Indonesia maupun Malaysia. Dari sinilah terkadang, setelah melalui serangkaian proses komunikasi, keduanya akan bersepakat untuk menciptakan semacam keterpaduan yang terepresentasikan melalui adanya beberapa kerjasama, termasuk dalam bidang kebahasaan.¹⁴

Aspek homogenitas dalam identitas kolektif Indonesia dan Malaysia adalah yang paling kuat. Kesamaan ini misalnya terlihat dari akar historis, budaya, hubungan kekerabatan dan famili yang kuat di antara penduduk kedua negara. Dan inilah yang menyebabkan mengapa prinsip homogenitas tak dapat dilepaskan oleh keduanya.

Maka beragam variabel dalam identitas kolektif itulah yang pada akhirnya memperkuat ikatan dan kebersamaan kedua negara khususnya dalam konteks keikutsertaan mereka dalam forum MBIM. Bahkan lebih jauh, dengan terjaganya beberapa prinsip tersebut, akan pula mencegah para anggota MBIM, untuk terlibat dalam permusuhan dan konflik. Di sinilah konsep menahan diri (*self-restraint*) menemukan relevansinya. Bahwa semangat menahan diri (*self-restraint*) untuk terlibat dalam permusuhan dan konflik menjadi titik pijak bagi kedua negara untuk terus selalu menjaga perdamaian seraya tetap memperkuat identitas kolektif di antara mereka.

Selain konsep identitas kolektif (*collective identity*), konsep lain yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah konsep perencanaan bahasa (*language planning*). Konsep ini mula-mula digunakan oleh Einar Haugen dalam tulisannya

¹³ Joseph Chin Yong Liow, *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*, (London:RoutledgeCurzon, 2005) hal.23.

¹⁴ Wendt, "Social Theory...hal.355.

Planning for a Standar Language in Modern Norway (1959).¹⁵ Menurutnya perencanaan bahasa ialah usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana. Perencanaan itu tidak tidak semata-mata meramalkan masa depan berdasarkan apa yang diketahui pada masa lampau, tetapi perencanaan tersebut merupakan usaha yang terarah untuk mempengaruhi masa depan. Usaha perencanaan tersebut dapat dilakukan misalnya dengan cara membuat tata ejaan yang normatif ataupun menyusun tata bahasa dan kamus yang akan menjadi pedoman bagi penutur dan penulis di dalam masyarakat yang tidak homogen.¹⁶

Hingga saat ini banyak akademisi yang telah mengembangkan konsep perencanaan bahasa, seperti misalnya Neustupny (1970),¹⁷ Rubin dan Jernudd (1971),¹⁸ Garvin (1973),¹⁹ Gorman (1973),²⁰ ataupun Moeliono (1985).²¹ Namun dalam penelitian ini penulis lebih memilih untuk menggunakan teori yang diberikan oleh Neustupny (1970). Selain karena muncul di masa-masa awal berkembangnya konsep perencanaan bahasa—setelah era Haugen—juga kerana dalam banyak hal teori yang diajukan, menurut hemat penulis, lebih sesuai dengan apa yang berlaku di MBIM, tema utama penelitian ini.

Menurut Neustupny proses perencanaan bahasa bertolak dari kenyataan adanya ketakpadanan dalam bahasa. Ketakpadanan yang pertama menyangkut ragam bahasa tertentu di dalam masyarakat, sedangkan ketakpadanan yang kedua bertalian dengan penggunaan bahasa orang seorang. Usaha menangani kedua macam masalah kebahasaan itu menurutnya dapat dilakukan dengan dua

¹⁵ Einar Haugen, “Planning for a Standar Language in Modern Norway,” dalam *Anthropological Linguistics*, Vol.1, No. 3, 1959, hal. 8-21. Lihat pula Einar Haugen, *Language Conflict and Language Planning: The Case of Modern Norwegian* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1966)

¹⁶ Haugen, “Planning for a Standar Language.....”, hal. 8-10

¹⁷ Jiri V. Neustupny, “Basic Types of Treatment of Language Problems” dalam J.A. Fishman (ed.) *Advances in Language Planning* (The Hague: Mouton, 1974), hal. 37-48.

¹⁸ Tentang ini lihat lebih jauh dalam Joan Rubin & Bjorn H. Jernudd (eds), *Can Language be Planned?* (Honolulu: University of Hawai Press, 1971)

¹⁹ Paul L. Garvin, “Some Comments on Language Planning” dalam Joan Rubin & Roger Shuy (eds.), *Language Planning: Current Issues and Research* (Washington: Georgetown University Press, 1973), hal. 24-33.

²⁰ T.P. Gorman, “Language Allocation and Language Planning in Developing Societies” dalam Rubin & Shuy (eds.), *Language Planning: Current Issues....*”, hal. 72-82.

²¹ Anton M. Moeliono, *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa* (Seri ILDEP) (Jakarta: Djambatan, 1985).

cara: (1) ancangan garis haluan (*policy approach*) dan (2) ancangan pembinaan (*cultivation approach*). Ancangan yang pertama menangani masalah seperti pemilihan bahasa kebangsaan, pembakuan bahasa, keberaksaraan (*literacy*), tata ejaan, dan pelapisan bahasa yang beragam (repertoar variasi bahasa). Ancangan itu dapat disebut makroskopis sifatnya. Ancangan yang kedua dicirikan oleh perhatian utama pada masalah ketepatan dan keefisienan dalam pemakaian bahasa, soal langgam bahasa (*style*), dan kendala (*constraint*) dalam komunikasi. Ancangan ini dapat disebut bercakupan mikroskopis.²²

Alur kerja itulah yang menurut hemat penulis, dijadikan pedoman dalam setiap persidangan MBIM. Bahwa sejak awal didirikan MBIM berusaha untuk meminimalkan persoalan ketakpadanan dalam bahasa yang berlaku, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Ketakpadanan itu—akan dijelaskan di bab-bab berikut dari penelitian ini—misalnya tergambar dari adanya perbedaan di ranah divergensi linguistik, etnolinguistik maupun sociolinguistik kedua negara. Untuk mengatasinya, MBIM selain berupaya menghadirkan ancangan garis haluan (*policy approach*) juga ancangan pembinaan (*cultivation approach*) yang kesemuanya diarahkan untuk melancarkan agenda pemoderenan bahasa kedua negara.

1.6. Tinjauan Pustaka

Kajian perihal hubungan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia sudah banyak dilakukan oleh para akademisi. Sebagai sebuah kajian, relasi kerjasama antara kedua bangsa serumpun ini selalu menarik untuk didedah melalui berbagai perspektif mulai dari perspektif politik, sosial, budaya, ekonomi, ataupun agama. Namun dalam analisa penulis, tampak bahwa di antara kesemua perspektif bahasan tersebut, sangat jarang para peneliti menjadikan ranah kebahasaan, khususnya tentang bentuk kerjasama di bidang kebahasaan kedua negara sebagai kajian utama.

Thi Thu Huong Dang, misalnya hanya menjelaskan perihal bagaimana hubungan kedua negara ini dilihat dari aspek agama, dalam hal ini Islam. Dalam

²² Neustupny, "Basic Types of Treatment of Language Problems,.....hal. 37-40.

karyanya *A Comparative Analysis of the Strategies the New Order and UMNO Regimes in Indonesia and Malaysia adopted to deal with Islam in 1965-1998*,²³ dijelaskan tentang bagaimana strategi UMNO dan rezim Orde Baru menyelaraskan diri dengan kekuatan Islam mulai tahun 1965 hingga tahun 1998.

Dari keseluruhan isi buku, tampak bahwa Huong Dang hanya memfokuskan diri pada posisi kelompok Muslim dalam percaturan politik di kedua negara dalam rentang tahun 1965 hingga tahun 1998. Dijelaskan dalam buku tentang bagaimana posisi umat Islam di Indonesia selama masa pemerintahan Orde Baru, dan juga seperti apa UMNO memainkan perannya dalam konstalasi perpolitikan di Malaysia.

Namun dilihat dari keseluruhan bahasan karya tersebut tampak bahwa Huong Dang hanya mendedah problem yang berkisar tentang isu perkembangan Islam baik di Malaysia maupun di Indonesia. Sama sekali tidak disinggung perihal perkembangan ranah kebahasaan, khususnya terkait kerjasama bidang kebahasaan antara kedua negara pada rentang tahun yang ia teliti.

Begitupun dengan buku dari Joseph Chin Yong Liow yang berjudul *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*.²⁴ Seperti halnya karya Huong Dang, karya ini lebih difokuskan pada perspektif politik. Dalam buku ini, Liow hanya berupaya merangkum perjalanan kedua negara selama lima puluh tahun terhitung mulai tahun 1949 hingga tahun 2000, dan bagaimana kedua negara membangun relasi selama rentang tahun tersebut.

Dengan mendasarkan diri pada argumentasi bahwa relasi antara kedua negara selalu didominasi oleh rivalitas politik, jelas karya ini sangat murni sebagai kajian politik. Melihat keseluruhan isi buku, sama sekali Liow tak menyinggung kerjasama kedua negara dalam bidang kebahasaan. Demikian pula dengan karya lain yang ditulis oleh Kunaseelan Muniandy. Melalui bukunya *Hubungan*

²³ Karya ini awalnya merupakan tesis Huong Dang ketika dia menyelesaikan pendidikannya di University of Leeds tahun 2004. Karya ini dalam perkembangannya diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul *A Comparative Analysis of the Strategies the New Order and UMNO Regimes in Indonesia and Malaysia adopted to deal with Islam in 1965-1998*, pada tahun 2005 oleh penerbit Grind Verlag di Jerman.

²⁴ Joseph Chin Yong Liow, *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*, (London:Routledge Curzon, 2005).

Malaysia Indonesia 1957- 1970,²⁵ Muniandy juga turut berupaya mendedah perihal relasi dua negara serumpun ini. Namun secara keseluruhan, buku ini pun sama sekali tak menyinggung masalah kerjasama kebahasaan antara kedua negara. Beberapa hal yang disinggung dan dijadikan fokus utama hanyalah tentang pasang surut hubungan antara kedua negara sejak Malaysia merdeka hingga tahun 1970.

Maka jika menelisik beberapa kajian terdahulu, tesis ini sejatinya dihadirkan guna mengisi kekosongan kajian yang memfokuskan diri pada bahasan perihal jalinan kerjasama kebahasaan kedua negara. Jika sejauh ini politik dan agama menjadi bahasan yang umum didedah ketika mengkaji hubungan kedua negara, maka penelitian ini diarahkan untuk keluar dari *mainstream* tersebut. Melalui sebuah tema sejarah kerjasama kebahasaan Indonesia-Malaysia, penelitian ini berupaya melengkapi karya-karya terdahulu yang secara umum masih terbatas pada beberapa aspek pembahasan.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Studi

Metodologi sejarah mulai diperlukan manakala penulisan sejarah tidak lagi semata-mata bertujuan menarasikan kejadian semata, tetapi ketika telah ada upaya menerangkan sebab-sebab, kondisi lingkungan, konteks sosial-kultural sebuah kejadian dari sebuah peristiwa. Dengan bahasa lain, metodologi sejarah diperlukan ketika penulis sejarah hendak menjelaskan perihal ragam faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur lain yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji.²⁶

Dari pemahaman atas beragam komponen dan eksponen dari proses sejarah itulah penulis sejarah, dengan sebuah kerangka pemikiran yang mencakup beragam konsep dan teori, menguji dan menganalisa secara kritis rekaman peristiwa dan peninggalan masa lampau yang selanjutnya direkonstruksi secara imajinatif dalam sebuah proses penulisan sejarah.²⁷

²⁵ Kunaseelan Muniandy, *Hubungan Malaysia Indonesia 1957- 1970*, (Kuala Lumpur: Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996).

²⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1993) hal.2.

²⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notokusanto, (Jakarta: UI-Press, 1986), cet. ke-5, hal. 32.

Dalam konteks tersebut, studi ini akan didekati dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sendiri secara luas telah digunakan dalam berbagai penelitian sosial termasuk penelitian sejarah. Dalam batas tertentu, metode penelitian kualitatif berusaha melacak secara lebih jauh sebuah realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.²⁸

Dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Dengan demikian, hal yang umum dilakukan oleh seorang peneliti adalah berkuat dengan analisa tematik. Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya. Sehingga keterlibatan dan interaksi peneliti kualitatif dengan realitas yang diamatinya merupakan salah satu ciri mendasar dari metode penelitian ini.²⁹

Inilah mengapa metode penelitian kualitatif, selalu akan menekankan pada proses observasi, analisis dokumen, dan wawancara mendalam yang harus dilakukan oleh setiap peneliti demi mendapatkan sebuah pemahaman komprehensif atas sebuah peristiwa sejarah.³⁰

Secara singkat, observasi digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data serta informasi dengan pengamatan secara akurat. Bahwa sifat ilmu sejarah yang sangat empiris, membuat pengamatan atas beragam fakta sejarah menjadi penting diperhatikan. Dalam hal ini, pengamatan tersebut diarahkan pada pola hubungan antara Indonesia dan Malaysia dalam rentang akhir tahun 60-an hingga pertengahan tahun 80-an, khususnya berkaitan dengan realisasi kerjasama kebahasaan kedua negara, yang memang menjadi sasaran penelitian ini.

Sementara analisis dokumen dalam studi ini digunakan untuk membuat deskripsi singkat perihal pola kerjasama kebahasaan antar kedua negara pada tahun-tahun tersebut dengan mengacu kepada sumber-sumber dokumen yang

²⁸ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Desember 2005, hal. 57-65.

²⁹ David Jary and Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, (Glasgow: HarperCollins Publishers, 1991), hlm. 513, seperti dikutip Gumilar, "Memahami Metode Kualitatif", hal.58.

³⁰ Perihal penjelasan komprehensif atas metode kualitatif, lihat Gary King, Robert O. Keohane & Sidney Verba, *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*, (New Jersey: Princeton University Press, 1994).

dimiliki oleh pihak Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, dan beberapa sumber-sumber dokumen lain yang mendukung studi. Sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi dari pelaku sejarah yang terlibat dalam program kerjasama kebahasaan (MBIM) antara Indonesia dan Malaysia, serta beberapa pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

1.7.2 Sumber Data

Penelitian ini mendasarkan pada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata-kepala sendiri atau dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis, pendeknya orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Dengan demikian sumber primer dapat berupa catatan yang dibuat pada zamannya dengan bentuk tulisan, isi, dan bahan yang sezaman.

Sedangkan sumber sekunder merupakan kesaksian dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahnya. Atau dengan kata lain sumber sekunder merupakan sebuah sumber yang berbentuk catatan tertulis dan bahannya tidak sezaman atau di tulis jauh setelah sebuah peristiwa sejarah terjadi.³¹ Keduanya didapat, baik dari sumber tertulis maupun sumber lisan. Sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan pemerintah maupun dokumen-dokumen hasil persidangan MBIM yang dikumpulkan disimpan oleh lembaga pemerintah, perpustakaan, maupun perorangan.

Untuk laporan pemerintah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Ejaan Yang Disempurnakan dalam Sidang Kabinet, 1 Agustus 1972* serta *Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Ejaan Yang Disempurnakan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1972). Sementara terkait dokumen hasil persidangan, penulis menggunakan dokumen-dokumen yang umumnya telah dibukukan seperti misalnya, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), *Sosok Pokok Tokoh MABBIM, Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan*, (Jakarta: Pusat Bahasa

³¹ Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hal. 35.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993). Guna mendukung laporan pemerintah dan dokumen-dokumen hasil persidangan MBIM, penulis juga menggunakan sumber tertulis berupa surat kabar sejaman yang memberikan gambaran umum situasi yang terjadi untuk kemudian digali secara lebih mendalam beragam masalah yang ada dilapangan.

Sedangkan untuk lebih memperkuat keterangan, sumber tertulis berupa laporan pemerintah dan dokumen-dokumen hasil persidangan tersebut akan dikombinasikan dengan sumber lisan yang didapat melalui pendekatan sejarah lisan (*oral history*) yaitu dengan melakukan wawancara para pelaku sejarah yang sejaman dan masih hidup sekarang ini. Dalam hal ini sumber lisan, menurut hemat penulis, sangat diperlukan dalam mengungkap *setting* awal berlangsungnya kerjasama kebahasaan antara Indonesia dan Malaysia.

Penggunaan sumber lisan, selain untuk melengkapi sumber tertulis yang telah ada, juga dalam rangka verifikasi data serta mencari data-data baru yang mungkin belum dituliskan. Adapun para pelaku sejarah tersebut antara lain adalah mereka yang terlibat langsung dan menjadi perwakilan dalam kerjasama MBIM antara tahun 1972 hingga tahun 1985. Dalam hal ini mereka yang menjadi narasumber penulis, diantaranya: Anton Meoliono, Mien A Rifai, Harimurti Kridalaksana, Liek Wilardjo, Djoko Kentjono dan Sri Sukesi Adimimarta. Selain beberapa nama tersebut penulis juga mewawancarai beberapa ahli bahasa yang bergabung belakangan ketika kerjasama ini telah berubah nama menjadi MABBIM, seperti Soegiono dan Meity Taqdir Qodratillah.

1.7.3 Metode Penelitian

Bagian ini merupakan penjelasan penulis terkait langkah-langkah dalam penelitian lapangan hingga pada tahap penulisan. Termasuk yang juga akan dibahas dibagian ini adalah beragam permasalahan yang penulis temui dalam proses penelitian secara keseluruhan.

Terkait proses penelitian sejarah, menurut Gottschalk, menulis sejarah mengenai suatu tempat, periode, peristiwa, lembaga atau orang, bertumpu pada empat kegiatan pokok: (1) pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang relevan; (2) menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik (dengan menguji

bahan-bahan atau sumber-sumber tersebut); (3) menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang otentik tersebut; dan (4) menyusun kesaksian yang dapat dipercaya tersebut menjadi suatu cerita.³²

Dengan kerangka kerja tersebut maka penelitian ini akan dimulai dengan tahap heuristik. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan sumber-sumber, baik sumber primer maupun sekunder, yang berhubungan dengan topik seputar kerjasama kebahasaan Indonesia-Malaysia sejak tahun 1966 hingga tahun 1985. Tahap heuristik ini telah penulis mulai sejak bulan Februari 2011. Saat itu penulis berkonsultasi dengan (Alm.) Anton Moeliono dan melakukan “bimbingan” yang cukup intensif di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Dari serangkaian pertemuan tersebut penulis sadar bahwa penelitian ini akan menemui banyak hambatan.

Dari segi arsip atau dokumen kerjasama penulis tidak begitu sulit menemukan kesulitan karena hasil-hasil persidangan MBIM sedari awal hingga sidang terakhir semua telah dibukukan dan tersimpan rapih di perpustakaan Pusat Bahasa, Jakarta. Namun hambatan segera muncul ketika penulis hendak mencari sumber pendukung, khususnya yang berasal dari wawancara langsung dengan para narasumber yang terlibat dalam MBIM. Sebagian besar tokoh yang merupakan aktor utama kerjasama pada kenyataannya sudah tiada, dan jikapun tokoh tersebut masih ada, penulis segera menemukan hambatan lain, utamanya terkait umur beberapa narasumber yang sudah tidak muda lagi dan mulai sulit mengingat apa yang terjadi 38 tahun yang lalu. Namun hal ini hanya berlaku di beberapa narasumber bukan kesemua tokoh yang berhasil penulis temui. Di atas semuanya, penulis berhasil mengumpulkan sumber-sumber utama yang penulis butuhkan sebagai bahan utama penelitian ini.

Setelah pengumpulan sumber, tahap selanjutnya adalah verifikasi. Pada tahap ini peneliti memilah data-data yang otentik dan yang tidak. Data-data yang telah diperoleh kemudian diverifikasi untuk memperoleh akurasi dan kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini, salah satu langkah yang penting adalah membandingkan data tertulis, khususnya dokumen hasil persidangan MBIM, dengan kesaksian hasil wawancara. Pada tahap ini

³² Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hal. 18.

kesulitan yang penulis hadapi adalah bahwa banyak kesaksian dari narasumber yang kurang mendukung sumber dokumen. Sebabnya seperti dijelaskan sebelumnya, beberapa narasumber terkadang sudah mulai sulit mengingat pernak-pernik peristiwa yang telah mereka lewati puluhan tahun yang lalu. Dan inilah yang membuat penulis begitu sangat berhati-hati dalam proses verifikasi data temuan.

Untuk langkah berikutnya, setelah fakta-fakta yang dikaji dikumpulkan dan diverifikasi, adalah tahap interpretasi. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan dan mengklasifikasikan fakta-fakta yang terkait untuk selanjutnya dianalisa dan diinterpretasi. Sebagai penelitian sejarah yang menggunakan pendekatan sejarah sosial, maka dalam tahap interpretasi ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini tidak hanya berupaya memberi gambaran segi prosesus, urutan kejadian, dan perkembangan peristiwa, tetapi juga berupaya menjelaskan struktur peristiwa, ciri, unsur, faktor-faktor kausal dan kondisionalnya. Dengan pendekatan analitis ini, diharapkan dapat mengungkapkan pelbagai aspek atau dimensi gejala sejarah baik secara makro maupun secara mikro.³³

Sebagai langkah terakhir adalah tahap penulisan sejarah (historiografi). Pada tahap ini penulis berupaya mensintesis sumber-sumber dan data-data yang telah diperoleh dalam rangka merekonstruksi masa lampau untuk kemudian dianalisa dalam suatu tulisan sejarah yang sistematis dan logis dengan didasarkan pada penggunaan bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dalam 6 bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah; identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah; tujuan penelitian; tinjauan pustaka; kerangka teoritis; metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Melalui pendahuluan yang memuat tinjauan umum penelitian ini, penulis berharap agar pokok utama dan arah tujuan dari penelitian ini dapat dipahami dengan jelas.

³³ Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial*, hal. 110-111.

Pada bab kedua penulis akan mengkaji terlebih dulu perihal *setting* sosial, politik dan ekonomi Indonesia dan Malaysia pada akhir tahun 60-an, khususnya setelah berakhirnya era konfrontasi hingga dekade awal tahun 80-an. Pada bab ini pula penulis akan sedikit menjelaskan beragam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara sejak konfrontasi berakhir.

Adapun bab ketiga akan memaparkan perihal kerjasama kebahasaan (MBIM) yang dilakukan oleh kedua negara mulai dari sejarah pendirian, kronologi pembentukan, struktur kelembagaan dan cara kerja. Bab keempat akan menjelaskan perihal dinamika perkembangan MBIM, hasil sidang MBIM dalam bidang peristilahan serta beberapa catatan penting dari mereka yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Pada bab kelima penulis akan menganalisa ragam kondisi pasca terjadinya kerjasama kebahasaan tersebut. Seperti apa dampak kerjasama tersebut bagi kedua negara, dan perubahan apa yang terjadi di masing-masing negara setelah diadakannya program kerjasama kebahasaan tersebut. Sedangkan bab keenam yang merupakan penutup dari studi ini, terdiri dari kesimpulan yang berupaya menguraikan inti persoalan yang menjadi fokus utama penelitian ini.

BAB II

INDONESIA-MALAYSIA PASCA KONFRONTASI

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada sejarah kerjasama kebahasaan antar Indonesia-Malaysia—terwujud dalam bentuk Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM)—pasca konfrontasi hingga tahun 1985 ketika kerjasama ini berubah nama menjadi Majelis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MABBIM) seiring keikutsertaan Brunei Darussalam sebagai anggota kerjasama.

Namun sebelum mendedah lebih jauh kerjasama kebahasaan tersebut penting kiranya melihat terlebih dahulu *setting* sosial politik dan ekonomi Indonesia dan Malaysia pasca konfrontasi hingga awal tahun 1980-an. Sebabnya karena sebagai bentuk kerjasama, perjalanan MBIM—seperti halnya beberapa kerjasama di bidang lain—turut dipengaruhi oleh *setting* sosial politik dan ekonomi masing-masing negara. Ketika kedua negara sedang berada pada situasi bersitegang misalnya, akan tampak betapa urusan politik negara—yang seharusnya berada di luar urusan MBIM—nyatanya cukup mempengaruhi jalannya forum persidangan. Inilah mengapa bab ini penting dimunculkan di awal.

Termasuk yang juga akan dijelaskan pada bab ini adalah serangkaian kerjasama yang dilakukan kedua negara pasca konfrontasi. Dengan memaparkan beberapa kerjasama tersebut diharapkan akan terlihat peta umum hubungan kedua negara yang tidak hanya menjelaskan dari kerjasama kebahasaan tapi juga dari kerjasama lain di beberapa bidang. Tentang ini penulis melihat bahwa dalam beberapa hal serangkaian kerjasama yang akan dibahas pada bab ini turut memberikan ragam dampak yang memungkinkan kerjasama semacam MBIM dapat berjalan dengan lancar. Belum lagi MBIM seperti halnya kerjasama lain juga berdiri pada satu misi yang sama, menciptakan harmonisasi antar kedua negara pasca konfrontasi.

2.1. Setelah Konfrontasi Berakhir: Indonesia 1966-1985

Kemunculan sistem pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Suharto tahun 1966 menjadi titik awal bagi berakhirnya era konfrontasi, sebuah babak

terpahit bagi jalinan relasi antara Indonesia dan Malaysia. Era ini oleh banyak kalangan dipandang sebagai rentang masa terburuk yang harus dihadapi oleh kedua negara. Karena selain menghancurkan rasa saling percaya antara kedua negara, konfrontasi juga dengan sangat baik berhasil menceraiberaikan kedigdayaan solidaritas rumpun Melayu yang telah mengakar dalam spektrum kehidupan kedua negara.

Kehadiran pemerintahan baru di bawah komando Suharto menjadi sangat penting dalam upaya meredam gejolak konfrontasi. Meski berkuasa sejak 1966, namun secara resmi Soeharto baru menjabat sebagai presiden setelah sidang umum MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada bulan Maret 1968.¹ Berdiri di atas puing-puing kehancuran rezim lama di bawah kepemimpinan Sukarno, kekuasaan Soeharto pada masa awal ditandai oleh upaya menata ulang struktur politik Indonesia.

Sebagai akibat krisis ekonomi² dan krisis politik yang diwariskan rezim sebelumnya serta melihat berbagai tantangan yang bersumber pada sisa-sisa pendukung Soekarno dan gerakan komunis, perhatian utama Suharto selaku pemimpin negara diarahkan untuk menciptakan mekanisme yang dapat meminimalkan ragam konflik sosial dan pada saat yang sama memaksimalkan produktivitas ekonomi. Atau, bagaimana menyusun kembali sistem politik menjadi politik yang “tertib”.³

Untuk tujuan tersebut, Suharto dengan dibantu oleh berbagai tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing menciptakan suatu format politik yang memberikan penekanan pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dilihat sebagai dua sisi dari mata uang yang sama, karena tanpa stabilitas politik

¹ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terj. Satrio Wahono, dkk, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal. 579.

² Krisis ekonomi tersebut tampak ketika pada tahun 1965, inflasi Indonesia mencapai 500 persen dan harga beras naik hingga 900 persen. Bahkan defisit anggaran belanja tahun itu mencapai 300 persen dari pemasukan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah Sukarno terhadap pembangunan ekonomi serta keterlibatannya dalam berbagai aktivitas luar negeri, seperti konfrontasi dengan Malaysia. Lihat Tim Kompas, *Warisan (daripada) Soeharto* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008) hal.85.

³ Mohtar Mas'oeed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 23.

pembangunan ekonomi tidak akan dapat dijalankan, sedangkan tanpa adanya pembangunan ekonomi, stabilitas akan sulit dicapai.⁴

Dengan dasar itu, Suharto selanjutnya menerapkan suatu format politik yang memusatkan kekuasaan pada lembaga eksekutif. Hal ini dilakukan untuk mengatasi situasi krisis setelah pecahnya G 30S/PKI yang hampir melumpuhkan sistem pemerintahan dan membawa Indonesia ke ambang perpecahan dan konflik berdarah. Maka, dua tujuan pemerintah yang segera dilancarkan adalah pertumbuhan ekonomi dan penciptaan ketertiban atau stabilitas politik. Untuk mencapai tujuan tersebut, para elite pemerintah di bawah komando Suharto memandang bahwa menciptakan suatu sistem ekonomi yang berorientasi ke luar dan suatu politik teknokratik yang tertib merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Untuk mencapainya, *pertama*, pemerintah harus menerapkan kebijaksanaan ekonomi yang mendukung pertumbuhan negara yang signifikan. *Kedua*, pemerintah harus memelihara suatu sistem politik yang terkendali secara ketat dan tertib.”⁵

Demi membina suatu sistem politik yang tertib untuk mendukung program ekonomi tersebut, pemerintah mendasari semua usahanya itu dengan doktrin-doktrin baru menggantikan doktrin dan slogan lama, “politik sebagai panglima” yang digantikan slogan baru, “ekonomi sebagai panglima”. Slogan baru ini didukung oleh ideologi baru berwujud “modernisasi” yang sepenuhnya diarahkan untuk menciptakan pembangun nasional dengan disokong oleh pengembangan doktrin Dwi-Fungsi ABRI.

Ideologi modernisme adalah ideologi teknokratik yang menekankan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, harmoni, dan konsensus sebagai prasyarat terpenting pembangunan ekonomi. Sementara Dwi-Fungsi ABRI adalah suatu doktrin yang mengesahkan peranan militer dalam urusan-urusan nonmiliter, seperti kegiatan politik dan ekonomi.⁶ Modernisasi yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang dimotori kaum intelektual lulusan Amerika, seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Subroto, Mohammad Sadli, dan

⁴ Dewi Fortuna Anwar, “Format Politik Orde Baru dan Agenda Pengembangan Demokrasi Politik”, dalam, Syarofin Arba (Ed.), *Demitologisasi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme dalam Orde Baru*, (Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO, 1998), hal. 3-4.

⁵ Anwar, “*Format Politik Orde Baru*,... hal. 148-149.

⁶ Mas’oed, *Ekonomi dan Struktur Politik*,... hal. 24.

Sumarlin—kesemunya berorientasi pembaruan dan antikomunis—yang mengajukan suatu jenis politik baru yang bisa mendukung pembangunan ekonomi, yang bebas dari konflik ideologis serta didasarkan atas pragmatisme, rasionalisme, ketertiban, dan keahlian praktis.⁷

Melalui konsep modernisasi ini pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama pemerintah yang mensyaratkan pembuatan kebijaksanaan pemerintahan secara rasional, efisien, efektif, dan pragmatis. Untuk merealisasikan agenda pembangunan ekonomi tersebut, pemerintah berupaya memperkuat dukungan dari segenap unsur masyarakat, utamanya kelompok militer dan kelompok borjuasi. Prioritas yang ditekankan adalah pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jalan tersebut terbuka lebar setelah kekuatan komunis hancur lebur pada tahun 1966.

Sejak itu fokus pemerintah dibawah kepemimpinan Suharto adalah membangun perekonomian negara. Salah satu agenda yang kemudian ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah adalah pembayaran hutang luar negeri. Agenda ini mendesak dilancarkan mengingat pemerintahan Sukarno telah menciptakan hutang luar negeri yang berjumlah \$ 2.358 juta. Hampir 42 persen kepada Uni Soviet, 10 persen kepada Jepang dan 7,5 persen kepada Amerika Serikat. Pembayaran hutang tersebut dijadwalkan selama tujuh tahun mulai 1966.⁸

Dengan niat baik yang ditunjukkan oleh pemerintah baru di bawah kepemimpinan Suharto, negara-negara Barat semisal Amerika Serikat dan Jepang pada gilirannya tak segan untuk memberikan pinjaman hutang yang pada akhirnya semakin memantapkan kondisi Indonesia. Inflasi mulai dapat dijinakkan, modal asing berangsur masuk, dan industrialisasi segera dilancarkan. Sejak saat itu, mulailah pemerintah merancang strategi perekonomiannya dengan penuh keyakinan.

⁷ Gagasan ini utamanya dipengaruhi tiga pemikir politik tahun 1960-an: Seymour M. Lipset, Daniel Bell, dan Samuel Huntington, melalui karya-karya masing seperti: Seymour M. Lipset, *Political Man: The Social Bases of Politics* (New York: Anchor, 1963), Daniel Bell, *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties* (New York: Free Press, 1960), Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968).

⁸ *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (BIES), Juni 1966, hal 5, seperti dikutip Mas' oed, *Ekonomi dan Struktur Politik*,... hal. 49.

Sementara itu dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas nasional, pemerintah mengambil langkah-langkah serius, yaitu *pertama*, menciptakan politik yang bebas dari konflik ideologis dan berdasarkan azas ketertiban dan kesepakatan (konsensus). *Kedua*, membatasi partisipasi politik yang pluralistik. Partisipasi rakyat harus diarahkan terutama pada penerapan program pembangunan yang dirancang elit politik. Sementara untuk mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban kepentingan politik dan ideologi partai, mereka harus dibebaskan dari politik kepartaian, sedangkan partai-partai politik tidak boleh aktif di daerah pedesaan kecuali selama kampanye pemilihan umum sekali dalam lima tahun.⁹

Secara lebih kongkrit pada periode pertama kepemimpinannya terutama sejak 1967-1970, Soeharto tampak lebih memprioritaskan kebijakannya pada agenda sentralisasi dan militerisasi. Upaya ini ditunjukkan dengan perombakan besar-besaran angkatan bersenjata dengan menempatkan para panglima daerah di bawah komando angkatan darat pusat sambil melenyapkan persaingan antar angkatan, serta pengangkatan perwira militer sebagai gubernur, walikota, dan bupati.¹⁰ Pada bulan Agustus 1967 misalnya, Soeharto menghapuskan empat kementerian angkatan bersenjata yang terpisah dan memegang langsung kekuasaan atas empat angkatan tersebut.¹¹

Kebijakan yang sentralistik itu diikuti dengan militerisasi pemerintahan daerah. Pada tahun 1968 tercatat bahwa 17 dari 25 propinsi diperintah perwira militer. Bahkan pada tahun 1970 20 dari 26 gubernur Indonesia diambil dari kalangan militer, dan 13 dari 20 gubernur itu diangkat lagi untuk masa jabatan lima tahun kedua. Pada tahun itu sekitar 60 persen dari semua bupati dan walikota juga diambil dari kalangan angkatan bersenjata.¹² Pada akhirnya sentralisme pemerintah tersebut kemudian dilegalisasikan melalui Undang-undang No. 5

⁹ Hakim, "The Partai Persatuan Pembangunan,... hal. 149.

¹⁰ Michael Malley, "Daerah: Sentralisasi dan Perlawanan," dalam Donald K. Emmerson (Ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), hal. 130.

¹¹ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*,... hal.579.

¹² Malley, "Daerah: Sentralisasi dan Perlawanan,... hal. 132.

tahun 1974, yang akan berlaku selama berkuasanya pemerintah baru di bawah pimpinan Suharto.¹³

Tentunya, prioritas utama pemerintah dalam upaya sentralisasi kekuasaannya adalah memperkuat pemerintahan sipil, yakni dengan depolitisasi birokrasi. Pada bulan Februari 1970 pemerintah mengumumkan bahwa semua pegawai pemerintah harus memiliki “monoloyalitas” (kepatuhan tunggal) kepada pemerintah.¹⁴ Mereka tidak diizinkan bergabung dengan partai politik lain kecuali Partai Golkar (Golongan Karya).

Hasilnya, pada pemilihan umum Juli 1971 yang diadakan pertama kali di masa Soeharto, Golkar memperoleh 62,8% suara, memenangkan 227 (65,6%) dari 351 kursi yang diperebutkan. Angka ini jauh di atas NU yang meraih 18,6% (58 kursi) suara, Parmusi 9,3% (24 kursi), dan PNI yang hanya memperoleh 6,9% (20 kursi) suara.¹⁵ Sebagaimana sudah bisa diduga, pada bulan Maret 1973 MPR yang baru terbentuk memilih Soeharto sebagai presiden untuk kedua kalinya.

Meski Golkar meraih suara tertinggi, pemerintah tidak melihat kemenangan pemilihan umum ini sebagai tanda bahwa kekuasaan politik Indonesia sudah stabil dan terkendalikan. Pemerintah kemudian mendesak partai-partai untuk meleburkan diri ke dalam dua partai. Pada bulan Januari 1973 PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dibentuk dari partai-partai Islam, terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Dari partai-partai non-Islam (Murba, PNI, Partai Katolik, Parkindo, dan IPKI) dibentuk PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Sejak itu Indonesia memiliki sistem tiga partai: Golkar, PPP, dan PDI.¹⁶

Tak cukup hanya penyederhanaan sistem kepartaian yang dilakukan pemerintah dalam menata kehidupan politik untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan, tetapi juga menerapkan strategi *floating mass* (massa

¹³ Undang-undang itu menetapkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, prosedur untuk memilih eksekutif daerah, dan sifat otonomi daerah. Secara substansial, undang-undang tersebut merupakan penolakan langsung dari jiwa desentralisasi dan demokratisasi (Undang-undang No. 1 tahun 1957), serta otonomi seluas-luasnya (Tap MPRS No. XXI/MPRS/1966, 5 Juli 1966). Penjelasan lebih lanjut mengenai pelembagaan kekuasaan pemerintah ini dapat dilihat dalam Malley, “Daerah: Sentralisasi dan Perlawanan,” dalam Emmerson, *Indonesia Beyond Soeharto*,... hal. 133-140.

¹⁴ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*,... hal. 584.

¹⁵ Mas’oed, *Ekonomi dan Struktur Politik*,... hal. 165. Lihat pula Masashi Nishihara, *Golkar and the Indonesian Elections of 1971*, Monograph Series, Modern Indonesia Project, (Ithaca: Cornell University Press, 1972).

¹⁶ Mas’oed, *Ekonomi dan Struktur Politik*,... hal. 174.

mengambang), yang memisahkan rakyat dari perhatian politik dan kepartaian, atau depolitisasi massa. Ini dimungkinkan karena sejak tahun 1973 partai-partai politik tidak boleh memiliki cabang-cabang di bawah tingkat kabupaten kecuali pada masa kampanye pemilihan umum. Keterbatasan yang tidak dialami Golkar karena organisasi ini sudah memiliki jaringan kuat dalam birokrasi dan yang disamarkan seolah-olah bukan partai politik. Mulai saat itu hingga selanjutnya, partai-partai politik bukan lagi merupakan tantangan serius bagi pemerintah.¹⁷

Memasuki awal tahun 1976 Indonesia telah mencapai kestabilan politik. Pemerintah bergantung pada sentralisasi kekuasaan di tangan Soeharto. Kebebasan berpolitik ditekan dengan kekerasan fisik, penahanan, dan pelarangan penerbitan, atau dengan beragam ancaman yang menakutkan. Partai-partai politik tidak diberi peluang untuk mengubah tatanan politik, tetapi tetap mengikuti proses pemilihan umum yang dikendalikan oleh pemerintah. Sementara militer mulai menjadi kekuatan utama yang turut mengambil keputusan ekonomi bersama-sama para teknokrat, dan mengurus administrasi negara bersama dengan birokrasi. Adapun Golkar dijadikan kendaraan bagi dominasi militer dan birokrasi tersebut.

Pada perkembangannya, beberapa langkah yang dilancarkan oleh pemerintah nyatanya mendapatkan penolakan yang tidak kecil. Hal itu terjadi karena di satu sisi, beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam beberapa hal sangat membantu proses pembangunan serta restrukturisasi negara. Namun di sisi lain, beberapa langkah tersebut pada gilirannya membawa dampak yang oleh masyarakat dirasa justru sangat membelenggu hak asasi mereka. Bahwa orientasi pemerintah yang berupaya memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi yang diukur sebagai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, nyatanya melupakan dimensi kebebasan politik dan hak azazi manusia yang sejatinya harus dinikmati oleh segenap masyarakat.

Sebagai contoh, doktrin “masa mengambang” yang diperkenalkan pada 1971, dalam banyak kasus, kebijakan ini jelas menyebabkan masyarakat merasakan terjadinya penindasan terhadap aktivitas politik mereka. Hal itu terjadi karena menurut prinsip dalam doktrin tersebut, aktivitas politik pada tingkat masyarakat dilarang. Penduduk harus menjadi “masa mengambang” yang

¹⁷ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*,... hal. 586.

berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi dan tidak boleh ambil bagian dalam politik. Bahkan kala itu, pemerintah menerapkan semboyan, “*politik no, pembangunan yes*” yang jelas sangat membelenggu kebebasan politik masyarakat secara umum.¹⁸

Namun demikian dengan mengacu kepada tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah, juga syarat-syarat yang mesti ditempuhnya, setidaknya ada beberapa pilar penting yang menopang kekuasaan pemerintah di bawah pimpinan Suharto, sebagai upaya penataan ulang struktur politik Indonesia. Pilar-pilar itu adalah: (1) birokrasi sipil yang terkendali, (2) angkatan bersenjata yang terpadu, (3) lembaga perwakilan yang lebih tanggap terhadap eksekutif, (4) politik kepartaian yang disederhanakan, dan (5) kantor kepresidenan sebagai inti.¹⁹ Kelima pilar ini sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kekuasaan pemerintah yang kuat, efektif, dan sentralistik, sehingga stabilitas politik dapat terwujud.

Untuk merealisasikan maksud tersebut, pemerintah menggagas trilogi pembangunan yang secara umum dicanangkan guna memperkuat dimensi stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Langkah-langkah yang diambil pemerintah sehubungan dengan kebijaksanaan umum yang terangkum dalam trilogi pembangunan ini mulai segera nampak ketika pemerintah memunculkan rencana pembangunan nasional—dalam perkembangannya dikenal sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)—yang mulai pertama kali dihadirkan pada 1 April 1969. Program inilah yang alhasil menjadi titik awal pemerintah dalam upayanya merealisasikan program pembangunan nasional secara bertahap.²⁰

Memasuki akhir dekade tahun 70-an, Indonesia memasuki tahap yang oleh Ricklefs disebut sebagai masa keemasan.²¹ Masa ini berlangsung sekitar dua belas tahun antara 1976-88. Pada tahun-tahun tersebut, rencana pembangunan ekonomi

¹⁸ Anders Uhlin, *Oposisi Berserak Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, (terj), (Bandung: Mizan, 1998), hal. 58.

¹⁹ Uhlin, *Oposisi Berserak*,... hal. 150-175.

²⁰ Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan*... hal. 106.

²¹ Menurut Ricklefs, rentang panjang kekuasaan pemerintah di bawah kepemimpinan Suharto dapat dibagi ke dalam tiga tahap perkembangan: 1965-75 sebagai tahap penciptaan, 1976-88 sebagai masa keemasan, dan 1989-98 sebagai masa tantangan, krisis, dan keruntuhan. Lihat M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terj. Satrio Wahono, dkk, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal.593.

Indonesia disokong oleh melonjaknya harga minyak bumi di pasar dunia pada tahun 1970-an. Sebagai salah satu negara pengekspor minyak bumi yang cukup besar, Indonesia jelas memperoleh dampak dari kenaikan harga minyak tersebut. Fakta inilah yang menyebabkan lonjakan pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi tinggi. Bahkan antara 1968 sampai 1981 ekonomi Indonesia tercatat tumbuh lebih dari 7 persen, prestasi yang berhasil merupakan rekor dan tak ada presedennya dalam sejarah modern Indonesia.²²

Pengurangan kemiskinan yang cukup berarti dicapai pada permulaan tahun 1978. Sektor padi memberi sumbangan yang paling berarti dalam pengurangan kemiskinan. Secara keseluruhan, selama periode 1976-1984 persentase penduduk miskin menurun sampai mendekati 50%, dan sejumlah kaum miskin absolut di Indonesia berkurang sampai 20 juta orang.²³

Bersamaan dengan tercapainya kestabilan ekonomi, Indonesia juga berhasil menstabilkan kehidupan politiknya. Beberapa agenda Pemilu, seperti Pemilu tahun 1977, berhasil dilaksanakan tanpa adanya konflik.²⁴ Dengan latar belakang itulah, pada tahun 1978 MPR kembali memilih Soeharto sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Setelah itu, untuk lebih mendorong keseragaman ideologis, pada tahun 1978 pemerintah memulai satu program indoktrinasi wajib mengenai ideologi Pancasila bagi semua warga negara.

Tokoh utama yang merancang program ini adalah Roeslan Abdulgani, mantan Wakil Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1966-1967, yang sebelumnya merupakan seorang pendukung aktif ideologi Demokrasi Terpimpin Soekarno. Kursus penataran bernama P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dilakukan di departemen-departemen pemerintahan, tempat-tempat

²² Dalam beberapa penelitian, hal ini tak berubah pada dekade awal tahun 80-an. Tahun 1980 misalnya, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh mencapai angka 9,6 persen. Sementara itu, selama lima tahun hingga 1982, produksi beras meningkat 36%. Hasil panen yang luar biasa besar menyusul pada periode 1983-85. Ketika itu hasil total padi meningkat sampai 49%. Inilah mengapa pada tahun 1985, pemerintah menyatakan Indonesia berswasembada beras. Tentang ini lihat Anne Booth, "Pembangunan: Keberhasilan dan Kekurangan," dalam Emmerson (ed), *Indonesia Beyond Soeharto*, hal. 191-194. Lihat juga, T. Mulya Lubis, dkk., *Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1981*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hal. 20.

²³ Russell J. Cheetam dan R. Kyle Peters Jr., "Pengurangan Kemiskinan Selama Pemerintahan Orde Baru," dalam Frans Husken, dkk. (eds), *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial: Indonesia Di Bawah Orde Baru*, (Jakarta: Grasindo, 1997), hal. 23-24.

²⁴ Pada Pemilu 1977 Golkar mendominasi perolehan suara dengan angka mencapai 62,1% suara, disusul PPP yang mendapatkan 29,3%, dan PDI yang mendapat 8,6% suara. Lihat Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, hal. 595.

kerja, sekolah, dan tempat-tempat lainnya. Upaya ini dibantu oleh militer yang dari tahun 1980 melakukan indoktrinasi Pancasila di desa-desa melalui kebijakan bernama ABRI Masuk Desa. Program ini juga bertujuan untuk mendorong pembangunan, mempertahankan posisi sentral ABRI, dan untuk mendapatkan dukungan rakyat terhadap militer.²⁵

Lebih jauh, untuk mencegah meningkatnya kelompok Islam menjadi gerakan politik yang berbahaya, pada tahun 1983 pemerintah berusaha mewujudkan keseragaman ideologis di seluruh sektor, dengan keputusan bahwa semua organisasi harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ini secara langsung dan sengaja, mengharuskan organisasi-organisasi Islam untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya dasar.²⁶

Pada bulan Desember 1983 rapat nasional NU memutuskan bahwa NU harus menarik diri dari PPP, meninggalkan total partai politik dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal.²⁷ PPP menerima Pancasila sebagai asas tunggalnya pada 22 Agustus 1984.²⁸ Sedangkan Muhammadiyah menerima Pancasila dalam kongres 1985.²⁹ Namun kebijakan asas tunggal Pancasila justru membuat sikap antipemerintah dari kelompok Islam semakin menguat. Pada tanggal 12 September 1984 terjadi insiden di Tanjung Priok, daerah pelabuhan di Jakarta. Karena insiden ini, pamflet antipemerintah dan seruan untuk membela Islam tersebar luas. Detail insiden ini memang tetap kabur, tapi yang pasti ada sebuah demonstrasi massa kalangan masjid yang mengumandangkan slogan-slogan antipemerintah dan anticukong (“cukong” berasal dari bahasa Hokkian yang artinya “bos” dan “kakek”), menolak Pancasila sebagai asas tunggal, dan menuduh prajurit ABRI telah mengotori masjid. Setidaknya 28 orang, bahkan mungkin lebih dari seratus, terbunuh dalam demonstrasi tersebut.³⁰

²⁵ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*,... hal. 604-605.

²⁶ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*,... hal. 606-611.

²⁷ HM. Shaleh Harun dan Abdul Munir Mulkhan, *Latar Belakang Ummat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal: Sebuah Kajian Informatif Pandangan NU-Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Aquarius, 1986), hal. 181.

²⁸ Subagyo Pr, *Rekaman Peristiwa '84*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan), 1985, hal. 242.

²⁹ Lukman Harun, *Muhammadiyah Dan Asas Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), hal. 61, Harun dan Mulkhan, *Latar Belakang Ummat Islam*,...hal. 215.

³⁰ Subagyo Pr, *Rekaman Peristiwa '84*,...hal. 244. Lihat pula Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*,... hal. 615-616.

Di tahun yang sama, tepatnya 4 Oktober 1984, aksi pengeboman terjadi di Jakarta. Bank Central Asia (BCA) milik Liem Sioe Liong menjadi sasaran utama dari tiga ledakan yang menggemparkan ibu kota tersebut.³¹ Tak hanya di Jakarta, aksi pengeboman juga terjadi di luar Jakarta. Tepatnya bulan Januari 1985 Candi Borobudur di Jawa Tengah dibom oleh sekelompok aktivis Jihad yang dimotori oleh Mohamad Jawad. Dalam kerjanya ia dibantu oleh dua bersaudara Abdul Kadir bin Ali Alhabsyi dan Husein bin Ali Alhabshy yang selanjutnya menjadi pelaku utama pengeboman sehingga akhirnya harus rela dihukum penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Adapun alasan mereka melakukan aksi pengeboman tersebut adalah sebagai aksi balasan atas terjadinya insiden di Tanjung Priok, 12 September 1984, yang telah menewaskan puluhan nyawa umat Islam.³²

Maka apa yang ditunjukkan oleh fakta-fakta yang terjadi sepanjang akhir tahun 1960an hingga pertengahan tahun 1980an ini adalah bahwa karakteristik sistem politik pemerintah di bawah kepemimpinan Suharto jelas bersifat otoriter. Mas'ood berhasil menjelaskan sifat otoriterisme tersebut melalui kerangka otoriterisme-birokratik dan korporatis-negara yang dicirikan dalam karakteristik berikut: (1) pemerintahan dipimpin oleh militer sebagai suatu lembaga bekerja sama dengan para teknokrat sipil, (2) perusahaan besar yang mempunyai hubungan khusus dengan negara dan kapitalis internasional mendominasi perekonomian Indonesia, (3) pembuatan kebijakan yang teknokratik-birokratik, (4) massa didemobilisasikan, (5) tindakan-tindakan represif untuk mengendalikan oposisi, dan (6) kantor kepresidenan yang otonom. Otoriterisme ini muncul, di samping akibat krisis politik dan ekonomi yang diwariskan oleh rezim sebelumnya, adalah sebab kuatnya dominasi eksekutif dan pengaruh kuat militer dalam politik dan ekonomi, serta lemahnya lembaga legislatif dan yudikatif.³³

³¹ Subagyo Pr, *Rekaman Peristiwa '84*,...hal. 211.

³² Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*,... hal. 616. Lihat pula, "Sembilan Stupa Borobudur Diledakkan Senin Dini Hari", *Kompas*, 22 Januari 1985, "Bom Borobudur, 16 Tahun Kemudian", dikutip dari *Tempo Online*, 17 Mei 1999. Diakses pada 12 Maret 2012, dari <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/05/17/INT/mbm.19990517.INT94985.id.html>.

³³ Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik*,... hal. 198-207.

2.2. Malaysia Selepas Konfrontasi

Tidak hanya bagi Indonesia, gejala konfrontasi juga turut membawa dampak bagi Malaysia yang saat itu masih berada dalam tahap awal pembentukan negara. Dalam masa yang penuh pergolakan tersebut beberapa tantangan harus dihadapi. Selain masalah Filipina yang berupaya mengklaim Sabah sebagai wilayah kekuasaannya berdasarkan penyerahan bagian timur dan utara wilayah Kesultanan Brunei kepada Kesultanan Sulu pada 1704,³⁴ Malaysia juga harus menghadapi fakta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia pada 9 Agustus 1965. Penyebab perpisahan ini bagi pihak Singapura lebih disebabkan oleh karena inkonsistensi Malaysia ketika negara ini tidak benar-benar mematuhi Perjanjian Pembentukan Malaysia. Sementara bagi pihak Malaysia, faktor perbedaan prinsip— termasuk dalam hal kebijakan—yang sudah muncul sejak Malaysia terbentuk sebagai negara merdeka, menjadi sebab utama perpisahan itu terjadi.³⁵

Bahkan di akhir dasawarsa tahun 60-an, Malaysia harus menghadapi problem yang tidak kalah berat yakni pertikaian antar-ras yang pada gilirannya berakhir dengan tragedi kerusuhan 13 Mei 1969. Tunku Abdul Rahman dalam buku catatan pribadinya menjelaskan bahwa kerusuhan 13 Mei 1969 merupakan sebuah peristiwa yang diakibatkan oleh pelbagai faktor, termasuk oleh sebab terbunuhnya seorang aktivis Partai Buruh karena tertembak polisi yang sedang mengamankan aksi demonstrasi—tentang pelaksanaan Pemilu Malaysia—pada 10 Mei 1969.³⁶

Namun di luar penjelasan dari Tunku Abdul Rahman, tragedi ini menurut beberapa pihak, selain dipicu oleh kondisi perekonomian dan perpolitikan Malaysia yang kurang berkembang sejak negara ini merdeka, juga utamanya

³⁴Graig Poulgrain, *The Genesis of Konfrontasi: Malaysia, Brunei, Indonesia. 1945-1965*, (Bathurst: Crafword House Publishing, 1988) hal. 88-89.

³⁵ Tentang beberapa alasan yang diberikan masing-masing pihak, lihat dokumen pidato Lee Kuan Yew, "A Warning from Singapore's Prime Minister, 16 March 1965", serta dokumen pidato Tunku Abdul Rahman, "Separation Announcement by Malaysian Prime Minister, 9 August 1965" dalam, Peter Boyce, *Malaysia & Singapore in International Diplomacy: Document and Commentaries* (Sydney: Sydney University Press), hal. 25-32.

³⁶ Terkait penjelasan Tunku Abdul Rahman tentang seluk beluk terjadinya tragedi 13 Mei 1969, lihat Tunku Abdul Rahman, *13 Mei: Sebelum dan Selepas*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2007). Sementara untuk beberapa penjelasan mengenai kerusuhan Mei dan akibat-akibat politiknya, lihat National Operation Council, *The May 13 Tragedy: A Report* (Kuala Lumpur: Government Press, 1969); Charles T.Goh, *The May Thirteenth Incident and Democracy in Malaysia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1971), Mahathir bin Mohammad, *The Malay Dilemma* (Singapura: Times Book International, 1979).

disebabkan oleh adanya politik diskriminasi yang dilancarkan oleh pihak pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Tunku Abdul Rahman. Bahwa menguatnya dikotomi antara kelompok pribumi (*Bumiputera-Melayu*) dengan pihak non-pribumi, khususnya etnis Cina dan India, ditengarai menjadi sebab utama terjadinya tragedi tersebut.

Fakta ketimpangan ekonomi kelompok Bumiputera (Melayu) di satu sisi dengan kelompok non-Melayu (Cina dan India) di sisi lain, sejatinya memang menjadi masalah yang sulit terpecahkan sejak awal Malaysia merdeka. Kebijakan pihak kolonial Inggris yang menempatkan kelompok Bumiputera (Melayu) pada strata terbawah menyebabkan kelompok pribumi ini hidup dalam penuh keterbatasan dan bahkan terasingkan dari negara mereka sendiri. Oleh karenanya hingga tahun 1970, dari sekitar 11 juta jiwa penduduk, sebanyak 49 persen masyarakat Melayu berada dalam hidup yang tergolong miskin. Hanya 2,6 persen dari mereka yang memegang roda perekonomian saat itu, sementara masyarakat Cina dan India mengendalikan 34 persen dan selebihnya (61 persen) dikuasai oleh kelompok asing.³⁷

Namun demikian insiden Mei 1969 justru menjadi titik awal Malaysia dalam konteks membangun negara. Selepas kerusuhan, pemerintah menggalakkan restrukturisasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang politik, seiring terhentinya sistem parlemen pada 16 Mei 1969 pemerintah membentuk Majelis Gerakan Negara (MAGERAN), disebut juga *National Operations Council* (NOC).³⁸ Sebagai pihak pelaksana pemerintahan pada masa transisi, MAGERAN dihadirkan guna memulihkan beragam problem—utamanya problem konflik etnik—yang dihadapi Malaysia.³⁹

³⁷Just Faaland, John Richard Parkinson & Rais Saniman, *Dasar Ekonomi Baru: Pertumbuhan Negara dan Pencapaian Ekonomi Orang Melayu*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991), hal. 146.

³⁸Pada tahun 1971 MAGERAN dibubarkan seiring dipulihkannya parlemen Malaysia. Semasa transisi MAGERAN berhasil membentuk tiga badan pemerintahan yakni Majelis Muhibah Negara, Jabatan Perpaduan Negara (Oktober 1969), disebut juga dengan istilah Departemen Persatuan Nasional (Juli 1969), dan Majelis Perundingan Negara (Oktober 1969). Dengan dibantu oleh kerja ketiga lembaga baru tersebut MAGERAN dibawah komando Razak mulai melancarkan serangkaian kebijakan sosial-ekonomi dan politik.

³⁹Di Malaysia, sudah sering terjadi konflik etnik yang berujung pada kerusuhan massal, mulai dari konflik di tahun 1946 dan 1956 di Pulau Pinang, tahun 1960 di Pangkor, tahun 1966 di Bukit Mertajam, tahun 1967 di Pulau Pinang, hingga yang terjadi pada 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur.

Melalui MAGERAN, Tun Abdul Razak dengan dibantu oleh tim perumus yang berasal dari MAGERAN berhasil merumuskan sebuah konsep ideologi bersama yang selanjutnya terjabar dalam konsep “Rukun Negara”. Rukun Negara yang merupakan falsafah dasar negara ini selanjutnya diakui sebagai sebuah ideologi kebangsaan Malaysia pada 31 Agustus 1970. Dalam perjalanannya Rukun Negara inilah yang menjadi panduan dan acuan utama bagi segenap masyarakat guna mencapai persatuan kelompok yang ditunjang oleh munculnya keharmonisan dan kemakmuran negara Malaysia secara umum.⁴⁰ Ideologi ini terjabar dalam lima prinsip utama, yaitu: “Kepercayaan kepada Tuhan” (*Belief in God*), “Kesetiaan kepada Raja dan Negara” (*Loyalty to King and Country*), “Keluhuran Perlembagaan” (*Supremacy of the Constitution*), “Kedaulatan Undang-Undang” (*Rule of Law*), serta “Kesopanan dan Kesusilaan” (*Mutual Respect and Morality*).⁴¹

Seiring penciptaan ideologi Malaysia tersebut, terjadi suksesi kepemimpinan dari Tunku Abdul Rahman kepada Tun Abdul Razak.⁴² Sejak terjadinya suksesi tersebut, seperti halnya Indonesia, Malaysia juga menjadikan ekonomi sebagai fokus gerakan pemerintah. Di bawah kepemimpinan Tun Abdul Razak, Malaysia menerapkan beberapa kebijakan guna mengantisipasi beragam problem yang dihadapi, termasuk yang terkait dengan tragedi Mei 1969. Adalah Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economy Policy/NEP*), disebut juga Dasar Ekonomi Baru (DEB), yang pada akhirnya dirancang oleh pemerintah pada tahun 1971 guna menyelesaikan masalah ekonomi Malaysia secara umum.⁴³

⁴⁰ Chamil Wariya, *Abdullah Ahmad Badawi: Perjalanan Politik PM ke-5*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 2004), hal.76.

⁴¹ Untuk penjabaran atas lima prinsip Rukun Negara tersebut lihat Government of Malaysia, *Rukunegara* (Kuala Lumpur: Jabatan Cetak Kerajaan, 1970), hal. 15, atau lihat Mohd Ayop Abd Razid, “Rukun Negara sebagai Etika, Falsafah dan Ideology”, dalam (<http://www.jasa.gov.my/index.php/bm/media/koleksi-artikel/1-politic/388-rukun-negara-sebagai-etika-falsafah-dan-ideologi-.html>) (Diakses pada 13 Maret 2011).

⁴² Terlahir di Pulau Keladi, Pekan, Pahang, Malaysia pada 11 Maret 1922, Tun Abdul Razak bin Haji Dato' Hussein Al-Haj menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-2 mulai tahun 1970 hingga 1976. Selain dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri Malaysia, ia juga pendiri Barisan Nasional pada tahun 1973. Tentang profil lengkap Tun Abdul Razak, lihat William Shaw, *Tun Razak, His Life and Times* (Kuala Lumpur: Longman Malaysia SDN, Berhad, 1976).

⁴³ Pembahasan lebih jauh tentang DEB, lihat Mukhriz Mahathir dan Khairy Jamaludin, *Dasar Ekonomi Baru: Intipati*, (Kuala Lumpur: Utusan Pubs, 2004), Just Faaland, John Richard Parkinson & Rais Saniman, *Dasar Ekonomi Baru: Pertumbuhan Negara dan Pencapaian Ekonomi Orang Melayu*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991).

Dengan prioritas pada pembangunan ekonomi bagi kaum Bumiputera pasca-kerusuhan rasial tahun 1969, kebijakan tersebut diarahkan demi dua tujuan utama, menghapuskan kemiskinan dan menata ulang sendi kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, di samping untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di antara berbagai golongan ras di Malaysia, DEB juga dihadirkan utamanya untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat Bumiputera (Melayu) agar setara dengan komunitas Cina dan India.⁴⁴

Demi merealisasikan misi tersebut, sejak saat itu pemerintah Malaysia mulai memfokuskan gerakannya pada agenda redistribusi aset negara. Segera setelah DEB dilancarkan, seluruh bank pemerintah Malaysia diwajibkan memberi kredit lunak dengan suku bunga rendah kepada masyarakat Bumiputera untuk usaha bidang pertanian, kerajinan, dan lainnya. Selain itu demi meningkatkan keterlibatan Melayu di sektor ekonomi modern, pemerintah mewajibkan pengusaha termasuk perusahaan-perusahaan Cina dan asing yang telah mapan untuk merestrukturisasi diri sedemikian rupa dan mengalokasikan paling tidak 30 persen sahamnya kepada kelompok Bumiputera, baik melalui agen-agen pemerintah yang bertindak atas nama Melayu maupun oleh pengusaha Melayu perorangan. Perusahaan yang gagal merestrukturisasi diri akan menemui kesulitan dalam pembaharuan izin usaha atau untuk memperoleh kontrak-kontrak dari pemerintah. Lebih dari itu masyarakat Bumiputera juga didorong melakukan kegiatan ekonomi produktif lain untuk peningkatan pendapatan dan taraf hidup. Jikapun terjadi kredit macet, para debitor (terutama Bumiputera) tak dikenai sanksi, tetapi cenderung diputihkan dan bahkan, yang bersangkutan dikucuri lagi kredit guna menggiatkan usahanya.⁴⁵

Di daerah-daerah pedesaan, DEB berhasil membantu para petani dalam konteks penggunaan teknik modern, irigasi dan drainase sawah, menggandakan panen padi, serta mengembangkan suatu kelas wiraswasta Melayu yang menjual produk pangan dan buah tangan. Lebih jauh pemerintah juga berhasil

⁴⁴ Christine B. N. Chin, "The State of the 'State' in Globalization: Social Order and Economic Restructuring in Malaysia" *Third World Quarterly*, Vol. 21, No. 6, 2000, hal.1043, Government of Malaysia, *Malaysia Plan 2, 1971-1975* (Kuala Lumpur: Government Press, 1971), hal. 1.

⁴⁵ Harold Crouch, *Government and Society in Malaysia* (Singapore: Talisman Publishing Pte Ltd., 1996), hal. 37-38.

menciptakan lapangan kerja bagi lulusan-lulusan universitas Melayu lintas bidang dan lintas sektor. Banyak lulusan universitas, utamanya yang berasal dari kelompok Pribumi, dipekerjakan di lembaga-lembaga pemerintah, bank-bank, perusahaan-perusahaan asuransi, institusi-institusi keuangan, perusahaan-perusahaan perumahan, firma-firma konsulting, atau program-program pendidikan dan kesejahteraan yang disponsori oleh pemerintah.⁴⁶

Pada akhirnya DEB menimbulkan dampak positif bagi kehidupan mayoritas orang Melayu. Program-program dari pemerintah yang dilancarkan melalui kebijakan DEB turut berkontribusi pada timbulnya perasaan bahwa pemerintah telah berupaya memperbaiki kesejahteraan material dan spiritual orang Melayu. Terkait upaya memperbaiki kesejahteraan spiritual orang Melayu, pemerintah misalnya, melancarkan program Tabung Haji, Muslim bisa menabung untuk naik haji ke Mekah, dan lebih jauh pemerintah juga menyediakan dana pemadan (*matching fund*). Selain itu negara juga memastikan bahwa orang Melayu punya akses mudah ke masjid, pengadilan syariat, sekolah agama, layanan telepon, izin bisnis, dokter dan klinik, sekolah, dan institusi-institusi agama.⁴⁷

Selain kebijakan DEB, yang juga dilancarkan oleh pemerintah Malaysia saat itu adalah Kebijakan Kebudayaan Nasional (*The National Cultural Policy*) pada tahun 1971. Tujuan utama dari kebijakan ini sepenuhnya diorientasikan guna menciptakan sebuah identitas nasional dengan dasar persamaan budaya dan bahasa yang terbentuk dari sumber yang sama, Melayu. Secara lebih rinci, terdapat tiga prinsip yang mendasari kebijakan ini: kebudayaan nasional Malaysia harus didasarkan pada warisan kebudayaan Melayu; kebudayaan nasional Malaysia harus terbuka dan selalu beradaptasi dengan unsur-unsur

⁴⁶ Shamsul AB, "The Economic Dimension of Malay Nationalism: The Socio-Historical Roots of the New Economic Policy and Its Contemporary Implications", *The Developing Economies*, Vol. 35, No. 3 (September 1997), hal. 240–61, atau lihat "Identity Construction, Nation Formation, and Islamic Revivalism in Malaysia", dalam Robert W. Hefner; Patricia Horvatic (ed.), *Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia* (Hawaii: University of Hawaii Press, 2007), hal. 207-230.

⁴⁷ Wawancara Julia Chernov Hwang dengan Tan Sri Ahmad Sarji, Kepala Permodalan Nasional Berhad (PNB), Malaysia, Februari 2006, dikutip dari Julia Chernov Hwang, *Peaceful Islamist Mobilization in the Muslim World: What Went Right* (New York: Palgrave Macmillan, 2009), hal.131.

budaya lain; dan Islam merupakan komponen terpenting dalam proses pembentukan kebudayaan nasional.⁴⁸

Melihat keseluruhan substansi kebijakan kebudayaan nasional tersebut tampak bahwa Islam nyatanya memang menjadi komponen terpenting dalam tata kehidupan masyarakat Malaysia. Bahwa Islam sejauh berdirinya Malaysia sebagai negara merdeka merupakan faktor penting dalam keseluruhan isi dan proses politik di negara tersebut. Arti penting Islam dimungkinkan sekurang-kurangnya karena dua hal. *Pertama*, Islam adalah agama resmi Malaysia sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi Federal Pasal 3 (1): “*Islam is the religion of the Federation; but other religions may be practised in peace and harmony in any part of the Federation*”.⁴⁹ *Kedua*, Islam di Malaysia menjadi satu-satunya sistem simbolik yang paling dominan dan belum ada sistem simbolik lain yang memiliki tingkat legitimasi politis setaraf dengan sistem simbolik Islam.⁵⁰

Kedudukan istimewa Islam dalam struktur politik Melayu tidak bisa dilepaskan dari corak kolonialisme Inggris di Malaysia. Tidak seperti Belanda di Indonesia yang melumpuhkan Islam sehingga umat Islam kelak tidak memiliki para pegawai terlatih di bidang agama di masjid-masjid dan pengadilan-pengadilan Islam,⁵¹ kebijakan Inggris di Malaysia memperkuat hubungan antara Melayu dan Islam. Inggris bukan hanya memberi hak prerogatif Sultan dalam urusan adat dan agama, tetapi juga menyiapkan instrumen birokratik dan hukum untuk pemberlakuannya secara sistematis dan menyeluruh.⁵² Dengan ini kaum aristokrat Melayu diberi ruang gerak oleh Inggris, sesuatu yang tidak diperoleh aristokrat bumiputera di Indonesia. Hal ini membantu menjelaskan mengapa para bangsawan Melayu lebih leluasa untuk menegosiasikan pencantuman Islam

⁴⁸ Sharon A. Carstens, *Histories, Cultures, Identities: Studies in Malaysian Chinese Worlds* (Singapore: Singapore University Press, 2005), hal.150-151, Lee Hock Guan, “Ethnic Relations in Peninsular Malaysia: The Cultural and Economic Dimensions”, dalam, *ISEAS Working Papers*, “Social and Cultural Issues” No. 1, Agustus, 2000, hal.4.

⁴⁹ Legal Research Board, *Federal Constitution* (Selangor: International Law Book Services, 2003), hal.20.

⁵⁰ Manning Nash, “Islamic Resurgence in Malaysia and Indonesia”, dalam Martin E. Marty dan R. Scott Appleby, *Fundamentalism Observed* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1991), hal.724.

⁵¹ Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institution* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1972), hal.34.

⁵² Robert W. Hefner (ed.), *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia* (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2001), hal.16.

sebagai agama resmi negara Malaysia. Maka tidak mengherankan ketika di Malaysia Islam akhirnya tampil sebagai kekuatan simbolik dominan yang tak tertandingi oleh sistem simbolik lain.

Selain penerapan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Kebijakan Kebudayaan Nasional, Tun Abdul Razak juga berupaya mengadakan perbaikan dalam ranah pendidikan. Untuk maksud tersebut program yang mula-mula dilancarkan pemerintah adalah menyokong pendirian berbagai perguruan tinggi yang sejatinya diorientasikan untuk kelompok Bumiputera (Melayu). Dengan pendirian perguruan tinggi tersebut, kelompok Bumiputera (Melayu) diberi peluang seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikannya hingga tingkat tinggi. Adapun bagi para sarjana dari komunitas Melayu yang memiliki prestasi baik, segera dikirim untuk melanjutkan studi doktoral di luar Malaysia (Inggris, Australia, dan beberapa negara lain) sebelum akhirnya kembali mengabdikan diri di Malaysia ketika mereka telah menyelesaikan pendidikannya.

Melihat data perguruan tinggi di Malaysia di awal tahun 60-an negara ini hanya memiliki dua universitas, yaitu Universitas Nasional Malaya dan Universitas Penang yang didirikan dan diresmikan keberadaannya pada tahun 1962. Namun di akhir tahun 60-an terjadi perkembangan yang cukup signifikan ketika Malaysia mulai secara aktif mendirikan institusi perguruan tinggi di berbagai wilayah. Setelah kemunculan Universiti Sains Malaysia (USM) yang didirikan pada tahun 1969 di Gelugor, Penang, pada 18 Mei 1970, berdiri pula Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di Bangi, Selangor. Setelah UKM, muncul selanjutnya Universiti Putra Malaysia (UPM) di Serdang, Selangor pada 1971 yang selanjutnya diteruskan oleh pendirian Universiti Teknologi Malaysia (UTM) di Skudai, Johor pada tahun 1972.⁵³

Selain perkembangan di atas penting pula dicatat perihalan munculnya Barisan Nasional (*National Front* atau BN) yang merupakan koalisi dari sekitar 15 partai politik di Malaysia. Terbentuk pada tahun 1974 menyusul pecahnya kerusuhan rasial pada tanggal 13 Mei 1969, koalisi yang sering disebut sebagai kelompok “BN Family” ini berhasil memegang kendali pemerintahan di era pemerintahan Tun Abdul Razak. Anggota-anggota inti BN, yakni *United*

⁵³ Federal Department of Information, *Malaysia Year Book 1971* (Kuala Lumpur: A Malay Mail Publication, 1972), hal. 327-335.

Malays National Organisation (UMNO) dan *Malaysian Chinese Association* (MCA) serta *Malaysian Indian Congress* (MIC) yang sebelumnya pernah membentuk Partai Perikatan (Alliance Party) (1955-1974) telah lama memegang kendali pemerintahan sejak awal kemerdekaan Malaysia.⁵⁴

Meskipun kelompok “BN Family” demikian kuat menguasai peta politik dan parlemen Malaysia dengan rekor fantastis duapertiga suara mayoritas atau lebih, namun Malaysia juga memiliki partai-partai politik yang tak dapat dipandang sebelah mata, salah satunya Partai Islam SeMalaysia (PAS). Dalam sejarah perpolitikan Malaysia, PAS telah berhasil menjadi partai yang disegani pada dasawarsa tahun 70-an. Bersama dengan United Malays’ National Organization (UMNO), partai ini berhasil membawa Islam masuk ke dalam sistem pemerintahan Malaysia. Tahun 1973 PAS bersama beberapa partai lain membentuk Kerajaan Campuran PAS-Perikatan. Setahun kemudian (1974) PAS mulai bergabung dalam Barisan Nasional yang secara fenomenal berhasil memenangi Pemilihan Umum tahun 1974. Dengan statusnya sebagai mitra koalisi BN, PAS dengan mudah berhasil menghembuskan spirit Islam ke berbagai lapisan masyarakat. Akan tetapi oleh sebab terjadinya krisis politik Kelantan pada 1977 yang kemudian diikuti oleh penolakan PAS atas Akta Darurat (Kelantan) 1977, menyebabkan PAS bukan saja tersingkir dari BN, tapi juga kehilangan kekuasaan atas Kelantan. Sejak itu PAS harus menghadapi berbagai konflik internal dan membawanya pada situasi perpecahan yang baru bisa terselesaikan pada sekitar tahun 1982.⁵⁵

Tahun 1976 Tun Abdul Razak meninggal dunia dan sejak itu, posisi Perdana Menteri dipercayakan kepada Tun Hussein Onn. Melanjutkan misi yang diusung oleh Razak, Onn juga dipandang berhasil membuat Malaysia semakin kuat, khususnya dalam bidang perekonomian. Program NEP terus dijalankan dan bahkan semakin diperkuat. Di bawah kepemimpinan Onn, NEP

⁵⁴ Richard Maidment, David Goldblatt & Jeremy Mitchell (Ed.), *Governance in the Asia-Pacific*, (London, Routledge, 1998), hal. 292, Ooi Keat Gin (Ed.), *Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, From Angkor to East Timor* (California: ABC-CLIO, Inc., 2004), hal.221-222.

⁵⁵ Perihal sejarah perkembangan PAS, lihat Farish A.Noor, *Islam Embedded: The Historical Development of the Pan-Malaysian Islamic Party PAS 1951-2003*, (Malaysian Sociological Research Institute, Kuala Lumpur, 2004), Erica Miller, *Democratic Islamist? A Case Study on The Pan-Malaysian Islamic Party (PAS)*, Thesis, The Fletcher School, Tufts University, 2006, dalam <http://repository01.lib.tufts.edu:8080/fedora/get/tufts:UA015.012.DO.00125/>

diarahkan sepenuhnya untuk mencapai dua target utama. *Pertama*, menyediakan peluang kerja di seluruh sektor ekonomi dan bahwa di semua tingkat pekerjaan nantinya harus mencerminkan komposisi rasial pada 1990. *Kedua*, restrukturisasi kekayaan produktif, sehingga pada 1990 kaum Melayu dan pribumi lain memiliki dan menjalankan paling tidak 30 persen dari semua total aset. Untuk merealisasikan target tersebut pemerintah berupaya memperluas badan-badan yang sudah ada dan membuat badan-badan baru untuk membantu kaum Melayu dalam kegiatan usaha.⁵⁶

Salah satu badan baru yang dibentuk oleh pemerintah adalah Yayasan Permodalan Bumiputera dan Permodalan Nasional Berhad. Melalui kedua badan tersebut Onn telah mampu mendorong komunitas Melayu (Bumiputera) untuk berani terlibat lebih jauh dalam arus perekonomian Malaysia yang dalam hal ini tercermin dari meningkatnya kepemilikan saham dan kekayaan kelompok Bumiputera.⁵⁷ Lebih jauh, ia juga meneruskan kebijakan integrasi nasional yang telah dimulai oleh Razak, utamanya dalam konteks menjaga stabilitas politik, ekonomi serta hamonisasi rasial di Malaysia. Oleh banyak kalangan Onn dianggap berhasil dan atas dasar beragam jasa yang telah diberikannya, media Malaysia menganugerahinya sebagai “Bapa Perpaduan” (*Father of Solidarity*) Malaysia.⁵⁸

Pada bulan Juli 1981 Mahathir Mohammad diangkat menjadi Perdana Menteri menggantikan Husein Onn. Programnya “Look East”—kebijakan melihat ke Timur—begitu terkenal sepanjang dasawarsa tahun 80-an. Diluncurkan pada 9 Februari 1982 kebijakan politik luar negeri ini merupakan sebuah respon atas kebijakan pemerintah Inggris yang selalu “merendahkan” Malaysia, khususnya dalam dunia pendidikan. Fakta bahwa pemerintah Inggris selalu menaikkan biaya pendidikan di Inggris untuk pelajar Malaysia yang menuntut ilmu di sana, menjadi sebab utama Mahathir mengambil kebijakan tersebut.

⁵⁶ Government of Malaysia, *Malaysia Plan 3, 1976-1980* (Kuala Lumpur: Government Press, 1976), hal.76.

⁵⁷ Kamaruddin M. Said, *500 Tahun Melayu Menghadapi Cabaran*, (Shah Alam: Kris Publications, 2004), hal.202.

⁵⁸ Cheah Boon Kheng, *Malaysia: The Making of Nation*, (Singapura: ISEAS, 2002), hal.159.

Dengan kebijakan “Look East”, Malaysia berharap bisa mencontoh negara-negara Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan—seraya mengambil nilai-nilai positif dari kedua negara tersebut—dan tidak selalu berkiblat kepada negara-negara Barat. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan “Look East” ini adalah mobil nasional Malaysia, Proton Saga (Perusahaan Otomobil Nasional) yang digulirkan pada 8 Februari 1982 untuk bersaing dengan mobil-mobil buatan Eropa yang ada di Malaysia. Selain itu ada pula Perwaja Trengganu, sebuah program yang terkonsentrasi pada pemroduksian kilang baja. Keduanya merupakan proyek kerjasama Malaysia dengan pemerintah Jepang yang dalam sejarahnya tergolong sukses dan berhasil membawa kemajuan besar pada perekonomian Malaysia.⁵⁹

Selain kebijakan “Look East”, Mahathir juga menjadikan proyek perancangan infrastruktur wilayah dan pembangunan kota—teralisasi dalam program *Urban Development Authority* (UDA)—sebagai prioritas kerja pemerintah. Demikianlah, semenjak keluarnya kebijakan penerapan Dasar Ekonomi Baru (DEB) di era Razak yang selanjutnya diperkuat seterusnya oleh Onn dan Mahathir, Malaysia alhasil telah menjelma menjadi negara yang meskipun relatif baru, tapi cukup berhasil membangun perekonomiannya.

Problemnya, seiring terjadinya perubahan struktur ekonomi dan pesatnya pertumbuhan ekonomi negara, Malaysia pada beberapa hal justru harus menghadapi ragam tantangan, di antaranya adalah tentang kurangnya jumlah tenaga kerja yang akan menjadi “senjata” mereka dalam proses membangun perekonomian negara.

Dalam hal ini, sektor pertanian dan perkebunan, seperti getah dan kelapa sawit, menjadi beberapa sektor yang terlihat sangat membutuhkan tenaga kerja tambahan. Bagi sebagian penduduk lokal, sektor perkebunan dan pertanian dianggap kurang memadai dalam banyak hal, baik dari segi harapan pendapatan, ataupun dari kondisi yang mengiringi perkembangan beberapa sektor tersebut.

⁵⁹ R.S. Milne & Dianne K. Mauzy, *Malaysian Politics under Mahathir*, (London: Roulledge, 1999), hal. 65-67.

Akibatnya mereka sangat enggan untuk bekerja, baik pada sektor pertanian ataupun perkebunan.⁶⁰

Sementara di sektor konstruksi, persoalan serupa terjadi. Seiring diimplementasikannya proyek infrastruktur wilayah dan pembangunan kota, Malaysia juga dihadapkan pada fakta atas kurangnya tenaga kerja lokal yang bergerak dalam sektor tersebut. Sama seperti halnya perkebunan dan pertanian, rendahnya tingkat upah bagi pekerja menjadi sebab utama sektor ini tidak begitu dilirik oleh penduduk dalam negeri. Mulanya untuk mengatasi beragam persoalan tenaga kerja tersebut, pemerintah berupaya merekrut para pekerja dari pedesaan dengan standar upah yang cukup tinggi, namun di samping secara kuantitas tidak terlalu banyak, para pekerja dari pedesaan juga terkadang tidak begitu mampu mengelola berbagai sektor tersebut.⁶¹

Beberapa latar belakang itulah yang membuat pemerintah Malaysia—meski sudah dipandang sebagai sebuah negara berkembang yang sukses—terus berusaha membenahi sektor perekonomian mereka yang salah satunya tercermin dari dikeluarkannya kebijakan untuk merekrut tenaga kerja asing dari berbagai negara, tak terkecuali dari Indonesia. Maka di titik inilah cerita tentang membanjirnya migrasi besar-besaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia di rentang dasawarsa tahun 80-an mulai bergulir dan menjadi pembahasan tak berujung, bahkan hingga saat ini.

Penting dicatat, gelombang kedatangan pekerja Indonesia (TKI) di Malaysia sejatinya menguat oleh beberapa sebab, diantaranya adalah faktor mulai lemahnya kondisi perekonomian Indonesia di era tahun 80-an yang pada gilirannya menimbulkan dampak yang berat hampir terhadap semua sektor ekonomi, tak terkecuali pada kondisi tenaga kerja (*labour*) di Indonesia. Dengan upah minimum (*minimum wage*) yang sangat rendah, mereka alhasil berpikir ulang untuk bertahan di Indonesia yang memang terlihat tak memiliki prospek cerah secara ekonomi, terlebih ketika harus menyediakan lapangan kerja yang layak dan menjanjikan. Dan faktor inilah yang setidaknya mampu menjelaskan

⁶⁰ Fatimah Said & Saad Mohd. Said, *Ekonomi Pasaran Buruh*, (Kota Bharu: Kelantan, 2002). Lihat pula, Fatimah Said & Saad Mohd. Said, “Perkembangan Pasaran Buruh Malaysia”, dalam, Fatimah Kari, Evelyn Devadason, Hanira Hanafi & Yong Sook Loo (eds.), *Applied Economics Issues in Malaysia*, (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2006), hal. 193-206.

⁶¹ Said & Saad Mohd, “Perkembangan Pasaran Buruh Malaysia”,...hal. 200-201.

perihal fenomena migrasi besar-besaran tenaga kerja Indonesia ke Malaysia yang jika ditelisik lebih jauh, berangkat dari prinsip sederhana, bergerak dari perekonomian yang kurang mapan menuju perekonomian yang lebih makmur.

Sementara Malaysia, bermodal kondisi perekonomian yang cukup mapan, dengan percaya diri melancarkan kebijakan tangan terbuka dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pekerja Indonesia yang hendak mencari peruntungan di Malaysia. Dengan keberhasilannya melakukan investasi jangka panjang,⁶² yang itu didukung oleh kondisi infrastruktur yang ada, Malaysia menjadi wilayah yang memiliki daya tarik kuat, khususnya bagi para TKI guna memperbaiki nasibnya.

2.3. Indonesia-Malaysia dalam Bingkai Kerjasama

Segera setelah konfrontasi berakhir kedua negara memulai agenda rekonsiliasi—beberapa tokoh menyebutnya sebagai “rujuk”—guna menutup keran perselisihan. Agenda rekonsiliasi antar kedua negara tersebut dimungkinkan karena baik Indonesia ataupun Malaysia membutuhkan beragam perbaikan pasca mereka terlibat dalam gejolak konfrontasi. Selain itu, kedua negara juga diharuskan untuk mulai membangun kehidupan kenegaraan mereka masing-masing, menuju ragam perbaikan dan meninggalkan segala konflik yang dalam banyak hal turut merusak tatanan kehidupan masing-masing negara.

Indonesia misalnya, dengan keputusan menitikberatkan perbaikan ekonomi seperti yang dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru, menjadikan negara ini membutuhkan mitra dalam usahanya mencapai agenda perbaikan ekonomi. Dengan warisan ekonomi yang diberikan oleh rezim sebelumnya—termasuk oleh adanya konfrontasi—Orde Baru menghadapi masalah serius dalam bidang ekonomi

⁶² Target jangka panjang ini merupakan pola yang dikembangkan masing-masing negara ketika mereka berhasil meraih kemerdekaan. Tatkala Indonesia memulai penataan negara pasca meraih kemerdekaannya dari Belanda, target gerakan yang diutamakan adalah pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Indonesia dengan arsitek pembangunan yang lebih agresif dari Malaysia mencoba membangun negara dengan menjadikan ekonomi dan kestabilan politik sebagai panglima. Sementara Malaysia, ketika berhasil meraih kemerdekaan dari Inggris, target gerakannya lebih diorientasikan pada sektor pendidikan yang menurut para arsitek awal Malaysia, memiliki nilai investasi jangka panjang. Dan pada kenyataannya Indonesia gagal menjalankan strategi pembangunannya sedangkan Malaysia mampu unggul dalam target jangka panjangnya.

Melihat kondisi yang ada, melancarkan agenda kerjasama menjadi pilihan tepat yang harus diambil oleh Orde Baru. Hal yang sama juga dikehendaki Malaysia. Sebagai negara yang belum lama menyandang predikat negara merdeka, Malaysia membutuhkan dukungan dari negara lain untuk turut memperkuat bangunan kenegaraannya. Berdasarkan fakta tersebut, tak ayal bahwa kerjasama antara kedua negara penting dilakukan jika hendak merealisasikan misi perbaikan tersebut.

Penelitian ini berupaya mendedah satu bentuk kerjasama antara kedua negara yakni kerjasama kebahasaan (MBIM). Namun sebelum pemaparan lebih jauh tentang kerjasama MBIM, penting dicatat bahwa pasca konfrontasi kedua negara telah melancarkan serangkaian kerjasama. Beberapa kerjasama yang dilakukan kedua negara diantaranya adalah keterlibatan Indonesia dan Malaysia dalam pembentukan ASEAN tahun 1967. Secara umum ASEAN memang berhasil memperkuat kehendak kedua negara dalam upaya menutup lembaran cerita kelam yang pernah digariskan oleh Sukarno selama kurang lebih tiga tahun dalam atmosfer konfrontasi.

ASEAN sendiri merupakan organisasi kerja sama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Meskipun bertekad mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dari pengaruh asing, tetapi penting digaribawahi bahwa organisasi ini bukanlah sebuah organisasi politik. Melihat misi awal yang disepakati oleh para pendirinya, seperti tertera dalam Deklarasi Bangkok, ASEAN sedari awal dihadirkan dengan beberapa tujuan, di antaranya: meningkatkan perekonomian negara-negara anggota, memperkuat stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara, mendorong penguatan kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, sains dan teknologi di antara negara-negara di Asia Tenggara, memajukan ranah ekonomi, industri dan pertanian negara anggota, serta menjaga jalinan kerjasama baik dengan organisasi regional maupun internasional.⁶³

Selain berperan aktif dalam pembentukan ASEAN kedua negara juga berinisiatif untuk menjalin hubungan dan kerjasama dalam bidang keamanan dan

⁶³ Straits Times 9 Agustus 1967, seperti dikutip Jayaratnam Saravananuttu, "Malaysia's Foreign Policy," dalam Zakaria Haji Ahmad (Ed.), *Government and Politics of Malaysia*, (Singapore: Oxford University Press, 1987), hal.140.

intelijen. Kerjasama intelijen dimulai sejak tahun 1969. Lembaga yang bertugas menangani kerjasama tersebut yaitu Lembaga Keamanan dan Inteligen Malaysia di pihak Malaysia dan Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN)—saat ini bernama Badan Intelijen Negara (BIN)—di pihak Indonesia.⁶⁴ Dalam proses kerjasama tersebut pihak Malaysia diwakili oleh Ketua Polis Negara Malaysia, Tan Sri Abdul Rahman Hashim dan Ketua Pengarah di Jabatan Menteri, Tan Sri Ahmad Mohd Yusof. Sementara Sutopo Yuwono dipercaya untuk mewakili Indonesia dalam kerjasama tersebut. Guna mengefektifkan kerjasama ini, setiap tahunnya kedua belah pihak secara bergantian mengadakan pertemuan dalam bentuk Seminar Intelijen antara Indonesia-Malaysia. Hal yang menjadi bahasan dalam setiap pertemuan adalah tentang kondisi keamanan di masing-masing negara.

Sementara terkait kerjasama dalam bidang keamanan antara Indonesia dan Malaysia, kerjasama ini secara umum diwujudkan dalam pembentukan Komite Perbatasan Malaysia-Indonesia atau dikenal dengan *General Border Committee* (GBC). Secara garis besar GBC bergerak pada empat fokus aktivitas, yakni: 1) kerjasama pengamanan di wilayah perbatasan, termasuk dalam hal ini pertukaran informasi intelijen di antara kedua negara; 2) latihan bersama yang melibatkan komponen angkatan tentara/angkatan bersenjata—baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara—kedua negara; 3) kerjasama dalam hal penggunaan atau pemanfaatan fasilitas dan pendidikan untuk keperluan angkatan tentara/angkatan bersenjata kedua negara, yang dalam hal ini terwujud dari kehadiran sekolah-sekolah staf dan komando (SESKO-Sekolah Staf Komando) di Indonesia yang juga diikuti oleh perwira-perwira dari Malaysia; dan 4) melakukan konsultasi secara reguler di kalangan pimpinan tentara/angkatan bersenjata kedua negara.⁶⁵

Perihal kerjasama pengamanan di wilayah perbatasan, agenda ini mulai diaktifkan pada tahun 1972. Sejauh ini kerjasama pengamanan di wilayah perbatasan diwujudkan dalam bentuk *Coordinated Operations Control Committee*

⁶⁴ Data tentang kerjasama keamanan dan intelijen antara Indonesia-Malaysia ini disarikan dari tulisan Dato' Nik Mohamed Nik Mohd. Salleh, "Hubungan Malaysia-Indonesia di Era Pasca Konfrontasi", dalam Musni Umar dan Pudentia MPSS, *Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Indonesia-Malaysia* (Jakarta: INSED dan EPG Indonesia, 2011), hal. 41-43.

⁶⁵ Mohd. Salleh, "Hubungan Malaysia-Indonesia di Era Pasca Konfrontasi", hal. 42-43.

(COCC) yang secara umum dihadirkan oleh kedua negara sebagai media komunikasi guna membincang beragam persoalan keamanan khususnya yang terkait dengan penumpasan gerombolan komunis di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia.⁶⁶

Pertemuan kedua belah pihak dalam COCC pertama kali berlangsung pada bulan Juli 1972 di Prapat, Sumatera Utara, dan seterusnya diadakan setiap enam bulan sekali secara bergantian di masing-masing negara. Sidang pertemuan kedua diadakan di Kuala Lumpur pada bulan Desember 1972. Sementara untuk sidang pertemuan ketiga diadakan di Denpasar, Bali, pada bulan Juli 1973. Untuk sidang pertemuan kelima, Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan dan sukses melaksanakannya pada bulan Desember 1974.⁶⁷

Dalam setiap sidang pertemuan, kedua negara diwakili oleh masing-masing delegasi. Pada sidang pertemuan ketiga misalnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tun Ismail didaulat menjadi delegasi untuk Malaysia. Sementara pada sidang kelima, pihak Malaysia diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, Tun Sri Ghazali Syafei bersama dengan KSAD, KSAL, dan Kepala Kepolisian Malaysia. Dari pihak Indonesia, Menteri Pertahanan dan Keamanan biasanya dipercaya untuk menjadi pemimpin delegasi pertemuan. Pada sidang kelima, Jenderal Pangabean diberi kepercayaan untuk memimpin delegasi dari Indonesia.⁶⁸

Penting dicatat bahwa apa yang dibahas dalam setiap pertemuan sangat ditentukan oleh kondisi keamanan yang terjadi di masing-masing negara, utamanya di daerah perbatasan kedua negara. Namun demikian pada tiap pertemuan akan dibahas perihal cara kerja operasi yang sudah dilakukan kedua negara untuk kemudian mengevaluasinya bersama. Dari hasil evaluasi itulah kemudian kedua belah pihak menyusun cara kerja dan prosedur yang baru untuk masa enam bulan kemudian. Sebagai contoh, dalam sidang pertemuan kedua tahun 1972 muncul kesimpulan bahwa untuk mengefektifkan kerja petugas keamanan masing-masing negara perlu ditetapkan satu lokasi yang akan menjadi sekretariat bersama. Dengan dasar tersebut maka pada pertemuan ketiga tahun

⁶⁶ *Kompas*, 3 Juli 1973.

⁶⁷ *Kompas*, 3 Juli 1973.

⁶⁸ *Kompas*, 17 Desember 1974.

1973 ditetapkan bahwa Balairung, Sarawak, selanjutnya berfungsi sebagai sekretariat bersama sekaligus markas besar COCC (Combined Operation Coordinator Committee) yang akan menjadi tempat bagi kedua negara bertemu.⁶⁹

Kerjasama lain yang dilancarkan kedua negara pasca konfrontasi kerjasama dalam bidang perdagangan lintas batas (*Border Trade Agreement/BTA*). Kerjasama yang dimulai sejak 24 Agustus 1970 ini dihadirkan selain sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan kedua negara juga untuk mendorong terjadinya pembangunan daerah perbatasan. Pada masa-masa awalnya, kerjasama ini berjalan lancar. Beberapa faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan kerjasama ini diantaranya adalah karena faktor kedekatan geografis, kemudahan sarana, faktor ekonomis, hubungan kekeluargaan, dan keterkaitan sosial budaya kedua negara. Dalam aktivitas awalnya kedua negara bersepakat untuk memegang beberapa poin penting sebagai acuan, seperti: nilai limit transaksi, definisi penduduk perbatasan, penduduk yang dibenarkan mengadakan perdagangan lintas batas, daerah-daerah dalam *Border Trade Agreement (BTA)* dan *exit/entry point* nya, satuan wilayah, dan barang-barang yang dibenarkan dalam BTA.

Dari beragam prinsip tersebut kerjasama perdagangan lintas batas berhasil merumuskan beberapa kesepakatan, khususnya dalam hal perdagangan antara kedua negara. Selain batas nilai perdagangan—untuk wilayah Darat yakni 600 Ringgit/bulan/orang; dan untuk wilayah Laut: 600 Ringgit/sekali pelayaran/orang—kerjasama perdagangan lintas batas ini juga telah melakukan pengelompokan komoditas yang diperdagangkan di perbatasan.

Untuk Indonesia, berupa hasil pertanian dan hasil sumber daya lain dari daerah perbatasan kecuali minyak mineral dan biji tambang. Sementara Malaysia, berupa barang kebutuhan sehari-hari termasuk alat perkakas atau perlengkapan yang dibutuhkan penduduk perbatasan. Dalam sebuah pertemuan di masa-masa awal kerjasama, Indonesia pernah mengusulkan untuk memasukkan wilayah laut ke dalam perjanjian BTA. Hal itu sebenarnya sudah masuk dalam klausul kerja yang disepakati kedua belah pihak. Hanya saja dalam perjalanannya, Malaysia menolak untuk memasukkan wilayah laut.

⁶⁹ *Kompas*, 17 Desember 1974.

Selain itu kedua negara juga melancarkan agenda kerjasama dalam bidang pendidikan. Kerjasama ini begitu kuat berkembang pada dekade tahun 1970an. Pada bulan Maret 1970 Suharto melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Selain sebagai bentuk apresiasi pemerintah Indonesia terhadap kunjungan Tunku Abdul Rahman pada tahun 1968, kunjungan ini juga memiliki misi untuk semakin memperkuat hubungan kerjasama kedua negara di beberapa bidang. Jika pada pertemuan tahun 1968 visi utama yang diusung kedua negara adalah pengembangan kerjasama di bidang ekonomi dan budaya,⁷⁰ maka tahun 1970 ranah pendidikan menjadi visi tambahan yang dijadikan target kerjasama kedua negara.

Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan tersebut adalah agenda pengiriman tenaga pengajar asal Indonesia ke Malaysia. Dengan sangat terbukanya pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Suharto terhadap Malaysia, misi tersebut pada gilirannya berhasil terlaksana dengan lancar, setidaknya selama dasawarsa tahun 1970an. Pada sekitar awal tahun 1970 pihak pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pelajaran Malaysia yang diketuai oleh Tan Sri Hamdan Sheikh Tahir mengadakan perundingan dengan pihak Kementerian Pendidikan Indonesia yang kala itu dipercayakan kepada Sumantri Brodjonegoro selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.⁷¹ Terkait kondisi pengiriman tenaga pengajar dari Indonesia ke Malaysia, Dato' Haji Omar bin Moh. Hasyim, menjelaskan bahwa kala itu terdapat tiga golongan pengajar Indonesia yang mengajar di Malaysia.⁷²

Golongan pertama yaitu mereka yang datang melalui jaringan perorangan, melamar langsung ke universitas di Malaysia. Dalam hal ini, universitas yang sangat membutuhkan tenaga pengajar adalah Universitas Teknologi Malaysia (UTM) yang sejak tahun 1969 sangat minim tenaga pengajar. Contoh tenaga pengajar yang kala itu menggunakan jalur ini adalah Prof.Dr. Ezrin Arbi. Pria asal

⁷⁰ Joseph Chin Yong Liow, *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*, (London: RoutledgeCurzon, 2005), hal. 113.

⁷¹ Lihat, Dato' Haji Omar bin Moh. Hasyim, "Sumbangan Tenaga Pengajar Indonesia dalam Bidang Sains dan Matematik di Sekolah-sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia", dalam, Musni Umar dan Pudentia MPSS, *Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Indonesia-Malaysia* (Jakarta: INSED dan EPG Indonesia, 2011), hal. 102-103.

⁷² Haji Omar bin Moh. Hasyim, "Sumbangan Tenaga Pengajar Indonesia dalam Bidang Sains dan Matematik..... hal. 103.

Bukit Tinggi ini awalnya merupakan alumni Universitas Melbourne, Australia. Setelah sebelumnya sekitar tahun 1969 mengajar di Universiti Teknologi Mara (UITM), dia mendaftarkan diri di UTM dan diterima untuk mengajar di universitas tersebut.

Golongan kedua, menurut Omar, adalah mereka yang dilibatkan melalui jaringan kampus. Adanya kerjasama antara Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan pihak Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi salah satu polanya. Beberapa nama pengajar asal Indonesia yang termasuk dalam agenda ini di antaranya adalah Prof. Abu Bakar Hamid, yang mulai mengajar sejak tahun 1972 di Fakultas Sains UKM. Saat ini ia menjadi Guru Besar Komunikasi di Universiti Malaya. Sementara di UTM, cukup banyak juga para pengajar Indonesia asal ITB yang dipercaya untuk mengajar di universitas tersebut. Beberapa nama yang penting disebut, di antaranya Imaduddin Abdul Rahim (Bang 'Imad). Di universitas Malaysia tersebut, Imaduddin mendapat tugas untuk meng-*upgrade* Technical College, satu-satunya perguruan tinggi warisan Inggris yang menghasilkan lulusan Diploma III (D3).⁷³ Sementara golongan ketiga adalah mereka yang direkrut melalui program *Government to Government*, "G to G" antara Indonesia dan Malaysia. Mereka yang terlibat dalam program ini umumnya adalah guru-guru yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu kerjasama pendidikan kedua negara juga diwujudkan dalam bentuk pengiriman ratusan pelajar Malaysia untuk menuntut ilmu di berbagai universitas di Indonesia, seperti UI, ITB, UGM, ataupun Universitas Nasional (Unas). Para pelajar Malaysia tersebut diberi kebebasan untuk menuntut ilmu dalam berbagai bidang mulai dari kedokteran, teknologi hingga bidang kesusastraan.⁷⁴

Selain di beberapa bidang di atas kerjasama kedua negara juga diarahkan dalam bidang kesusastraan. Titik pijak kerjasama ini terletak pada fakta bahwa karya sastra dari negara-negara di Asia Tenggara—dalam hal ini antara

⁷³ Untuk keterlibatan Imaduddin Abdul Rahim dalam program tersebut, lihat, Prof. Dr. Jimly As-Shiddiqie, dkk, *Bang 'Imad : Pemikiran dan Gerakan Dakwahnya*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hal.35-38.

⁷⁴ Haji Omar bin Moh. Hasyim, "Sumbangan Tenaga Pengajar Indonesia dalam Bidang Sains dan Matematik..... hal. 103.

Indonesia dan Malaysia—berkembang sendiri-sendiri. Ikatan yang ada di antara Indonesia dan Malaysia hanyalah media pengucapannya yaitu bahasa Indonesia/Melayu. Atas kesadaran sebagai bangsa serumpun yang memiliki kesamaan sejarah, budaya dan bahasa, maka selanjutnya muncul usaha dari para sastrawan kedua negara sejak awal tahun 1970an untuk melancarkan beberapa agenda kerjasama guna memperkuat dunia kesusatraan mereka.

Kerjasama pertama dimulai sekitar bulan Oktober 1970. Saat itu kalangan penulis dan sastrawan di Indonesia dan Malaysia, berkeinginan untuk mengadakan kerjasama yang terfokus pada bidang penulisan, khususnya dalam bidang sastra. Dalam kerangka misi ini, beberapa komunitas penulis dan sastrawan kedua negara akhirnya bersepakat untuk menggabungkan diri dalam sebuah wadah yang selanjutnya dikenal dengan nama Gabungan Persatuan Penulis Nasional (GAPENA) dengan Ismail Hussein sebagai ketuanya.⁷⁵

Setelah bersama-sama membangun kerjasama dalam bidang penulisan sastra, atas inisiatif Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia (DBP) bersama-sama GAPENA, beberapa sastrawan kedua negara selanjutnya bersepakat untuk melaksanakan Seminar Kesusastraan Nusantara pada 11-13 April 1973 di Kuala Lumpur, Malaysia. Beberapa tokoh sastrawan-sarjana Indonesia dan Malaysia yang terlibat dalam seminar yang membahas enam kertas karya tersebut, di antaranya: Goenawan Mohamad, Sapardi Djoko Damono, Ismail Hussein, Baharudin Zainal, Abdul Hadi Widji Muthari, Lutfi Abas, A. Bakar Hamid, Harry Aveling, J.U.Shahnon Ahmad, dan Umur Junus Nasution.⁷⁶

Selain melaksanakan seminar, kerjasama di antara kedua negara dalam bidang kesusastraan adalah juga diwujudkan dengan pengiriman dosen-dosen Indonesia untuk meneliti permasalahan kesusastraan modern ke Malaysia. Terkait kerjasama ini pada pertengahan tahun 1970an Universitas Malaya menerima tiga orang dosen kesusastraan untuk meneliti perkembangan kesusastraan modern di

⁷⁵ Ahmad Kamal Abdullah, "Kesusastraan Indonesia-Malaysia Mutakhir: Antara Sensitiviti dan Imaginasi", dalam Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia, *Susastra 3: Jurnal Ilmu Sastra dan Budaya*, Vol.2. No. 3, 2006, hal.72.

⁷⁶ Lihat Dewan Bahasa dan Pustaka dan Gabungan Persatuan Penulis Nasional, *Kertas Kerja Seminar Kesusastraan Nusantara, 1973*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1974). Lihat juga Chua Beng Huat (ed.), *Singapore Studies II, Critical Surveys of the Humanities and Social Sciences*, (Singapore: Singapore University Press, 1999), hal.140.

Malaysia. Ketiga orang dosen itu, diantaranya: J U Nasution dan M.Salleh Saad dari Universitas Indonesia serta Ramli Leman Soemadigdo dari Universitas Gadjah Mada. Ketiga dosen kesusastran tersebut selanjutnya terlibat dalam banyak kuliah serta seminar-seminar yang dilaksanakan di Kuala Lumpur dan beberapa kota lain di Malaysia.⁷⁷

Maka sejak dilancarkan beberapa kerjasama tersebut, tokoh-tokoh sastrawan di kedua negara akhirnya berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi dan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin. Setelah berhasil mengadakan Seminar Kesusastran Nusantara tahun 1973, mereka semakin sering mengadakan pertemuan-pertemuan lanjutan yang diadakan secara bergiliran baik di Indonesia maupun Malaysia.



⁷⁷ Ahmad Kamal Abdullah, "Kesusastran Indonesia-Malaysia Mutakhir: Antara Sensitiviti dan Imajinasi", dalam, Himpunan Sarjana-Kesusastran Indonesia, *Susastra 3: Jurnal Ilmu Sastra dan Budaya*, Vol.2. No. 3, 2006, hal.72.

BAB III

SEJARAH BERDIRINYA MBIM

Jika pada bagian sebelumnya telah disinggung sekilas tentang bentuk kerjasama kedua negara pasca konfrontasi, bab ini akan secara khusus menjelaskan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang kebahasaan yang dilakukan dalam rentang tahun 1966 hingga 1980-an, sebuah era yang dalam kaca mata Joseph Chin Yong Liow diidentikkan dengan era “*Special Relationship*” bagi kedua negara.¹ Tema bahasanya terfokus pada sejarah kemunculan, aktivitas, termasuk dinamika perkembangan dari Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia, MBIM (*Language Council of Indonesia and Malaysia*).

Dalam bab ini rentang waktu pembahasan akan diakhiri pada tahun 1985. Oleh karena sejak tahun 1985 MBIM telah berubah nama menjadi MABBIM seiring keikutsertaan Brunei Darussalam dalam agenda kerjasama tersebut. Sementara dalam penelitian ini, hal utama yang menjadi pembahasan sepenuhnya difokuskan hanya pada kerjasama kebahasaan antara Indonesia dan Malaysia.

3.1. Awal Kerjasama

Dalam bidang kebahasaan arti penting bahasa Melayu bagi kelancaran komunikasi kebudayaan, ilmu pengetahuan, perdagangan, perekonomian ataupun teknologi antara kedua negara menjadi titik awal terlaksananya agenda kerjasama tersebut. Berbeda dengan bidang politik ataupun pendidikan, bidang kebahasaan tampak menjadi perhatian khusus kedua negara jauh sebelum mereka terlibat dalam gejolak konfrontasi.

Pentingnya penguatan bahasa tersebut telah dirasakan kedua negara sejak pertengahan tahun 1950-an. Fakta bahwa bahasa Indonesia dan Malaysia merupakan bahasa yang diturunkan dari bahasa serumpun; bahasa Melayu, pada gilirannya semakin memperkuat gagasan membentuk forum kerjasama kebahasaan di antara kedua negara.

¹ Joseph Chin Yong Liow, *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*, (London: RoutledgeCurzon, 2005), hal. 107.

Di Malaysia, pada bulan November 1955 Persekutuan Bahasa Melayu Universitas Malaya telah membentuk sebuah jawatan kuasa kecil yang ditugaskan untuk mempelajari tata cara penyesuaian bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Agenda tersebut dianggap penting dilancarkan setelah melihat perkembangan bahasa Indonesia yang dinilai cukup berhasil dan kiranya bisa dicontoh oleh Malaysia. Lebih jauh, agenda tersebut dipandang penting sebagai sebuah upaya untuk meminimalkan perbedaan dan perselisihan dalam hal kebahasaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Inilah langkah awal pihak Malaysia dalam upaya mengembangkan bahasa Melayu Malaysia.

Dalam konteks itu, nama-nama seperti Lokman bin Musa (Yang di-Pertuan Persekutuan bahasa Melayu), Tuan Haji Zainal Abidin bin Ahmad (Ketua Jabatan Pengajian Melayu), Y.M. Ungku Abdul Aziz, Puan Sharifah Azzah, Abdul Aziz b. Md.Yassin, dan Sallehudin b. Muhammad (Pengurus Persekutuan Bahasa Melayu), Zainal Abidin b. Sulong, Ismail b. Muhammad dan Hashimah bt. Abdul Aziz (Ahli Jawatan Kuasa), termasuk Dr.P.E. de Josselin de Jong dan C.Skinner (Penasehat dalam Pengajian Bahasa Melayu), begitu aktif merealisasikan misi pengembangan awal bahasa Melayu tersebut.²

Sementara di Indonesia pada rentang tahun yang sama telah terjadi perkembangan yang cukup penting dalam konteks kebahasaan. Saat itu Lembaga Bahasa dan Budaya (LBB) yang disahkan pendiriannya sejak tahun 1952 untuk menggantikan Balai Bahasa (1948-1952) begitu aktif melancarkan agenda pengembangan bahasa Indonesia. Selain melalui penyusunan tata bahasa Indonesia, penyusunan kamus bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah, serta neologisme ilmiah, LBB juga berupaya memperkuat agenda pengembangan bahasa Indonesia melalui agenda penerjemahan dan penyebarluasan hasil kerja yang dilakukan melalui sebuah majalah, *Bahasa dan Budaja* (1952-1964).³

Perkembangan lebih signifikan terjadi pada tahun 1959 ketika LBB digantikan oleh sebuah lembaga baru bernama Lembaga Bahasa dan Kesusastraan

² Hasil kerja mereka dalam perkembangannya terdokumentasikan dalam sebuah kertas kerja Bilangan (I) KBPMM-III/1956. Untuk hasil-hasil kerja tersebut, lihat Tim Persekutuan Bahasa Melayu, *Kertas Kerja Kongres III Bahasa dan Persuratan Melayu Malaya: Laporan tentang Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia* (Persekutuan Bahasa Melayu, Universitas Malaya, 1956).

³Jerome Samuel, *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan*, (Jakarta: KPG, EFEO, 2008), hal. 230-231.

(LBK). Kehadiran LBK dalam perjalanannya semakin mengukuhkan posisi bahasa Indonesia yang berkembang secara pesat di akhir tahun 1950-an. Saat itu, kemunculan tokoh-tokoh seperti Slamet Mulyana, Basuki Suhardi (Ahli Tata Bahasa), Sri Timur Suratman (Peristilahan), Lukman Ali (Kesusastraan Indonesia Modern), S.W. Rudjiati Mulyadi (Kesusastraan Indonesia Lama), Sri Sukesi Adiwimarta (Bahasa Daerah), A.M. Moeliono (Perkamusan), Hosein Widjajakusumah (Dokumentasi/Penerbitan), Lukijati Gundasubrata (Terjemahan), membuat perkembangan bahasa Indonesia semakin maju pesat.⁴

Dampaknya tidak saja pada hal penguatan bahasa Indonesia perkembangan aspek kebahasaan berjalan. Sejak saat itu upaya menjalin kerjasama kebahasaan di antara sesama pengguna bahasa Melayu, khususnya dengan Persekutuan Tanah Melayu, pun mulai digiatkan. Maka diperkuat dengan adanya penandatanganan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu pada tanggal 17 April 1959,⁵ diadakanlah pertemuan antara Jawatankuasa Ejaan Rumi Baharu Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Tun Syed Nasir dengan dan Tim Ahli Bahasa Indonesia dibawah pimpinan Slamet Mulyana pada tanggal 4 hingga 7 Desember 1959. Agenda utamanya adalah memperbincangkan beragam persoalan terkait kondisi dunia kebahasaan kedua negara.

Dalam pertemuan empat hari tersebut, para pakar bahasa kedua negara berkeinginan menyesuaikan sistem tulis dan ejaan bahasa mereka dengan perkembangan ilmu bahasa. Keinginan itu mendorong pakar bahasa kedua negara merintis kerjasama untuk membakukan dan mempersamakan ejaan bahasa mereka. Dari sanalah dihasilkan konsep ejaan bersama yang dikenal dengan nama *Ejaan Melindo* (Melayu-Indonesia).

Sejatinya, konsep Ejaan Melindo tersebut akan diresmikan penggunaannya pada saat kedua negara kembali mengadakan pertemuan pada bulan Januari 1962. Namun perkembangan politik kedua negara, utamanya oleh sebab terjadinya

⁴ Samuel, *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia*,... hal. 232.

⁵ Dalam proses persetujuan perjanjian tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Ir. H. Juanda Kartawidjaja. Sementara pihak Persekutuan Tanah Melayu diwakili oleh Timabalan Perdana Menteri Datuk Abdul Razak bin Datuk Hussein. Lihat *Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1972), hal.8.

konfrontasi Indonesia-Malaysia, menyebabkan peresmian ejaan Melindo tertunda pelaksanaannya.⁶

Bagi Indonesia sendiri tampak bahwa konfrontasi dengan Malaysia tidak menyurutkan niatnya untuk tetap mengadakan perubahan-perubahan dalam ranah kebahasaan. Bahkan terkait Ejaan Melindo, sistem ejaan ini sudah efektif digunakan sejak tahun 1961 dan bahkan selama masa konfrontasi berlangsung. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI misalnya telah menerbitkan buku petunjuk yang secara gamblang menjelaskan perihal Ejaan Melindo tersebut.⁷ Kebijakan ini berlangsung beberapa tahun dan tidak jarang menimbulkan beberapa permasalahan dalam konteks perkembangan dimensi kebahasaan di Indonesia.

Salah satu problem yang penting dicatat dalam konteks ini adalah tentang munculnya kesalahpahaman dari sebagian masyarakat tentang keberadaan Ejaan Melindo tersebut. Ditambah lagi, saat itu sebagian kalangan—khususnya sebagian pendukung Soekarno—begitu aktif melakukan aksi penolakan terhadap Ejaan Melindo yang dinilai sebagai “bentuk halus kekalahan” Indonesia dari Malaysia. Dalam batas tertentu persoalan tersebut lebih nampak sebagai permasalahan politik dan tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan kebahasaan. Namun demikian tetap saja bahwa gejolak yang terjadi saat itu cukup menghambat laju perkembangan bahasa Indonesia secara umum.⁸

Terlepas dari permasalahan tersebut maka sebagai upaya memperkuat konsep perubahan sistem ejaan yang lebih sempurna, pada tanggal 7 Mei 1966 Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, membentuk tim panitia yang secara khusus bergerak dalam penyusunan konsep ejaan baru bahasa Indonesia. Dipimpin oleh Anton Moeliono dengan dibantu oleh beberapa ahli bahasa, baik yang berasal dari LBK maupun dari Fakultas Sastra UI, tim ini selanjutnya

⁶ *Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*,... hal.9.

⁷ Lukman Ali, *Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hal.122.

⁸ Wawancara dengan Benny H Hoed, Kemang Utara, Jakarta Selatan, 24 Februari 2012.

berhasil menghadirkan sebuah konsep ejaan baru bahasa Indonesia.⁹ Seiring hadirnya konsep ejaan baru bahasa Indonesia tersebut, hubungan Indonesia dan Malaysia pun turut memasuki tahapan baru. Pada 11 Agustus 1966 terjadi penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan bilateral Indonesia–Malaysia pasca keduanya terlibat dalam konfrontasi. Dalam sejarahnya, penandatanganan ini membawa perubahan penting bagi kedua negara yang dapat dirasakan hampir di segala bidang, tak terkecuali bidang kebahasaan.

Untuk lebih memperkuat jalinan kerjasama kebahasaan, utamanya dalam hal penyempurnaan sistem ejaan bahasa yang sudah berlaku di masing-masing negara, para pakar bahasa kedua negara bersepakat untuk mengadakan pertemuan yang membahas secara khusus problem kebahasaan kedua negara. Pertemuan ini berhasil terlaksana pada tanggal 7 September 1966. Dalam pertemuan tersebut muncul kesepakatan kedua negara untuk mewujudkan Sistem Ejaan Baru yang praktis, ekonomis, dan ilmiah. Untuk tujuan tersebut, kedua negara bersepakat untuk kembali mengadakan pertemuan lanjutan.

Di pihak Indonesia, seiring disahkannya rancangan konsep peraturan ejaan yang sesuai surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No. 062/1967, Ketua Gabungan V Komando Operasi Tertinggi (KOTI), membawa serta rancangan konsep peraturan ejaan baru Indonesia tersebut sebagai bahan pertemuan dengan Malaysia.

Agenda pertemuan kedua negara ini sendiri berlangsung pada 27 Juni 1967 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan peserta yang terdiri dari Jawatankuasa Bahasa/Ejaan Melayu, Malaysia—terdiri atas: Syed Nasir bin Ismail, Yunus Maris, Abdul Samad Ismail, Hasan Ahmad, dan Kamaluddin Muhammad—serta Tim Ahli Bahasa KOTI dari pihak Indonesia yang terdiri dari: Rudjiati Muljadi, Anton. M. Moeliono, B.Suhardi, Lukman Ali, dan Djoko Kentjono. Saat itulah *Ejaan Melindo* (Melayu-Indonesia) disepakati penggunaannya dan secara resmi ditandatangani oleh Ny. S.W. Rudjiati Mulyadi dari Indonesia dan Tuan Syed Nasir bin Ismail dari Malaysia yang mewakili masing-masing negara.¹⁰

⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hal.14.

¹⁰ Dendi Sugono, et.al (ed.), *Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998), hal.21.

Agenda pertemuan kedua negara berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Misinya, selain untuk memajukan aspek kebahasaan, juga untuk semakin mempererat relasi Indonesia dan Malaysia. Dan sebagai langkah penguatan kerjasama kebahasaan kedua negara secara hukum, pada 23 Mei 1972 Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia melakukan kunjungan bilateral ke Jakarta dengan agenda utama membahas secara khusus misi penguatan kebahasaan bersama. Dari sana, dihasilkanlah Persetujuan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Menteri Pelajaran (Menteri Pendidikan) Malaysia tentang kerjasama di bidang kebahasaan.

Pada perkembangannya persetujuan kerjasama kebahasaan tersebut akhirnya disahkan melalui penandatangan Komunique Bersama oleh Mashuri Saleh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Encik Hussein Onn selaku Menteri Pelajaran Malaysia pada tanggal 23 Mei 1972 di Jakarta.¹¹ Berdasarkan dokumen Komunique Bersama tersebut ada dua agenda penting yang coba diketengahkan kedua negara saat itu. Salah satu agenda yang dijadikan fokus utama yaitu tentang upaya pengembangan bahasa nasional masing-masing negara yang meliputi ejaan, istilah dan tata bahasa.

Khusus untuk misi pengembangan bahasa nasional tersebut, kedua pemerintah bersepakat untuk melakukan beberapa hal. *Pertama*, melanjutkan agenda pertemuan 27 Juni 1967 yang telah membahas dan mematangkan konsep ejaan yang telah disempurnakan. *Kedua*, meresmikan sekaligus mengumumkan berlakunya ejaan tersebut dengan surat keputusan menteri masing-masing negara pada waktu yang bersamaan. *Ketiga*, membentuk panitia tetap bersama tentang pengembangan bahasa nasional masing-masing yang akan mengadakan pertemuan-pertemuan berkala di kedua negara secara bergilir dan harus bersidang selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1972 di tempat yang ditetapkan bersama.¹²

Dengan pertemuan dan penandatanganan pernyataan bersama ini, maka kerja sama kebahasaan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia

¹¹ Wawancara dengan Harimurti Kridalaksana, Kampus UI Depok, 24 Februari 2012.

¹² Lihat "Persetudjuan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia tentang Kerdjasama di bidang Pendidikan, 23 Mei 1972", dalam Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hal.xxvii.

secara resmi diakui pada tingkat pemerintahan negara. Sejak saat itu kedua negara semakin giat melakukan langkah kerjasama terkait bidang kebahasaan.

3.2. Sejarah Pendirian

Melihat perkembangan yang cukup baik di masing-masing negara dalam ranah kebahasaan, sekaligus sebagai tindak lanjut penandatanganan pernyataan bersama tanggal 23 Mei 1972, maka kedua negara selanjutnya mengadakan pertemuan pada tanggal 20 hingga 22 Juni 1972. Tujuan umum dari pertemuan ini di antaranya: 1) menyempurnakan ejaan yang dipakai di kedua negara berdasarkan pada beragam perkembangan yang terjadi di masing-masing negara; 2) menindaklanjuti agenda pertemuan yang didasarkan pada persetujuan mengenai ejaan bersama yang telah disepakati pada tanggal 27 Juni 1967; dan 3) melakukan tukar pikiran mengenai beragam masalah bersama dalam bidang bahasa secara umum. Tercatat mereka yang terlibat dalam pertemuan itu di antaranya: Lukman Ali, S.Effendi, Djoko Kentjono, Harimurti Kridalaksana, dan B.Suhardi dari Indonesia, Hasan Ahmad, Abdul Rahman bin Arshad, Kamaluddin Muhammad dan Jalal Ahmad bin Abdullah dari Malaysia.¹³

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, pada tanggal 26 hingga 30 Desember 1972 dilaksanakan sidang kebahasaan pertama di antara kedua negara di Malaysia. Dalam sidang pertamanya, masing-masing negara mengirimkan beberapa utusan yang berasal dari berbagai unsur/instansi, utamanya para pakar bahasa. Dari pihak Malaysia, mereka yang terlibat dalam agenda pertemuan itu adalah beberapa orang yang tergabung dalam kelompok Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM), di antaranya: Sujak Rahiman Hasan Ahmad, Mohd. Ghazali Hj. Abdul Rahman, Asmah Haji Omar, Abdullah Hasan, Abdul Rahman Arshad, Kamaluddin Muhammad, Noramly Muslim, Jalal Ahmad Abdullah, Shaharir bin Mohamad Zain, Muhamad Yahaya, Awang Had Salleh, dan Amat Juhari Moain.

Sementara di pihak Indonesia, mereka yang terlibat dalam pertemuan tersebut bergabung dalam sebuah kelompok Panitia Pengembangan Bahasa

¹³ Lihat "Laporan Persidangan antara Panitia Ejaan Bahasa Indonesia dengan Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu, 22 Juni 1972" dalam Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992...* hal.xxix.

Indonesia (PPBI)¹⁴ yang diketuai oleh Amran Halim (Universitas Sriwijaya) dan Anton M. Moeliono (Fakultas Sastra UI) selaku Wakil Ketua. Bertindak sebagai sekretaris panitia adalah Lukman Ali (LBN) dan Harimurti Kridalaksana (Fakultas Sastra UI). Sementara mereka yang tercatat sebagai anggota, di antaranya: Samsuri (IKP Malang), Muljanto Sumardi (IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Djoko Kentjono (Fakultas Sastra UI), S.Effendi (LBN), Andi Hakim Nasution (IPB), H.Johannes (UGM), D.H. Assegaf (Wartawan), Sjahrul Sjarif (Fakultas Sastra Unpad), A.Hadyana Pudjaatmaka (Universitas Parahyangan), Taufik Ismail (Sastrawan), Hazil (IKAPI), Gazali Dunia (PGRI), Baroroh Baried (Fakultas Sastra UGM), Rosihan Anwar (PWI), E. Siswojo (Departemen Penerangan), Basuki Suhardi (Fakultas Sastra UI), S.W. Rudjiati Mulyadi (LBN), dan Hartono Alibasah (Fakultas Kedokteran UI).¹⁵

Adapun dari berbagai bahasan yang mengemuka dalam persidangan, muncul satu kesepakatan untuk membentuk suatu wadah yang dapat menaungi kegiatan kebahasaan di antara kedua negara. Dari sanalah akhirnya muncul ide untuk membentuk suatu majelis tetap bersama bernama Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) yang resmi disepakati keberadaannya pada tanggal 29 Desember 1972.

Dari hasil sidang majelis pertama tersebut, disebutkan bahwa MBIM difungsikan, *pertama*, sebagai suatu badan yang akan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk memikirkan, menelaah, dan memperbincangkan hal-hal bersama di bidang tata bahasa, tata istilah, ejaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan soal-soal kebahasaan di kedua negara. *Kedua*, MBIM juga akan menampung dan menyalurkan bahan-bahan mengenai bahasa dari kedua belah pihak untuk kegunaan dan kajian bersama. *Ketiga*, MBIM akan menyerahkan kepada menteri masing-masing negara seluruh bahan-bahan bahasa yang

¹⁴ Seiring perjalanan waktu, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia (PPBI) dibubarkan karena pada tanggal 17 April 1975 dibentuk pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B) di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0 Tahun 1975. Lihat Sugono, et.al (ed.), *Setengah Abad Kiprah Kebahasaan...* hal.34.

¹⁵ Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hal.251.

menyangkut kepentingan nasional negara masing-masing untuk dipertimbangkan dan diputuskan.¹⁶

Sebagai garis panduan kegiatan, dibuatlah Piagam Kerja Sama Kebahasaan yang ditandatangani oleh Dr. Amran Halim selaku wakil dari Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Datuk Haji Sujak bin Rahiman selaku wakil dari Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia.¹⁷ Secara garis besar, selain tujuan pembentukan dan fungsi MBIM, Piagam Kerja Sama Kebahasaan tersebut juga berisi beberapa hal, di antaranya bahwa MBIM beranggotakan Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Selain itu diputuskan pula bahwa dalam persidangannya yang akan terlaksana sekurang-kurangnya dua kali setahun itu, MBIM harus dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing negara yang telah mendapat mandat dari menteri yang khusus membidangi masalah kebahasaan di masing-masing negara.¹⁸

Lebih jauh, Piagam Kerja Sama Kebahasaan juga berisi perihal tata kerja MBIM. Dalam poin tujuh piagam tersebut disebutkan bahwa tugas Majelis Bahasa dilaksanakan dengan: 1) tukar-menukar bahan; 2) sanggar kerja; dan 3) persetujuan bersama. Untuk tukar-menukar bahan, agenda ini dilakukan melalui proses surat menyurat. Adapun bahan-bahan yang diberikan atau diterima adalah bahwa yang diminta ataupun bahan yang tidak diminta oleh kedua belah pihak. Sementara untuk sanggar kerja yang dihadiri oleh anggota-anggota Majelis Bahasa, agenda ini diselenggarakan dengan maksud untuk bertukar pikiran secara mendalam mengenai sesuatu masalah. Selain itu sanggar kerja juga diarahkan untuk mencapai pendekatan antara kedua belah pihak. Terkait keputusan dari sanggar kerja, hanya akan diumumkan setelah mendapat izin dari Menteri kedua

¹⁶ Lihat “Keputusan Sidang Majelis Ke-1” dalam Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan (MABBIM), Sosok Pokok Tokoh*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hal. 17-19.

¹⁷ Lihat “Laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Ejaan Yang Disempurnakan dalam Sidang Kabinet, 1 Agustus 1972” (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1972).

¹⁸ Lihat “Pernyataan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia, 29 Desember 1972 ” dalam, *Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, Persidangan dan Keputusan 1972-1992*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hal.2-3.

negara. Sedangkan terkait persetujuan bersama, hal ini bersifat politis dan menjadi wewenang dari Menteri masing-masing negara.¹⁹

Berdasarkan piagam yang telah dibuat MBIM selanjutnya melaksanakan beragam program kerja yang umumnya diarahkan guna mengupayakan adanya titik temu di antara kedua bahasa dalam hal ejaan dan peristilahan. Upaya tersebut ditunjang oleh pertemuan rutin, yang dikenal dengan sebutan persidangan majelis, diselenggarakan dua kali setahun—enam bulan sekali— secara bergiliran di kedua negara.

Melihat kronologi pembentukannya, MBIM diprakarsai oleh inisiatif beberapa tokoh—baik kalangan ahli bahasa ataupun kalangan akademisi—dari masing-masing negara. Menurut penjelasan Harimurti Kridalaksana, MBIM terbentuk melalui dua lapis tahap. Tahap pertama dapat disebut sebagai tahap perencanaan/kebijaksanaan, sementara tahap kedua disebut sebagai tahap pelaksanaan.²⁰

Secara umum perbedaan antara tahap perencanaan/kebijaksanaan dengan tahap pelaksanaan adalah bahwa jika yang pertama adalah tahap permulaan yang memungkinkan MBIM dapat terbentuk. Pada tahap perencanaan/kebijaksanaan tokoh-tokoh yang terlibat, baik yang berasal dari Indonesia maupun Malaysia, belum bergerak atas dasar kebijakan negara. Mereka bertemu dan berdiskusi tentang beragam isu seputar tema kebahasaan atas dasar persahabatan yang telah mereka bangun, baik karena mereka pernah menimba ilmu di kampus yang sama ataupun karena memang mereka telah saling mengenal sejak lama. Dalam perkembangannya dari serangkaian pertemuan informal itulah mereka, dengan kapasitasnya masing-masing, menjembatani terjadinya pertemuan formal tingkat negara. Inilah mengapa tahap ini disebut sebagai tahap perencanaan/kebijaksanaan, merencanakan sebuah pertemuan dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya mereka, yang selanjutnya didasarkan atas sebuah kebijakan pemerintah di masing-masing negara. Sedangkan tahap pelaksanaan dalam penelitian ini diartikan sebagai sebuah tahap yang dimulai sejak MBIM resmi diakui keberadaannya oleh kedua negara yaitu sejak bulan Desember 1972.

¹⁹ Lihat “Pernyataan Bersama Menteri Pendidikan,..... hal. 3.

²⁰ Wawancara dengan Harimurti Kridalaksana, Kampus UI Depok, 24 Februari 2012.

Namun penting digarisbawahi bahwa tokoh-tokoh yang terlibat pada tahap perencanaan/kebijaksanaan tetap ikut terlibat dalam tahap pelaksanaan. Sebagai contoh Harimurti Kridalaksana, selain merupakan aktor perencana dia juga terlibat aktif di tahap pelaksanaan yakni sebagai sekretaris perwakilan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa nama, baik yang merupakan tokoh perencana maupun pelaksana MBIM. Bahwa pada masa awal pembentukan dan perkembangan MBIM, tokoh-tokoh inilah yang tercatat memberikan banyak pandangan dan masukan penting terkait perkembangan kebahasaan Indonesia-Malaysia. Bahkan, beberapa sumbangsih pemikiran yang mereka berikan dalam persidangan MBIM, pada gilirannya turut membentuk MBIM menjadi sebuah lembaga kebahasaan yang terhitung efektif di wilayah Asia Tenggara.

3.2.1. Tahap Perencanaan/Kebijaksanaan

Dalam beberapa hal, tahap perencanaan/kebijaksanaan merupakan tahap di mana embrio MBIM terbentuk. Tahap ini ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan awal yang dilakukan secara informal oleh perwakilan kedua negara mulai tahun 1967 hingga tahun 1972.

Menurut Harimurti, pertemuan-pertemuan informal tersebut sangat efektif berjalan karena selain secara pribadi mereka sudah saling mengenal, pertemuan-pertemuan tersebut juga digunakan oleh kedua belah pihak untuk terus memperkuat agenda rujuk akibat konfrontasi yang mereka hadapi. Dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara bergiliran baik di Jakarta maupun di Kuala Lumpur tersebut, dihasilkanlah poin-poin penting terkait formula ideal sebuah forum permanen kedua negara. Beberapa poin itulah yang selanjutnya disampaikan oleh pihak Menteri Pendidikan/Menteri Pelajaran masing-masing negara untuk kemudian dirumuskan dalam sebuah kebijakan.²¹ Adapun mereka yang tercatat terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan awal (tahap perencanaan dan kebijaksanaan) ini di antaranya:²²

²¹ Wawancara dengan Harimurti Kridalaksana, Kampus UI Depok, 24 Februari 2012

²² Beberapa nama tersebut merupakan hasil pengamatan dari Harimurti Kridalaksana yang sudah melibatkan diri dalam agenda pertemuan, baik informal maupun formal, dengan pihak Malaysia sejak tahun 1966. Menurut Kridalaksana, beberapa nama tersebut merupakan kawan-kawannya asal Malaysia yang sangat rajin berkunjung dan berdiskusi dengannya di rentang

1) Lukman Ali

Dikenal sebagai ahli bahasa dan sastra Indonesia, Lukman Ali pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Bahasa menggantikan Prof. Dr. Anton M. Moeliono (1989–1991) dan dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia hingga pensiun 1996. Selain aktif menulis cerita pendek dan berbagai artikel tentang kebahasaan dan kesusastraan, ia juga mengasuh siaran Pembinaan Bahasa Indonesia di TVRI (1980), Komisi Istilah Penasihat Bahasa (1963–1967), Anggota Panitia Ejaan Baru (1967–1970), Anggota Tim Bahasa KOTI G-5 (1967–1968), Ketua Kelompok Teknis Bahasa Pelaksanaan Ejaan yang Disempurnakan (1970–1972), Sekretaris I Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (1972–1980), dan melakukan penataran serta penyuluhan bahasa Indonesia berkeliling ke daerah-daerah bagi pejabat dan umum (1972–1996).

2) Harimurti Kridalaksana

Sampai kini ia masih aktif sebagai Profesor dalam bidang Teori Linguistik dan Bahasa Indonesia. Sebagai seorang pakar sastra Indonesia, ia dipercaya mengajar di beberapa kampus ternama, baik di Indonesia (Jakarta dan Yogyakarta) maupun di mancanegara (Frankfurt, Napoli, Kuala Lumpur dan Bangkok). Selain itu, Harimurti juga pernah menjadi konsultan bahasa Melayu pada Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia, dan konsultan perkamusan dan peristilahan pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Ia menjadi editor *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Kedua* dan *Kamus Mandarin-Indonesia*. Dalam dunia kebahasaan, Harimurti sangat aktif sebagai ahli terminologi hingga sekitar tahun 1980-an dan berusaha mengembangkan wawasan para peneliti Indonesia dalam bidang peristilahan, baik melalui tulisan yang ia buat maupun melalui penelitian yang ia lakukan.

3) Djoko Kentjono

tahun 1966 hingga tahun 1972, era di mana MBIM resmi menjadi forum pertemuan kedua negara. Wawancara dengan Anton Moeliono, Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, 11 Februari 2011.

Djoko Kentjono dikenal sebagai pengajar senior Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (JSI-FIB) Universitas Indonesia yang sangat gigih memperjuangkan terbentuknya ejaan yang disempurnakan (EYD) pada awal 1960-an. Dalam dunia pengajaran bahasa, ia diketahui telah memperkenalkan pengetahuan linguistik modern—khususnya Linguistik Neo-Bloomfield atau Linguistik Pasca Bloomfield—di Universitas Indonesia.

Sebagai pakar bahasa Indonesia, ia telah menghasilkan beberapa karya, seperti: *Dasar-Dasar Linguistik Umum* (Jakarta: Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, 1982), *Tata Bahasa Sekolah Berdasarkan Tata Bahasa Baku* (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), dan *Tata Bahasa Acuan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing*, (Wedatama Widya Sastra, 2004).

4) Hasan Ahmad

Dari Malaysia, Hasan Ahmad merupakan representasi dari mereka yang terlibat dalam tahap perencanaan dan kebijaksanaan MBIM. Hassan Ahmad dipandang sebagai tokoh yang berpengalaman luas dalam pelbagai aspek yang berhubungan dengan penerbitan buku, penelitian, dan perancangan bahasa dan sastra di Malaysia. Sebagai mantan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (1963-1976), ia dianggap telah berhasil mengangkat serta meningkatkan mutu bahasa Melayu sekaligus menjadikan DBP sebagai pusat pengembangan bahasa Melayu yang disegani di dunia. Dengan berbekal pengalamannya yang mumpuni khususnya dalam hal kebahasaan, ia pernah didaulat menjadi Duta Besar dan Wakil Tetap Malaysia ke Unesco di Paris.

Dalam sejarah perkembangan kebahasaan di Malaysia, beliau dikenal sebagai tokoh bahasa dan sastrawan Malaysia yang terlibat menentang dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) (*The Teaching and Learning of Science and Mathematics in English*) di sekolah dasar hingga universitas di Malaysia.

3.2.2. Tahap Pelaksanaan dan Perkembangan

Secara umum, tahap pelaksanaan dan perkembangan dipandang sebagai sebuah tahap yang mulai berjalan setelah kedua negara bersepakat untuk mengadakan pertemuan awal yang lebih formal dan didasarkan pada kebijakan bersama antar kedua negara. Berikut beberapa tokoh yang penting dicatat karena perannya yang cukup penting pada masa-masa awal pelaksanaan dan perkembangan MBIM.²³

Dari pihak Indonesia, beberapa tokoh yang dipandang penting pada masa awal pelaksanaan dan pengembangan MBIM, oleh karena secara aktif telah memberikan beragam masukan seputar bagaimana seharusnya MBIM bekerja dan menjadi sebuah forum ideal bagi kedua negara, di antaranya:²⁴

1) Amran Halim

Ia termasuk tokoh yang terhitung berjasa besar dalam pengembangan bahasa Indonesia. Saat pemerintah menetapkan ejaan resmi bahasa Indonesia yang diberi nama Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) berdasarkan Keputusan Presiden No.67 Tahun 1972, ia dipercaya sebagai Ketua Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia yang dalam sejarahnya berhasil menyusun buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*.

Selain pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Sriwijaya, ia juga pernah menjadi Ketua Majelis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIM), Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (kini Pusat Bahasa), Ketua Dewan

²³ Beberapa nama tersebut merupakan hasil pengamatan dari Anton Moeliono sepanjang keterlibatannya dalam MBIM sejak sidang pertama MBIM tahun 1972 hingga tahun 1980-an. Menurut Moeliono, nama-nama tersebut terlihat sangat aktif dan banyak memberikan masukan bagi perkembangan MBIM di kemudian hari. Wawancara dengan Anton Moeliono, Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, 11 Februari 2011.

²⁴ Profil singkat beberapa tokoh Indonesia yang dibahas dalam bab ini merupakan hasil pengolahan data penulis yang diambil dari beberapa sumber, seperti, Jerome Samuel, *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemodernan Kosakata dan Politik Persitilahan*, (Jakarta: KPG, EFEO, 2008), Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kesan dan Pesan MABBIM: Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Sosok Pokok Tokoh MABBIM, Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), Dr. Raja Masittah Raja Ariffin, *Tokoh Pembinaan Bahasa Melayu Serantau: 35 Tahun MABBIM* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010), Adjat Sakri (ed.), *Ilmuwan dan Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penerbit ITB, 1988).

Pertimbangan Pendidikan Sumatera Selatan, dan Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan.

2) Anton M. Moeliono

Ia dikenal sebagai tokoh paling penting—setelah Alisjahbana—dalam bidang kebijakan kebahasaan dan peristilahan Indonesia. Selain aktif mengajar, ia juga dikenal sebagai akademisi yang mengabdikan pada Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 1960. Pada tahun 1960-1963 dia menjadi Kepala Bidang Perkamusan. Kemudian dia menjadi Ketua Komisi Istilah Seksi Linguistik pada tahun 1962-1967 dan pada tahun 1966-1967 menjadi Wakil Ketua Komisi Istilah.

Pada tahun 1966-1972 dia diangkat menjadi Ketua Panitia Ejaan Baru. Dia menjadi Wakil Ketua Panitia Kerja Sama Kebahasaan pada tahun 1972-1984 dan Ketuanya pada tahun 1984-1989. Sejak tahun 1993 dia menjadi Anggota Panitia Kerja Sama Kebahasaan selain juga sebagai Konsultan Bahasa, khususnya peristilahan.

3) Herman Johannes

Selain pernah dipercaya oleh Presiden Sukarno untuk menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam kabinet Moh. Natsir, ia juga pernah menjadi Rektor UGM. Ia mulai melibatkan diri dalam dunia terminologi setelah pada tahun 1972 terlibat dalam MBIM, tepatnya mulai sidang kedua MBIM di Bogor. Di tahun 1972 pula ia terlihat sangat aktif berpartisipasi dalam agenda pembaruan lembaga-lembaga kebahasaan dan peristilahan Indonesia bersama dengan Lembaga Bahasa Nasional.

Bersama Anton Moeliono, ia menjadi redaktur proyek peristilahan yang kemudian melahirkan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (PUI). Selain itu ia juga duduk dalam Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia hingga tahun 1975. Di rentang tahun 1970-an ia dipercaya memimpin beberapa proyek peristilahan yang umumnya dikerjakan di UGM Yogyakarta. Salah satu proyek pentingnya adalah penyusunan kamus fisika nuklir, hasil kerjasama dengan BATAN dan Departemen Pekerjaan Umum (1971, 1972, 1977).

4) M. Mulyono Purbo-Hadiwidjojo

Ia sebagai seorang geologawan teknik dan penyunting teknik asal Jawa. Selain bertugas sebagai penyunting pada ITB, ia juga bertindak sebagai penasehat untuk pernaskahan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi untuk Geologi Terapan di Direktorat Geologi Tata-Lingkungan. Mulai tahun 1956 ia dipercaya untuk memegang jabatan sebagai sekretaris Seksi Kimia-Farmasi cabang Bandung dan terutama menangani kristalografi dan mineralogi.

Selama sepuluh tahun sejak tahun 1966, ia bekerjasama dengan salah satu seksi Komisi Istilah (KI) untuk menyusun nomenklatur, peristilahan, dan sejumlah pedoman pembentukan istilah kimia dan farmasi. Pekerjaan tersebut berakhir pada tahun 1976 dengan terbitnya *Peristilahan Kimia dan Farmasi* yang sebagian besar disusun oleh Purbo-Hadiwidjojo. Ketika P3B didirikan dan panitia-panitia peristilahan yang baru dibentuk, ia termasuk orang yang diajak serta untuk bergabung dalam P3B dan diberi peran sebagai pakar geologi, kristalografi, mineralogi, petrologi, dan hidrologi.

5) Andi Hakim Nasution

Ia dikenal sebagai Guru Besar Ilmu Statistik dan Genetika Kuantitatif IPB. Di antara beberapa tokoh lain, ia merupakan salah satu peraih anugerah Tokoh Ilmuwan MABBIM (Majelis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia). Di samping aktif sebagai dosen IPB dan Sekretaris Akademi Pertanian Ciawi (1958-1965), ia juga pernah dipercaya sebagai Direktur Pasca Sarjana IPB (1975-1978) sebelum terpilih menjabat Rektor IPB selama dua periode (1978-1987). Selain itu ia juga sempat menjabat Rektor (Ketua) Sekolah Tinggi Telkom Bandung yang berdiri pada 28 September 1990. Lebih jauh, ia juga tercatat sebagai tokoh yang telah berhasil menggalang pendirian Fakultas MIPA di IPB.

6) Liek Wilardjo

Selain sebagai guru besar Fisika di Universitas Kristen Satya Wacana dia juga mengajar program S3 di Universitas Diponegoro. Pernah juga dia menjadi anggota Panel RUT (Riset Unggulan Terpadu) dan ketua Panel RUTI (Riset

Unggulan Terpadu Internasional) di bidang Mikroelektronika dan Teknologi Informasi, Kantor Menristek RI. Sejak tahun 1972 dia aktif terlibat dalam usaha pengembangan dan pembukuan istilah Fisika yang digerakkan oleh Pusat Bahasa. Ia juga mengetuai *Kelompok Filsafat* dalam usaha pembakuan istilah Filsafat. Di Universitas Kristen Satya Wacana, selain pernah diberi amanah sebagai Dekan, ia juga pernah dipercaya sebagai penanggung jawab program Doktor dan terakhir sebagai rektor Universitas Kristen Satya Wacana.

Pada tahun 1960-an, Liek Wilardjo memasukkan masalah bahasa khusus dalam kuliahnya (penulisan teks ilmu dan teknologi, khususnya buku pegangan fisika). Pada saat itu pula ia terlibat dalam proyek peristilahan P3B. Sebagai penanggung jawab seri kamus dasar fisika P3B, ia berpartisipasi aktif dalam pengolahan, penulisan, dan penerbitan semua jilid seri kamus itu.

7) Mien A. Rifai

Ia dikenal sebagai seorang pakar biologi, khususnya dalam bidang taksonomi tumbuhan (botani) Indonesia. Tercatat ia merupakan sedikit orang yang berhasil mempertahankan disertasi doctoral untuk bidang ilmu yang sangat langka bagi orang Indonesia, bahkan di dunia, yaitu mikologi, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang taksonomi jamur.

Pada tahun 1993 karena kepakarannya dalam bidang taksonomi tumbuhan, dia dikukuhkan sebagai Guru Besar Luar Biasa di Universitas Indonesia. Sebagai orang yang menaruh perhatian pada masalah eksploitasi dan konservasi tanaman tropis, ia pernah mencoba menyandingkan kegemarannya pada bahasa dengan kegiatannya sebagai pakar mikologi. Hasilnya pada tahun 1972 ia menyusun kamus mikologi pertama di Indonesia berikut pedoman ringkas yang pemakaiannya.

Dengan karyanya itulah ia menjadi perhatian berbagai kalangan, tak terkecuali para ahli terminologi Lembaga Bahasa Nasional, sehingga sejak tahun 1973 ia selanjutnya dipercaya untuk terlibat aktif sebagai Panitia Pembinaan Bahasa Indonesia pada tahun 1973 dan langsung ditunjuk untuk mengetuai persidangan yang membahas draft “Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan” dan “Pedoman Umum Pembentukan Istilah”. Mulai tahun 1974

ia terlibat aktif dalam kegiatan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM). Sejak tahun 1980 ia diberi kepercayaan untuk mengepalai penyusunan seri kamus ilmiah dasar bidang biologi.

Sementara dari pihak Malaysia, beberapa tokoh yang tercatat memberikan sumbangsih besar dalam tahap pembentukan dan perkembangan MBIM, di antaranya:²⁵

1) **Abdullah Hasan**

Ia dikenal sebagai ahli linguistik Malaysia. Setelah bertugas di Universitas Sains Malaysia (USM) selama 25 tahun, mulai bulan Mei 1972 hingga bulan Maret 1997, ia selanjutnya dipercaya menjadi Profesor Komunikasi, Universitas Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur selama 4 tahun (Juli 1997 hingga Juni 2001). Sejak Juli 2001 Abdullah Hasan menjadi Profesor Bahasa Melayu dan Komunikasi di Fakultas Bahasa, Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjung Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia.

Sebagai tokoh yang menfokuskan diri pada kajian Bahasa Melayu, Perancangan Bahasa, Perkamusan, Terjemahan, Logika Pemikiran serta Etika Komunikasi Interpersonal, ia telah berhasil menulis sekitar 27 karya buku mengenai bahasa, tata bahasa dan linguistik, serta telah menerjemahkan 11 buah buku. Di samping itu, bersama isterinya, Ainon Mohd, Abdullah Hasan telah menghasilkan 10 buku (logika pemikiran), 8 (komunikasi), dan 10 (kamus).

2) **Amat Juhari Moain**

Ia dikenal sebagai ahli linguistik, khususnya bidang Sociolinguistik dan Sejarah bahasa Melayu. Dalam perjuangan bahasa Melayu, ia memperjuangkan

²⁵ Profil singkat beberapa tokoh Malaysia yang dibahas dalam bab ini merupakan hasil pengolahan data penulis yang diambil dari beberapa sumber, seperti, Baharuddin Zainal, dkk., *Wajah: Biografi Seratus Penulis* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981), Ilias Zaidi, *Biografi Penulis dan Karya* (Kuala Lumpur: Fargoes, 1976), Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kesan dan Pesan MABBIM: Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Sosok Pokok Tokoh MABBIM, Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), Dr. Raja Masittah Raja Ariffin, *Tokoh Pembinaan Bahasa Melayu Serantau: 35 Tahun MABBIM* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010).

bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan dan administrasi. Ia adalah ahli seumur hidup Persatuan Penerjemah Malaysia, Persatuan Linguistik Malaysia, Persatuan Wartawan Melayu Malaysia, dan Sahabat Alam Malaysia. Tahun 2004 ia tercatat masih sebagai Presiden Persatuan Penerjemah Malaysia.

3) Asmah Haji Omar

Asmah Haji Omar dikenal sebagai ahli linguistik yang meraih gelar doktor dalam ilmu linguistik dari University of London (1969). Dikenal sebagai wanita Melayu pertama yang mendapat gelar Ph.D di negaranya, Malaysia, Asmah Haji Omar telah menghasilkan lebih dari 40 buah buku yang berkaitan dengan bidang linguistik dan bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lokal. Pada tahun 2000, ia pensiun dari Universitas Malaya dan diberi gelar Profesor Emeritus Dato' Dr. Asmah Hj. Omar oleh universitas yang bersangkutan.

4) Awang Had Salleh

Dikenal sebagai ahli pendidikan dan sosiologi, Awang Had Salleh pernah menjabat sebagai Penasehat Khusus Kementerian Pendidikan Malaysia. Tahun 1974 ia mengajar di Fakultas Pendidikan, Universitas Malaya. Pada 1975 Awang dilantik sebagai Wakil Dekan Urusan Pelajar, Universitas Malaya dan beberapa tahun kemudian dipercaya menjadi Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Malaya hingga tahun 1978. Sejak tahun 1978 ia dipercaya menjadi Direktur Mara Institute of Technology, yang saat ini dikenal sebagai Mara Institute of Technology University (UiTM), hingga tahun 1980.

5) Muhamad Yahaya

Muhammad Yahaya dikenal sebagai ahli fisika. Selain sebagai pensyarah (1973), ia pernah juga menjadi Ketua Komite Terminologi Fisika Antar Universitas (1979). Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Program *Annual Lecture* Fakultas Ungku Omar (1982), Ketua Konferensi Internasional tentang Pengajaran dalam Pendidikan Fisika (1982), Ketua Konferensi Penggunaan Terminologi Sains (1983), Koordinator Komite Terminologi

Jawatankuasa Peristilahan Sains UKM (JAPISUKMA), Jawatankuasa Penyelarasan Istilah (1985-1988), Ketua Komite Terminologi Fisika DBP (1986), Ahli Jawatankuasa Seminar Peristilahan dan Penulisan Sains (1990), dan Presiden Malaysian Solid State Science and Technology Society (1991). Dalam MBIM ia dipercaya sebagai pakar ahli bidang fisika.

6) Shaharir bin Mohamad Zain

Ia dikenal sebagai ahli matematik. Tahun 1974 ia memperoleh gelar Ph.D dari La Trobe University, Australia. Di MBIM ia dipercaya sebagai ketua bagian matematika sejak tahun 1976 hingga 1982. Selain pernah menjadi Presiden ASASI (Akademi Sains Islam Malaysia), ia juga pernah menjadi pengurus Institut Fisika Malaysia (FIFM) sejak 1978, Akademi Sains Malaysia (F.Ac.S.(M)) sejak 1996, Institute of Mathematics and its Applications (IMA), Inggris, sejak 1989. Lebih jauh ia pernah pula ditugaskan sebagai Wakil Naib Canselor (1988-1994), Pengarah, Pusat Pengajian Kuantitatif (1984-1985), dan Ketua Jurusan Matematika, Fakultas Sains (1974-1979). Tahun 1993 ia memperoleh penghargaan sebagai Jaksa Setia Mahkota (1993).

Pada akhirnya kesemua tokoh di atas, baik yang terlibat sebagai tokoh perencana maupun tokoh pelaksana MBIM, menurut hemat penulis, penting untuk disebutkan dalam bab ini karena atas jasa merekalah MBIM menjadi dimungkinkan terbentuk dan berkembang sebagai sebuah forum kerjasama kebahasaan yang efektif dan menghasilkan banyak manfaat, baik bagi Indonesia maupun Malaysia.

3.3. Struktur Kelembagaan dan Cara Kerja

Pada tingkat kelembagaan terdapat dua badan dan dua jenis sidang yang diselenggarakan secara bergiliran oleh negara-negara anggota MBIM. Kedua badan itu adalah Kelompok Eksekutif dan Kelompok Pakar. Kelompok Eksekutif bertemu pada Sidang Pleno MBIM atau Sidang Majelis yang terdiri dari wakil-wakil komisi istilah nasional dan orang-orang yang dinilai perlu untuk dimintai pendapatnya, di antaranya pakar bidang. Sidang ini menetapkan program MBIM, meletakkan dasar-dasar sarana kerja, seperti pedoman, dan mengesahkan

peristilahan yang sudah didiskusikan oleh para pakar. Sidang yang berlangsung tiga hari ini juga memecahkan masalah-masalah yang tidak dapat disepakati oleh para pakar.

Jumlah Kelompok Pakar sama banyaknya dengan bidang atau sub-bidang yang digarap. Selama berlangsungnya Sidang Kelompok Peristilahan atau Sidang [kelompok] Pakar, setiap kelompok beranggotakan dua pakar per bidang dan per negara serta seorang ahli terminologi yang disediakan oleh lembaga penyelenggara, kelompok pakar memberi saran kepada Kelompok Eksekutif, menyelesaikan pedoman peristilahan dan mengajukan pendapat tentang daftar-daftar istilah yang akan diselaraskan. Penyelarasan setiap bidang harus diselesaikan dalam maksimum dua sesi, setiap sesi berlangsung lima hari.

Sebagai contoh dalam proses penyelarasan istilah. Inti penyelarasan berada di tangan Kelompok Pakar dan Kelompok Eksekutif. Dalam setiap subbidang, masing-masing pihak bekerja menyusun padanan berdasarkan sebuah daftar istilah berbahasa Inggris yang sama. Kemudian, masing-masing pihak saling mengonfrontasikan pilihan mereka. Jika ternyata pilihan berbeda, mereka akan berusaha menemukan solusi bersama, atau kalau pun tidak berhasil, sedapat mungkin mengurangi perbedaan. Para ahli terminologi bertemu bergiliran di masing-masing negara. Hanya beberapa hari mereka harus memutuskan nasib istilah-istilah dan padanannya yang jumlahnya antara beberapa ratus sampai beberapa ribu per sesi dan per subbidang.²⁶

Terkait cara kerja MBIM dan khususnya proses untuk mencapai keputusan akhir (penetapan bidang garapan) sampai produk akhir (publikasi kamus khusus bidang bersangkutan) umumnya dilakukan dalam sidang majelis. Tugas pada tahap awal dilaksanakan oleh panitia dan jawatankuasa nasional yang relatif bekerja mandiri, karena kadang-kadang dilakukan pembagian tugas dalam berbagai bidang ilmu. Misalnya dalam Kimia Terapan, Indonesia bertugas menggarap Industri dan Lingkungan Hidup, sementara Malaysia bertugas menggarap Pertanian dan Agroindustri.²⁷

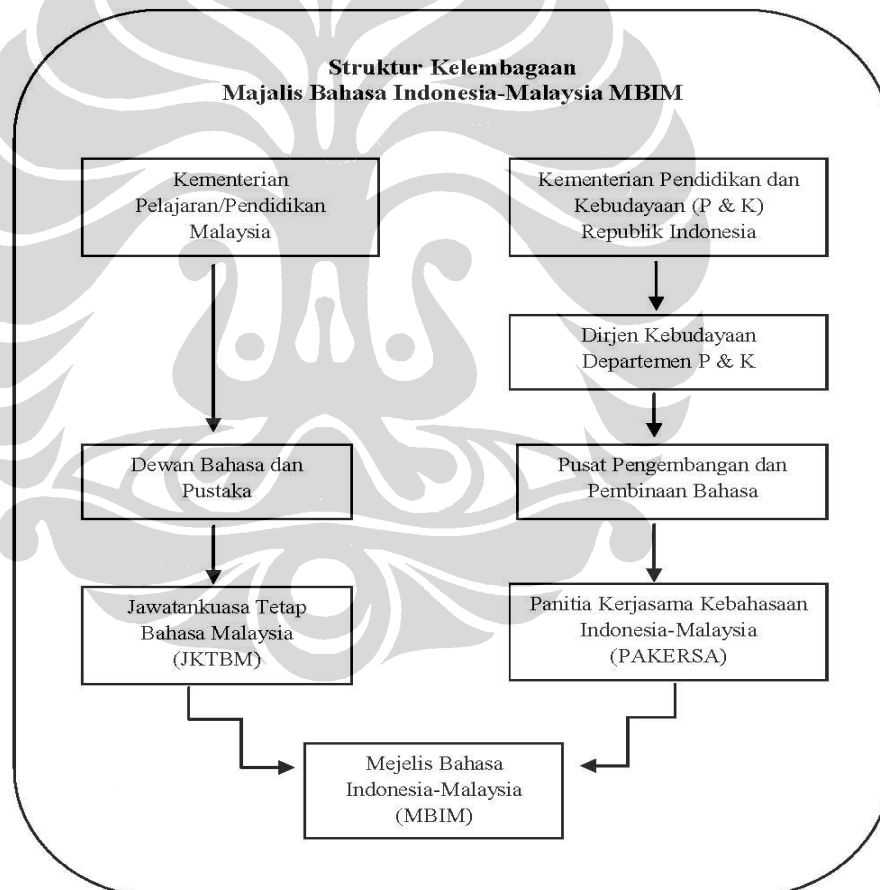
Masing-masing panitia dan jawatankuasa tetap berhubungan dengan mitra dari negara lain karena dokumen yang digunakan (taksonomi, daftar

²⁶ Samuel, *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia*,...hal.380-382.

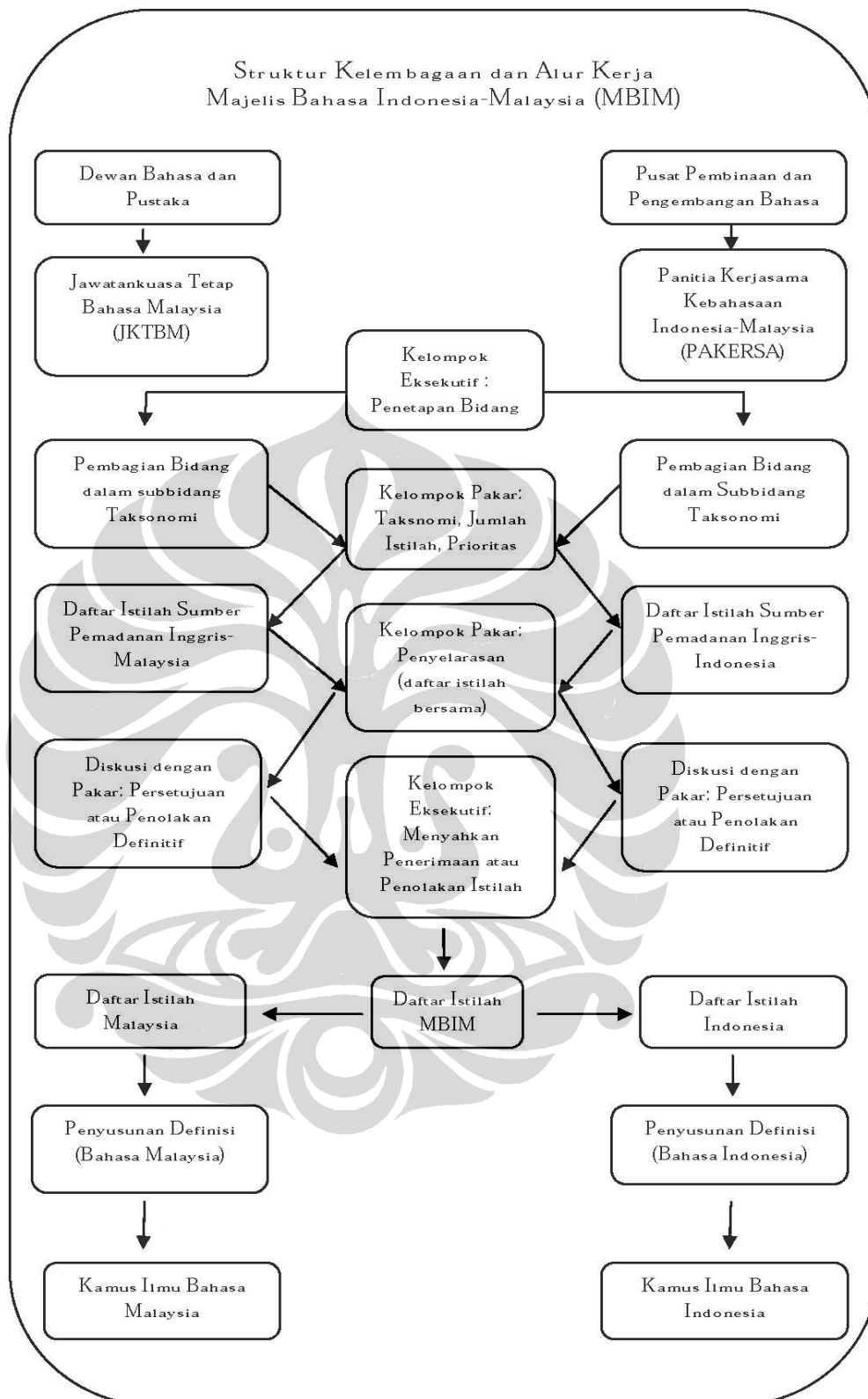
²⁷ Samuel, *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia*,...hal.379.

istilah) beredar di antara mereka. Pada tahap-tahap akhir, yaitu penulisan definisi untuk penerbitan kamus, MBIM tidak mempunyai wewenang lagi dan nasib daftar istilah yang sudah ditetapkan oleh Kelompok Eksekutif pun lepas dari pengawasan mereka. Para ahli terminologi diharapkan bekerja berdasarkan sebuah daftar istilah dwibahasa yang telah disusun bersama dan MBIM menganjurkan untuk menulis definisi dalam bahasa Indonesia atau Malaysia berdasarkan kamus acuan berbahasa Inggris yang digunakan bersama. Sementara itu, keputusan penerbitan bergantung pada prioritas nasional dan tunduk pada ketersediaan dana masing-masing lembaga.

Secara umum, struktur kelembagaan MBIM dapat dilihat dari bagan berikut:



Sementara untuk alur kerja MBIM dalam proses penciptaan istilah adalah sebagai berikut:



BAB IV

DINAMIKA PERKEMBANGAN MBIM

Bab ini akan membahas secara umum dinamika perkembangan MBIM, sejak kerjasama ini diresmikan keberadaannya tahun 1972 hingga tahun 1985. Selain akan mendedah perihal kronologi persidangan MBIM termasuk tempat dan waktu pelaksanaan persidangan, bab ini juga akan memaparkan beberapa hasil yang dimunculkan dari serangkaian forum MBIM, baik dalam hal ejaan maupun dalam hal peristilahan yang selanjutnya menjadi pedoman bagi kedua negara. Di akhir bab akan dipaparkan sejumlah catatan penting yang disampaikan oleh para pelaku kerjasama yang terlibat dalam serangkaian persidangan MBIM selama rentang tahun 1972 hingga 1985.

4.1. Kronologi Persidangan MBIM

Dalam sejarahnya, kerjasama kebahasaan (MBIM) tercatat menjadi salah satu media paling efektif dalam proses penciptaan suasana harmonis di antara Indonesia dan Malaysia. Awang Had Salleh misalnya, meyakini bahwa MBIM merupakan model kerjasama kebahasaan yang unik dan tidak terdapat di wilayah lain di dunia. MBIM dalam pengamatannya merupakan sebuah cerminan tentang bagaimana sebuah rantau budaya bahasa yang terpisah baik oleh kolonialisme maupun oleh sebab pertikaian politik, dapat bersatu kembali melalui sebuah komitmen bersama yang sepenuhnya didorong oleh adanya kesamaan misi.¹

Sejak didirikan tahun 1972 hingga tahun 1985,² MBIM telah melaksanakan persidangan sebanyak 23 kali.³ Persidangan tersebut diadakan

¹ Awang Had Salleh, "Kesan dan Pengalaman dengan MBIM/MABBIM", dalam Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan (MABBIM), Sosok Pokok Tokoh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hal.39.

² Dalam perkembangannya Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota Majelis ini pada 4 November 1985. Sejak saat itu, MBIM berubah nama menjadi Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM). Sebagai sebuah badan kebahasaan serantau yang beranggotakan tiga negara, yaitu: Dewan Bahasa dan Pustaka(Brunei Darussalam), Pusat Bahasa (Indonesia), dan Dewan Bahasa dan Pustaka(Malaysia), majelis ini dibentuk untuk merancang dan memantau perkembangan bahasa Melayu/Indonesia di negara-negara serumpun tersebut. Tentang perjalanan awal MABBIM, lihat misalnya, Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Sosok Pokok Tokoh MABBIM, Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), Dr. Raja Masittah Raja Ariffin, *Tokoh Pembinaan Bahasa Melayu Serantau: 35 Tahun MABBIM* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010).

secara bergantian di masing-masing negara, dan biasanya—meskipun tak selalu—dilaksanakan dua kali setahun.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pesidangan MBIM (1972-1985)

Persidangan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Pertama	26-29 Desember 1972	Kuala Lumpur, Malaysia
Kedua	12-14 Agustus 1973	Puncak Pass, Bogor, Indonesia
Ketiga	3-5 Desember 1973	Pulau Pinang, Malaysia
Keempat	24-26 Januari 1974	Semarang, Indonesia
Kelima	2-4 Desember 1974	Johor Bahru, Malaysia
Keenam	14-18 Desember 1975	Jakarta, Indonesia
Ketujuh	4-9 Februari 1976	Kuala Lumpur, Malaysia
Kedelapan	9-13 Agustus 1976	Cisarua, Bogor, Indonesia
Kesembilan	22-26 Februari 1977	Kuantan-Pahang, Malaysia
Kesepuluh	2-8 Oktober 1977	Jakarta, Indonesia
Kesebelas	13-18 Maret 1978	Kuala Lumpur, Malaysia
Kedua Belas	14-20 November 1978	Jakarta, Indonesia
Ketiga Belas	3-7 September 1979	Melaka, Malaysia
Keempat Belas	10-14 Maret 1980	Denpasar, Bali, Indonesia
Kelima Belas	2-6 September 1980	Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Keenam Belas	16-20 Maret 1981	Yogyakarta, Indonesia
Ketujuh Belas	24-29 Agustus 1981	Kuala Lumpur, Malaysia
Kedelapan Belas	29 Maret-3 April 1982	Palembang, Sumatera
Kesembilan Belas	8-12 November 1982	Kuala Lumpur, Malaysia
Kedua Puluh	25-30 Juli 1983	Jakarta, Indonesia
Kedua Puluh Satu	16-20 April 1984	Kuala Lumpur, Malaysia
Kedua Puluh Dua	29 Okt - 2 Nov 1984	Jakarta, Indonesia
Kedua Puluh Tiga	25-29 Maret 1985	Kuala Lumpur, Malaysia

³ Lihat *Daftar Kumulatif Istilah: Hasil Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia, 1974-1981*, Volume 1 dan 2 (Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), atau lihat *Daftar Istilah MBIM (Hasil Sidang 7-23 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia) 1974-1985: Istilah Sumber-Istilah Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986).

Dalam sejarahnya, sidang kedua puluh tiga menjadi sidang terakhir dalam masa kepengurusan MBIM. Sejak saat itu tepatnya 4 November 1985, Brunei Darussalam menyatakan diri untuk bergabung menjadi anggota Majelis ini. Dengan keikutsertaan Brunei Darussalam, MBIM selanjutnya berubah nama menjadi Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM), sebuah badan kebahasaan serantau yang beranggotakan tidak hanya Indonesia dan Malaysia, tapi juga Brunei Darussalam. Namun, sama halnya seperti MBIM, majelis ini juga difungsikan untuk merancang dan memantau perkembangan bahasa Melayu, baik di Indonesia, Malaysia maupun Brunei Darussalam.

4.2. Memperkuat Sistem Ejaan: Misi Awal MBIM

Terkait hasil dan keputusan yang didapatkan dari rangkaian sidang MBIM, pada sidang pertamanya, MBIM menghasilkan Keputusan Bersama antara Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia (PPBI) dengan Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM) terkait fungsi, keanggotaan, waktu dan tempat persidangan, serta tata kerja MBIM. Sementara dalam sidang-sidang selanjutnya, MBIM lebih menfokuskan pada pembahasan-pembahasan seputar pentingnya menyusun pedoman ejaan lengkap dan pedoman pembentukan istilah yang nantinya akan berlaku di negara masing-masing.

Terkait ejaan, sidang kedua MBIM (Agustus 1973) memutuskan beberapa hal, *pertama*, untuk penulisan kata ulang disetujui bahwa kata ulang ditulis secara penuh. *Kedua*, berkenaan dengan cara menulis penomoran disepakati bahwa kedua belah pihak untuk sementara tetap menggunakan cara masing-masing dalam menunjukkan decimal, ribuan, jurtaan, dan seterusnya. *Ketiga*, disepakati bahwa kata “keluar” sebagai kata kerja ditulis serangkai, sedangkan “ke” sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selain itu kata depan “di” ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. *Keempat*, disetujui bahwa partikel “pun” ditulis terpisah dari pada kata yang mendahuluinya kecuali dalam kata-kata hubung, seperti: walaupun, meskipun, sekalipun, adapun, maupun, kalaupun, biarpun, dan andaipun.⁴

⁴ Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hal.6.

Sedangkan pada sidang ketiga MBIM (Desember 1973) dihasilkan beberapa keputusan, *pertama*, terkait daftar ejaan kata-kata bahasa Indonesia-Malaysia, disepakati bahwa kata-kata yang mempunyai variasi sejarah di masing-masing pihak ditulis seperti yang telah dilazimkan. Contohnya, ais/es, ajutan/ajudan, aktiviti/aktivitas, algebra/aljabar, dan amatur/amatir. Selain itu diputuskan pula bahwa beberapa kata dieja sama, baik di Indonesia maupun di Malaysia, seperti contohnya: abaka, abakus, agenda, akikah, akordion, akta, akuarium, alarm, alif, ambulans, amfibia, analogi, dan andika. *Kedua*, tentang penulisan nama-nama tempat kedua belah pihak bersepakat untuk mengekalkan nama-nama yang telah lazim digunakan di masing-masing pihak, kecuali sekiranya diubah oleh negara terkait. Misalnya, penulisan negara Jepang (Indonesia) atau Jepun (Malaysia), akan tetap dipertahankan, dan tidak perlu dirubah menjadi Japan ataupun Nippon. Atau Sri Lanka akan tetap ditulis Sri Langka bukan Ceylon ataupun Sailan.⁵

Pada sidang keempat MBIM (Juni 1974), diputuskan bahwa terkait masalah nama-nama geografis dunia kedua belah pihak bersepakat untuk memperhatikan ketentuan dari International Geographic Union dalam menulis nama-nama geografis. Penting dicatat bahwa pada sidang keempat ini pula Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan mulai menjadi pembahasan utama. Saat itu majlis sidang menerima Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan sebagai dasar pedoman ejaan lengkap bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia dengan ketentuan bahwa Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu akan membuat versi pedoman ejaan lengkap bahasa Melayu sementara Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia akan membuat versi pedoman ejaan lengkap untuk bahasa Indonesia. Versi-versi tersebut sedianya akan dipertukarkan sekaligus didiskusikan pada bulan Agustus 1974.⁶ Namun agenda tersebut baru terealisasi pada bulan Desember 1974 ketika kedua belah pihak bertemu dalam sidang MBIM kelima.

Selain mendiskusikan pedoman ejaan versi masing-masing negara sidang kelima (Desember 1974) juga memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan

⁵ Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*,...hal. 17.

⁶ Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*,...hal. 22.

penulisan gabungan kata. Tentang ini kedua belah pihak menyetujui bahwa bentuk kata yang dasarnya terdiri atas dua morfem bebas atau lebih yang berlainan yang bergabung secara langsung atau dengan menggunakan imbuhan, ditulis serangkai. Contohnya, matahari, bumiputra, disalahtempatkan, bermaharajalela (Malaysia), merajalela (Indonesia). Lebih jauh kedua belah pihak juga menyepakati keputusan terkait pentingnya mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk dan kata ulang/kata gandaan.⁷

Hingga sidangnya yang kelima, tampak bahwa MBIM sepenuhnya berupaya memfokuskan diri pada agenda penyempurnaan dan memperkuat penggunaan sistem ejaan, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Hasilnya pada sidang keenam (Juli 1975), MBIM menerima dan mengesahkan draf Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan serta draf Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu.⁸ Maka setelah mempunyai pegangan utama dalam hal ejaan kedua belah pihak mulai mengalihkan fokus persidangan pada persoalan peristilahan. Sejatinya, persoalan peristilahan telah dibahas sejak awal berdirinya MBIM. Hanya saja porsi pembahasannya memang sangat minim mengingat misi awal MBIM adalah memperkuat sistem ejaan kedua negara.

Karena itulah seiring dihasilkannya draft *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu* pada sidang MBIM keenam yang berlangsung pada 14 hingga 18 Juli 1975 di Jakarta,⁹ kedua belah pihak bersepakat untuk mulai memperbincangkan beragam hal terkait persoalan peristilahan secara lebih menyeluruh. Demikainlah, pada sidang-sidang MBIM berikutnya tampak bahwa dibanding masalah ejaan, aspek peristilahan lebih menjadi pusat perhatian MBIM. Para pemimpin MBIM menyadari bahwa kebijakan peristilahan yang dilakukan di masing-masing negara sangat jauh dari berhasil dan terutama bahwa kebijakan itu tidak memungkinkan untuk

⁷ Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*,...hal. 30-31.

⁸ Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*,...hal. 36.

⁹ Di Malaysia, hasil sidang tersebut disebarluaskan melalui buku *Pedoman Umum Bahasa Malaysia* pada bulan Agustus 1975, sementara di Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B) menerbitkan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (PUEBIYD) yang diresmikan penggunaannya melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975 No. 0196/U/1975.

melengkapi bahasa Indonesia ataupun bahasa Malaysia dengan peristilahan secara memuaskan.

4.3. Hasil Sidang MBIM dalam Bidang Peristilahan

Pembahasan atas persoalan peristilahan mulai menguat pada sidang ketujuh MBIM di Kuala Lumpur, 4-9 Februari 1976. Saat itu kedua belah pihak bersepakat untuk secara khusus mengarahkan pembahasan pada bidang peristilahan, dalam hal ini yang berkaitan dengan peristilahan bidang ilmu. Untuk tujuan tersebut, seperti terjelaskan dalam “Pernyataan Bersama untuk Sidang Ketujuh” disetujuiilah beberapa peristilahan bidang ilmu, yaitu: 1) Linguistik; 2) Kesusasteraan; 3) Pendidikan; 4) Teknik Sipil; 5) Pertanian-Kehutanan; dan 6) Fisika, Matematika, Biologi. Beberapa bidang tersebut penting menjadi fokus perhatian mengingat kesemua bidang tersebut merupakan bidang yang sangat dibutuhkan pada peringkat pendidikan tinggi.¹⁰

Terkait buku rujukan yang digunakan, pada sidang ketujuh itulah disepakati bahwa untuk peristilahan bidang linguistik buku yang menjadi rujukan utama adalah *Dictionary of Language and Linguistics* karya R.R.K. Hartman & F.C. Stork (Applied Science Publisher Ltd., London, 1971). Sementara untuk bidang kesusasteraan buku yang dijadikan rujukan adalah *A Glossary of Literary* karya M.H. Abrams (Holt Rinehard and Winston, Inc. 1971). Sumber rujukan lainnya adalah *Dictionary of Word Literature* karya Joseph T. Shipley (1960) serta sebuah karya yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa Pustaka berjudul *Istilah Kesusasteraan* (1972).

Untuk peristilahan bidang pendidikan, kedua belah pihak bersepakat untuk menjadikan buku *Learning to Be* Unesco, (1973) dan *Dictionary of Education* karya Carter V. Good (1973) sebagai buku rujukan. Sementara *A Dictionary of Civil Engineering* karya John S.Scott (Penguin, 1965) dan *Chambers Dictionary of Science and Technology* yang disunting oleh T.C. Collocott (W.&R Chambers Ltd., 1971) ditetapkan sebagai rujukan dalam peristilahan bidang teknik sipil. Terkait peristilahan bidang pertanian-kehutanan, kedua belah pihak menyepakati

¹⁰ Dedi Puryadi, *Perkembangan Peristilahan dalam Bahasa Indonesia: Sejarah, Hasil, dan Pemasyarakatan*, Disertasi, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, 2006, hal.70.

penggunaan buku, seperti *Istilah Kajihayat, Perhutanan dan Pertanian* (DBP, 1968), *Dictionary of Biological Terms* karya I.F. Henderson & W.D. Henderson (Oliver and Boyd Ltd, Edinburgh, 1967), serta *Agricultural Engineering, A Dictionary and Handbook* karya Arthur W. Farral (The Interstate Printers & Publisher Inc., 1965) sebagai sumber rujukan utama.¹¹

Perluasan peristilahan terjadi pada sidang-sidang berikutnya. Di sidangnya yang kedelapan (1976) dan kesembilan (1977) kedua negara bersepakat untuk memasukkan peristilahan di bidang agama sebagai materi persidangan. Sementara pada sidang kesepuluh (1977), kesebelas (1978) dan kedua belas (1978) pembahasan atas bidang peristilahan diperluas. Sebagai tambahan masuk pembahasan tentang peristilahan di bidang kesehatan, ekonomi, dan olah raga, komunikasi, manajemen, psikologi.¹²

Seiring waktu, gagasan untuk merencanakan tambahan bidang-bidang garapan terus berkembang dan pada tahun 1980 berhasil disusun sebuah rencana tiga tahun (sidang kelima belas hingga kedua puluh). Rencana itu dalam batas tertentu terlibat begitu ambisius dari segi bidang garapan, pun tanpa arah yang jelas. Dan pada akhirnya, mendekati berakhirnya rencana tersebut tepatnya pada sidang kedelapanbelas (April 1982) para pakar terminologi dan perencana bahasa yang menyadari adanya fondasi peristilahan dasar yang sama dalam banyak bidang garapan, memutuskan untuk mengubah kebijakan mereka:

"(...) mempertimbangkan bahwa berbagai bidang pengetahuan, seperti Kedokteran, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknologi Makanan, dan Ilmu Kependudukan, yang tata istilahnya sudah mulai disusun, memerlukan sandaran ilmu pengetahuan dasar yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (Matematika/Matematik, Fisika/Fizik, Biologi, dan Kimia), dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Majelis bersetuju mengikutsertakan lagi keempat bidang ilmu pengetahuan dasar itu agar dalam jangka waktu lima tahun [1983-1988] dapat diperoleh kumpulan istilah ilmu-ilmu pengetahuan itu secara lebih mantap yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan istilah berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi."¹³

¹¹ Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*,...hal.41-44.

¹² Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*,...hal.62.

¹³ Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Sosok Pokok Tokoh MABBIM, Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hal.31.

Gagasan untuk memrioritaskan peristilahan dasar bidang-bidang tertentu bukanlah kebijakan yang benar-benar baru. Kebijakan tersebut misalnya sudah dinyatakan pada Sidang kesebelas (Maret 1978). Yang baru adalah ketatnya pembatasan bidang-bidang peristilahan. Mulai tahun berikutnya, MBIM tidak lagi melakukan kerja serabutan seperti sebelumnya dan mengimbuu lembaga-lembaga nasional melipatgandakan pertemuan pakar di negara masing-masing demi menyusun dan membatasi subbidang dari keempat bidang dasar seperti yang diputuskan pada sidang kedua puluh (Juli 1983). Dengan keputusan tersebut sejak bulan November 1985 tepatnya sidang kedua puluh tiga dimulailah proses penyusunan peristilahan dasar.¹⁴

Demikianlah, dalam gerak lajunya selama 14 tahun MBIM mampu memberikan sumbangan yang cukup besar dalam aspek peristilahan, khususnya dalam hal peristilahan bahasa Melayu. Tercatat sudah 66.460 istilah Melayu dibakukan oleh Majelis ini mulai dari bidang sains, ekonomi, pertanian, dan beberapa bidang lain yang keseluruhannya berjumlah 32 bidang ilmu. Pembakuan istilah tersebut umumnya disebarluaskan melalui penerbitan kamus-kamus (kamus ilmu dasar) dalam berbagai bidang yang disetujui penyebarannya dalam setiap persidangan yang mereka laksanakan.

Dari Bibliografi yang disusun oleh Tim Pusat Bahasa, Jakarta, dan keseluruhan koleksi Perpustakaan Nasional Malaysia, tampak bahwa pada setiap tahunnya, sejak MBIM mulai mengadakan pertemuan, selalu muncul kamus ataupun daftar istilah dari berbagai bidang yang sebagiannya merupakan kumpulan keputusan persidangan atau setidaknya telah disetujui penggunaannya oleh MBIM. Umumnya, pihak yang menerbitkan kamus ataupun daftar istilah tersebut yaitu Pusat Pengembangan Bahasa Jakarta di Indonesia dan Dewan Bahasa dan Pustaka di Malaysia.

Terkait hasil terbitan kedua lembaga tersebut, tahun 1978 misalnya, Pusat Pengembangan Bahasa, Jakarta berhasil menerbitkan beberapa buah kamus dan daftar istilah, di antaranya: 1) A. Amiruddin (et.al), *Daftar Istilah Kimia Organik: Asing-Indonesia; Indonesia-Asing*; 2) A. Amiruddin (et.al), *Kamus Kimia Organik*; 3) Mien A Rifai, *Kamus Mikologi: Asing-Indonesia*; dan 4) Yuswardi

¹⁴ Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*,...hal.158.

Saliya (et.al), *Daftar Istilah Arsitektur: Asing-Indonesia; Indonesia-Asing*. Sementara pada tahun yang sama, Dewan Bahasa dan Pustaka juga menerbitkan, “*Daftar Istilah Asas (Ilmu) Matematik yang telah Diluluskan oleh Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia*” yang disusun oleh Bagian Peristilahan, Divisi Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia.

Pada tahun 1979 Pusat Pengembangan Bahasa, Jakarta menerbitkan sepuluh buah kamus, di antaranya: 1) Achmad Baihaki (et.al), *Daftar Istilah Pertanian, Indonesia-Asing*; 2) Achmad Baihaki (et.al), *Daftar Istilah Pertanian, Asing-Indonesia*; 3) Onong Uchjana Effendy (et.al), *Daftar Istilah Komunikasi: Asing-Indonesia; Indonesia-Asing*; 4) Fuad Hasan (et.al), *Daftar Istilah Psikologi: Asing-Indonesia; Indonesia-Asing*; 5) Harimurti Kridalaksana, *Daftar Istilah Linguistik: Asing-Indonesia*; 6) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Daftar Istilah Administrasi*; 7) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Daftar Istilah Fisika; Asing-Indonesia; Indonesia-Asing*; 8) Mien A Rifai, *Daftar Istilah Biologi: Asing-Indonesia; Indonesia-Asing*; 9) Rachmat Santosa (et.al), *Daftar Istilah Anatomi; Asing-Indonesia; Indonesia-Asing*; dan 10) Mulyono Tjokrodikarno (et.al), *Daftar Istilah Geografi: Asing-Indonesia; Indonesia-Asing*. Kesemuanya diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Bahasa, Jakarta. Sedangkan pada tahun 1980, Bagian Pelaksanaan Bahasa Kebangsaan, Divisi Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia, berhasil menerbitkan, *Daftar Istilah Kemineralan Hasil Sidang Keempat Belas Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (abjad A-Z)*.

Pada tahun 1981 Pusat Pengembangan Bahasa, Jakarta menerbitkan empat buah kamus istilah, di antaranya: 1) Ayatrohaedi (et.al), *Kamus Istilah Arkeologi*; 2) Mulyo Hadisoewoyo, *Kamus Istilah Kimia Analitik; Indonesia-Asing*; 3) Fuad Hasan, *Kamus Istilah Psikologi*; dan 4) Samsuri, *Kamus Istilah Linguistik Transformasi*. Sedangkan pada tahun yang sama, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia menerbitkan tiga daftar istilah, di antaranya: *Daftar Istilah Sosiologi: Hasil Sidang Keempat Belas Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (abjad A-L)*; *Daftar Istilah Antropologi: Hasil Sidang Keempat belas Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (abjad A-Y)*; dan *Daftar Istilah Statistik: Hasil Sidang Keempat Belas Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (abjad A-W)*. Ketiga daftar

istilah ini disusun oleh Bagian Pelaksanaan Bahasa Kebangsaan, Divisi Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia.

Pada tahun 1982, selain berhasil menerbitkan *Kamus Istilah Hidrologi*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia, juga menerbitkan *Senarai Istilah Sosiologi: Hasil Sidang Kelima Belas Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (Abjad A-Z)*. Sementara pada tahun 1983 *Kamus Istilah Geologi dan Geografi* yang disusun oleh Mulyono Tjokrodikarno (et.al) dan diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Bahasa, menjadi satu-satunya kamus yang muncul sebagai lanjutan dari beragam hasil kerja MBIM.

Tahun 1984 Pusat Pengembangan Bahasa, Jakarta berhasil menerbitkan delapan buah kamus dan daftar istilah yang merupakan hasil kerja MBIM, di antaranya: 1) Barizi (et.al), *Kamus Istilah Statistik*; 2) Koentjaraningrat (et.al), *Kamus Istilah Antropologi*; 3) J.S. Lien, *Kamus Istilah Pertanian*; 4) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Daftar Istilah Warna*; 5) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Daftar Istilah Administrasi*; 6) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Daftar Istilah Fisika: Asing-Indonesia; Indonesia-Asing*; 7) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Istilah Hidrogeologi: Bahasa Inggris- Bahasa Indonesia*; dan 8) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Istilah Ekonomi*.

Pada tahun 1985 hasil kerja MBIM semakin tampak menguat. Hal ini dapat dilihat setidaknya dari dihasilkannya banyak kamus dan daftar istilah dalam bidang-bidang yang lebih luas. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, tahun 1985 tampaknya MBIM semakin matang sebagai sebuah forum pertemuan para ahli bahasa. Karenanya, tak mengherankan jika banyak pula kamus dan daftar istilah yang dihasilkannya. Beberapa kamus dan daftar istilah yang tercatat berhasil diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Bahasa, Jakarta, di antaranya: 1) Rukmana Amanwinata (et.al), *Kamus Istilah Tata Negara*; 2) Triadi Basuki (et.al), *Kamus Istilah Biologi untuk Pelajar*; 3) Ramli Harun (et.al), *Kamus Istilah Tasawuf*; 4) Moh. Bambang Lesmono (et.al), *Kamus Istilah Kosmetika*; 5) Jahja Muhaimin (et.al), *Kamus Istilah Politik*; 6) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Daftar Kumulatif Istilah: Hasil Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia 1974-1981*; 7) Ramli Rusli (et.al), *Kamus Istilah Administrasi Niaga*; 8) Soenarjo

Sastrohadinoto (et.al), *Kamus Istilah Zoologi*; 9) Achman Samin Siregar (et.al), *Kamus Istilah Seni Drama*; 10) Rozak B Soetjipto (et.al), *Kamus Istilah Teknologi Mineral*; 11) Adi Sudono (et.al), *Kamus Istilah Peternakan*; 12) Sugiono (et.al), *Kamus Istilah Perkapalan*; 13) Surjatno (et.al), *Kamus Istilah Pariwisata*; 14) Soemardjo Tjitosidojo (et.al), *Kamus Istilah Akuntansi*; 15) Soerjadi Wirjohamidjojo (et.al), *Kamus Istilah Meteorologi*; dan 16) Kartomo Wirosuhardjo (et.al), *Kamus Istilah Demografi*.

Sementara, baru setahun kemudian tepatnya tahun 1986, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia, merangkum keseluruhan hasil istilah yang muncul sepanjang perjalanan MBIM, khususnya dimulai sejak sidang ketujuh, dalam sebuah terbitan berjudul, *Daftar Istilah MBIM (Hasil Sidang ke 7-23 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia, 1974-1985); Istilah Sumber- Istilah Malaysia*.

Dari paparan di atas, meskipun data menjelaskan perihal banyaknya kamus dan daftar istilah yang dihasilkan dari rangkaian persidangan MBIM selama sebelas tahun (1974-1985), namun penting digarisbawahi bahwa pada masa awal kerjanya, MBIM sejatinya tidak menentukan kategori, sehingga istilah yang dihasilkan seringkali bersifat umum.

Untuk lebih mempermudah proses evaluasi kebahasaan bagi kedua negara, tepatnya pada sidang MBIM kedua belas (14-20 November 1978) disepakati untuk membuat kategorisasi istilah seperti berikut:¹⁵

- Kategori A: *Istilah yang disetujui sama seluruhnya*, dari segi kata dasar, ejaan, dan imbuhan. Contoh istilah untuk kategori ini adalah *bunching index* (bidang pendidikan). Baik di Indonesia maupun di Malaysia, istilah ini diartikan dengan “indeks penumpukan”. Arti yang sama juga digunakan oleh MBIM. Istilah lain adalah *life span*. Baik Indonesia maupun di Malaysia, termasuk MBIM, mengartikan istilah ini dengan “jangka hayat”.
- Kategori B: *Istilah yang disetujui sama, tetapi berbeda sebagian*, dari segi ejaan atau morfologi (bentuk). Contoh istilah untuk kategori ini adalah

¹⁵ Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*,...hal. 65-67.

birth spacing (bidang kependudukan). Di Malaysia, istilah ini diartikan dengan “penjarakan kelahiran”, sedangkan di Indonesia diartikan dengan “penjarangan kelahiran”. Istilah lain adalah *Chalk it*. Di Malaysia, istilah ini diartikan dengan “tanda”, sedangkan di Indonesia diartikan dengan “tandaan”

- Kategori C: *Istilah yang disetujui berbeda seluruhnya*. Contoh istilah untuk kategori ini adalah *area sample* (bidang kependudukan). Di Malaysia, istilah ini diartikan dengan “sampel kawasan”, sedangkan di Indonesia diartikan dengan “percontoh wilayah”. Istilah lain adalah *acceptor* (bidang kependudukan). Di Indonesia, istilah ini diartikan dengan “akseptor”, sementara di Malaysia, “penerima” menjadi kata yang digunakan untuk mengartikan istilah tersebut.
- Kategori D: *Istilah yang setuju untuk ditangguhkan*. Contoh istilah untuk kategori ini adalah *intermediate goods* (bidang ekonomi). Di Indonesia, istilah ini diartikan dengan “barang-barang setengah jadi”, sementara di Malaysia, diartikan dengan “barang pertengahan”.
- Kategori E: *Istilah yang setuju untuk digugurkan*. Contoh istilah untuk kategori ini adalah *Venus Fly Trap*, sebuah istilah yang diusulkan oleh Malaysia. Atas istilah ini, pihak Indonesia menolak karena *Venus Fly Trap* adalah “nama” dan bukan sebuah istilah. *Venus Fly Trap* adalah “nama” sejenis tumbuhan yang hanya ada di belahan bumi utara dan takkan pernah dijumpai orang Indonesia.¹⁶

Dengan kategorisasi seperti itu, istilah-istilah MBIM yang dalam rentang tahun 1972-1985 berjumlah 66.460 buah selanjutnya dibagi menjadi dua, yaitu istilah yang berkategori (berjumlah 53.859) dan istilah yang tidak berkategori

¹⁶ Wawancara dengan Mien A Rifai, Ciomas, Bogor, 10 Februari 2012.

(berjumlah 12.601). Dari 53.859 buah istilah yang berkategori A, B, C, D, dan E dirinci lagi sebagai berikut:¹⁷

**Rincian Istilah Hasil MBIM Berdasarkan Kategorisasi
(Istilah yang Berkategori)**

No	Bidang	Kategori				
		A	B	C	D	E
1	Geografi-Geologi	176	-	1.607	-	-
2	Biologi	458	60	157	-	-
3	Agama Islam	248	4	194	-	-
4	Ekonomi	215	778	564	-	-
5	Kedokteran	651	449	4	52	-
6	Olahraga	631	729	186	104	-
7	Manajemen	1.058	264	577	34	-
8	Komunikasi Massa	467	542	312	3	-
9	Anatomi	713	230	302	3	-
10	Farmasi	999	408	349	63	268
11	Psikologi	757	65	161	177	6
12	Teknik Mesin	729	139	891	96	7
13	Mineral	963	28	69	705	-
14	Antropologi	1.048	89	387	378	5
15	Sosiologi	1.177	118	484	168	43
16	Statistika	313	72	745	14	289
17	Petrologi	2.473	190	256	1.210	3
18	Hukum Internasional	752	118	1.399	163	195
19	Hidrologi	602	128	573	-	-
20	Hidrogeologi	296	42	90	-	-
21	Meteorologi	808	258	996	18	1
22	Ilmu Kependudukan	825	176	890	25	8
23	Kesehatan Masyarakat	680	302	812	28	62
24	Administrasi Negara	614	211	1.452	178	22

¹⁷ Data ini dikutip dari Puryadi, *Perkembangan Peristilahan dalam Bahasa...* hal. 76-77.

25	Perpustakaan	755	260	477	53	56
26	Zoologi	1.411	242	228	403	624
27	Teknologi Makanan	1.363	193	619	145	48
28	Perkebunan	521	523	613	23	1
29	Teknik Listrik	599	98	629	81	12
30	Pelayaran	288	142	682	8	493
31	Hukum Laut	411	407	537	11	23
32	Percetakan	23	3	15	1	-
	Jumlah	23.024	7.268	17.257	4.144	2.166

Terkait aspek peristilahan, beberapa hal penting di catat. Pertama, meskipun terdapat beragam perbedaan mendasar—baik dari segi kata dasar, ejaan, imbuhan, atupun dalam hal morfologi (bentuk)—yang tersaji dalam sebuah istilah, tetapi dalam perjalanannya, baik anggota MBIM asal Indonesia maupun Malaysia selalu mengambil langkah bijak ketika harus memutuskan sebuah istilah. Dalam hal ini, tidak ada upaya dari masing-masing negara untuk memaksakan pilihan istilah yang tidak dapat diterima oleh salah satu pihak. Mereka tetap mengakui dan menerima istilah tersebut meskipun mereka tidak juga menggunakannya. Hal inilah yang membuat prinsip “Sepakat untuk tidak sepakat” (*agree to disagree*) begitu dipegang kuat oleh seluruh anggota MBIM.¹⁸

Kedua, penting pula dicatat bahwa kata kunci yang menjadi prinsip kerjasama MBIM dalam upaya menciptakan beragam istilah adalah “penyelarasan” bahasa, bukan “pembakuan” bahasa. Prinsip ini dipandang penting ketika melihat fakta bahwa meski berasal dari satu rumpun yang sama, Melayu, kedua negara tak jarang memiliki beberapa istilah baku yang sulit dirubah. Perbedaan itulah yang dalam sejarahnya melahirkan adanya beragam variasi baik di tingkat tata bahasa maupun peristilahan.¹⁹ Perbedaan peristilahan di antara

¹⁸ Wawancara dengan Mien A Rifai, Ciomas, Bogor, 10 Februari 2012.

¹⁹ Hasan Ahmad, “MBIM/MABBIM: Peristiwa Bahasa yang Besar”, dalam *Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan...* hal.62.

Indonesia dan Malaysia tersebut secara umum diakibatkan oleh dua hal: divergensi linguistik serta etnolinguistik dan sosiolinguistik kedua negara.²⁰

Divergensi linguistik—perbedaan corak penuturan—antara bahasa Malaysia dan Indonesia baku dapat dirasakan di semua tataran, baik dalam aspek fonetik, intonasi, morfologi, sintaktis, dan semantis. Variasi dialek—“Indonesianisme” atau “Malaysianisme”—yang muncul di tengah masyarakat kedua negara tak jarang menjadi sumber olok-olok bagi penutur masing-masing negara.²¹

Sebagai contoh, istilah “anak” dalam keseharian masyarakat Indonesia bermakna “seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas”. Sedangkan di Malaysia, untuk menyebut kategori yang sama, istilah yang digunakan bukan “anak”, melainkan “budak” yang dalam pengetahuan sebagian masyarakat Indonesia dipahami sebagai “golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji dan tidak memiliki hak asasi manusia”. Disinilah divergensi linguistik membuat masyarakat Indonesia terkadang menjadikan sebuah istilah sebagai sumber olok-olok terhadap teman mereka yang berasal dari Malaysia.

Sementara perbedaan situasi etnolinguistik dan sosiolinguistik kedua negara dapat dilihat misalnya pada fakta bahwa di Indonesia, semua masyarakat bahasa adalah Bumiputra, kecuali masyarakat keturunan Arab dan Tamil yang jumlahnya kecil, dan Tionghoa-Indonesia yang mencakup sekitar 3% populasi. Selain itu, sejak awal bahasa nasional (Indonesia) merupakan bahasa penghubung yang digunakan sebagai bahasa ibu oleh sebagian kecil populasi, termasuk Tionghoa-Indonesia.

Sedangkan di Malaysia, golongan Bumiputra berdampingan dengan golongan masyarakat pendatang Tionghoa dan Tamil yang meskipun kehadirannya sudah lama, tetapi sebagian besar baru berdatangan dan menetap di Malaysia pada zaman penjajahan Inggris. Meski demikian, kehadiran mereka di Malaysia tidak serta merta menjadikan bahasa nasional (Malaysia) sebagai bahasa

²⁰ Istilah ini penulis kutip dari Samuel ketika menjelaskan persoalan perbedaan peristilahan antara Indonesia dan Malaysia. Lihat Samuel, *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia*,...hal.365-366.

²¹ Samuel, *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia*,...hal.365.

penghubung. Sementara kelompok pribumi (Bumiputra) menggunakan bahasa Melayu, kelompok Tionghoa tetap menggunakan bahasa Hokkien, Hakka, Kanton, ataupun Mandarin sebagai bahasa penghubung mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi golongan Tamil yang dengan setia menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa penghubung mereka. Inilah mengapa, pemerintah Malaysia selalu berusaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara yang dalam beberapa hal mulai tersaingi oleh bahasa Mandarin yang digunakan komunitas Tionghoa di sana.²²

4.4. MBIM: Catatan dari Mereka yang Terlibat

Dari beberapa wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa tokoh yang terlibat dalam kerjasama awal MBIM asal Indonesia, muncul sejumlah catatan menarik terkait perkembangan MBIM selama rentang tahun 1972 hingga 1985. Beberapa catatan tersebut, di antaranya:

4.4.1. Problem Sosialisasi dan Implementasi Hasil MBIM

Sebagai sebuah forum kerjasama kebahasaan, MBIM telah berhasil memproduksi beberapa rujukan penting seputar aspek kebahasaan kedua negara. Selain ribuan istilah (*term*), MBIM dalam sejarahnya juga menghasilkan ribuan kata (*word*)—baik yang berasal dari bahasa Indonesia/Malaysia maupun yang diserap dari bahasa asing—yang telah disetujui melalui diskusi dan perdebatan panjang dalam setiap forum MBIM.

Masalahnya, tidak seperti Malaysia yang langsung mensosialisasikannya ke berbagai universitas, dalam konteks perkembangan bahasa di Indonesia, ribuan kata dan istilah tersebut—meskipun sudah dikumpulkan dalam bentuk *Daftar Ejaan Kata-kata Bahasa Indonesia/Malaysia*, ataupun *Daftar/Kamus Istilah MBIM*—dalam analisa para pelaku kerjasama seperti Anton Moeliono dan Harimurti, tidak begitu efektif tersosialisasikan kepada khalayak umum, termasuk ke pada sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.²³

²² Samuel, *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia*,...hal.368-369.

²³ Wawancara dengan Harimurti Kridalaksana, Kampus UI Depok, 24 Februari 2012, dan Anton Meoliono, 11 Februari 2011.

Terkait hal ini Harimurti menjelaskan bahwa baik kata maupun istilah yang dihasilkan dari forum MBIM, hanya diterima dan diketahui oleh kalangan terbatas, khususnya mereka yang terlibat dalam forum MBIM tersebut. Jika pun ada usaha membukukan hasil kesepakatan terkait kata dan istilah tersebut, hal itu hanya berhenti pada tahap pemroduksian kamus ataupun daftar ejaan dan istilah. Setelahnya, tidak ada usaha dari pihak terkait yang mengurus masalah pendistribusian kata dan istilah untuk mensosialisasikannya secara lebih intensif. Padahal strategi paling efektif untuk membumikan hasil dari forum MBIM adalah dengan menyebarkannya kepada khalayak umum, khususnya mereka yang berada dalam lingkungan perguruan tinggi, baik kepada para dosen maupun mahasiswa secara umum. Hal ini menurut Harimurti menjadi sangat berpengaruh bagi proses perkembangan dunia kebahasaan, khususnya dalam segi penggunaan bahasa di lingkungan perguruan tinggi.²⁴

Dampaknya seringkali terjadi bahwa khalayak umum, termasuk mereka yang ada di perguruan tinggi, merasa bingung dengan beberapa kata maupun istilah baru yang sebenarnya telah disepakati dalam forum MBIM. Sebagai contoh, pada sekitar tahun 1980-an, muncul kata "petahana" yang kala itu diusulkan oleh Salomo Simanungkalit. Bagi mantan pegiat MBIM, kata tersebut tidaklah asing, sebab "tahana" sudah diterima sebagai padanan "status". Namun di kalangan perguruan tinggi, kata tersebut nyatanya masih sangat membingungkan dan karenanya tidak begitu efektif digunakan dalam keseharian kalangan perguruan tinggi.²⁵

Problem tersebut begitu terasa jika melihat kondisi dunia perguruan tinggi di Jakarta pada kisaran tahun 1980-an. Seperti diakui Anton Moeliono, banyak kata-kata baru hasil dari forum MBIM yang tidak berhasil tersosialisasikan dengan baik di kalangan perguruan tinggi di Jakarta. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia sering dimintai pertanggungjawaban seputar kata/istilah baru yang ia kemukakan, baik dalam diskusi maupun dalam dunia keseharian, yang saat itu belum diketahui oleh khalayak umum, termasuk kalangan perguruan tinggi. Dengan kondisi tersebut, ia mengakui bahwa sosialisasi atas kata/istilah baru yang

²⁴ Wawancara dengan Harimurti Kridalaksana, Kampus UI Depok, 24 Februari 2012.

²⁵ Wawancara dengan Liek Wilardjo, Gedung Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, 29 Februari 2012.

sebagian besarnya merupakan hasil kesepakatan forum MBIM, tidak begitu efektif berjalan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi di Jakarta.²⁶

Hal yang sama terjadi di perguruan tinggi di Bogor. Mien A Rifai menjelaskan bahwa situasi perkembangan kebahasaan di lingkungan perguruan tinggi di Bogor tak berbeda dengan apa yang terjadi di Jakarta. Dalam pandangannya, hal tersebut terjadi karena banyak langkah yang seharusnya dilakukan dalam agenda perancangan bahasa (*language planning*) seperti digariskan oleh Cabret (1999)²⁷ tidak berjalan efektif.²⁸

Dengan latar belakang itulah, agenda mensosialisasikan kata/istilah hasil MBIM ke lingkungan perguruan tinggi, akhirnya menjadi satu target yang coba dikembangkan baik oleh Moeliono, Kridalaksana, maupun Rifai sepanjang keterlibatan mereka dalam MBIM. Dengan prinsip dasar bahwa perguruan tinggi mampu menjadi ruang efektif bagi proses pengembangan bahasa, mereka dalam perjalanannya selalu berupaya memperkenalkan kata/istilah baru yang mereka dapat dari MBIM kepada khalayak umum, khususnya di lingkungan perguruan tinggi tempat mereka beraktivitas.²⁹

Namun demikian, catatan menarik diberikan oleh Liek Wilardjo. Dalam analisisnya, memang benar apa yang dikemukakan oleh Harimurti dan Anton Moeliono, bahwa sosialisasi atas kata/istilah baru yang sebagian besarnya merupakan hasil kesepakatan forum MBIM, tidak begitu efektif berjalan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi di Jakarta. Namun menurutnya, kondisi yang terjadi di lingkungan Fakultas Teknik (FT) UKSW dan Fakultas Teknik (FT) UGM merupakan perkecualian. Menurut Wilardjo, baik di lingkungan FT-UKSW dan FT-UGM, beragam kata/istilah yang dihasilkan dari forum MBIM sudah berhasil digunakan secara efektif. Di kedua Fakultas tersebut, baik dosen maupun mahasiswa sudah terbiasa dengan perekaciptaan kata maupun istilah. Mereka, dalam pengamatan Wilardjo, sudah sangat terbiasa dengan kata/istilah baru yang biasanya tersebar baik melalui proses perkuliahan dan bahan kuliah yang

²⁶ Wawancara dengan Anton Meoliono, Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, 11 Februari 2011.

²⁷ Tentang ini, lihat Maria Teresa Cabré, *Terminology: Theory, Methods, and Applications*, (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1999), hal.216-217.

²⁸ Wawancara dengan Mien A Rifai, Ciomas, Bogor, 10 Februari 2012.

²⁹ Wawancara dengan Harimurti Kridalaksana, Kampus UI Depok, 24 Februari 2012.

digunakan, rapat dosen, kolokium dan ujian (bagian presentasi), rapat redaksi jurnal, maupun melalui berbagai diskusi kebahasaan yang dilakukan di lingkungan kampus.³⁰

Selain di lingkungan perguruan tinggi kasus serupa misalnya juga terjadi di tingkatan sekolah. Di Malaysia, implementasi bahasa dan istilah diperkuat oleh lingkungan yang mendukung. Dalam ranah pendidikan, misalnya, sejak 1978 di DBP berdiri Jawatankuasa Peristilahan Sekolah yang di dalam tugasnya dibantu berbagai lembaga pendidikan (Biro Buku Teks, Lembaga Peperiksaan, Bahagian Pelajaran Vokasional dan Teknik, dan beberapa lembaga lain), di bawah pimpinan DBP. Pada tahun 1980 Jawatankuasa ini menyusun sebuah daftar istilah yang ditujukan bagi kalangan sekolah. Keberadaan istilah sekolah yang resmi dan wajib dapat menimbulkan masalah jika tidak benar-benar diimplementasikan kepada para siswa oleh pengajar.³¹

Aspek yang paling menarik dari implementasi istilah adalah sektor penerbitan. Dalam bidang ini DBP memiliki wewenang besar dan sarana yang luas. Karena itulah, mutu publikasinya lebih tinggi dibandingkan publikasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B) atau Balai Pustaka. DBP menerbitkan berbagai jenis buku: kesusastraan umum, bacaan anak, kajian bahasa dan sastra, kamus, majalah dan juga buku pelajaran sekolah (dari pendidikan dasar sampai tinggi) yang secara keseluruhan berjumlah sekitar 300 judul per tahun.

Selain itu, pengaruh DBP bahkan jauh melebihi publikasinya sendiri karena semua buku pelajaran sekolah dasar dan menengah harus memperoleh izin terbit dari Biro Buku Teks DBP meskipun dapat diterbitkan oleh penerbit swasta atau penerbit pemerintah yang lain. Dengan demikian DBP dapat mewajibkan penggunaan aturan bahasa baku yang telah dibuatnya.³²

Membandingkan agenda sosialisasi dan implementasi hasil MBIM antara kedua negara tampak bahwa Indonesia dalam hal ini Malaysia setingkat lebih baik dibanding Indonesia. Ini yang menjelaskan mengapa beberapa istilah hasil MBIM

³⁰ Wawancara dengan Liek Wilardjo, Gedung Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, 29 Februari 2012.

³¹ Samuel, *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia*,...hal.372.

³² Haji Jumaat Dato Haji Mohd Noor, “ Daripada PBmPB hingga DBP: Renungan terhadap Sejarah Perkembangan Organisasi Bahasa dan Sastra Melayu” dalam Kelantan S.O. (ed.), *100 Tahun Pergerakan Bahasa dan Sastra Melayu 1988-1988* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hal. 28.

menjadi sangat asing bagi sebagian kalangan di Indonesia sementara di Malaysia istilah tersebut sudah begitu marak digunakan oleh masyarakat di sana. Maka ketika di Malaysia hasil-hasil MBIM begitu cepat tersosialisasi dan berkembang dengan pesat di berbagai kalangan, mengapa di Indonesia kondisi tersebut tidak terjadi?

Padahal jika dirunut ke belakang, salah satu misi awal MBIM—seperti terjabarkan dalam pernyataan bersama tahun 1972—adalah mendekatkan bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Karenanya ketika yang terjadi adalah kasus seperti yang berlaku di Indonesia, selain akan menciderai prinsip dasar MBIM juga akan berdampak pada perkembangan dunia kebahasaan Indonesia yang tentu akan bergerak dengan sangat lambat.

Di sinilah, menurut hemat penulis, pemerintah dituntut untuk lebih peka atas perkembangan dunia kebahasaan di Indonesia. Terlebih ketika belakangan, wacana untuk menjadikan Bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN begitu kuat berkumandang di lingkungan pemerintah seiring berkembangnya wacana komunitas ASEAN 2015. Dengan kondisi tersebut kita seakan diingatkan bahwa untuk mengembangkan dimensi kebahasaan tidak cukup jika hanya mengandalkan pada para ahli bahasa karena nyatanya pemerintah pun perlu hadir mendukung penuh apa yang telah dilakukan oleh para ahli bahasa. Karena bahasa akhirnya bukan hanya milik ahli bahasa, bahasa adalah milik semua pihak, termasuk dalam hal ini pemerintah dan masyarakat.

4.4.2. Problem Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia yang Memiliki Otoritas Mutlak atas Hasil-hasil Keputusan MBIM

Dibanding Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B) di Indonesia, Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, lebih memiliki otoritas yang besar dalam konteks pengesahan sekaligus penggunaan hasil-hasil sidang MBIM. Terkait hal ini, Liek Wilardjo menjelaskan bahwa dalam perjalanannya terlibat dalam forum-forum MBIM, sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa kesepakatan—khususnya yang berkaitan dengan peristilahan—yang dicapai para pakar yang terlibat dalam forum MBIM, dapat dan seringkali ditolak oleh pihak Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia, Dewan

Bahasa dan Pustaka, yang memang memiliki otoritas mutlak dalam hal kebahasaan.

Fenomena ini mulai menguat sejak DBP membentuk Jawatankuasa Penapis Istilah pada awal tahun 1980-an. Jika sebelumnya, semua keputusan MBIM dalam bidang peristilahan berada di bawah kontrol Jawatankuasa Istilah Malaysia, maka sejak lembaga itu terbentuk semua hal yang berkaitan dengan peristilahan, termasuk dalam hal penggunaannya, menjadi tanggung jawab bagian Jawatankuasa Penapis Istilah, Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejak itu lembaga inilah yang memiliki otoritas mutlak dalam melakukan penilaian dan pengesahan atas sebuah istilah, baik istilah yang diciptakan oleh Jawatankuasa Istilah ataupun istilah-istilah yang dihasilkan dari forum MBIM.³³

Maka jika di Indonesia hasil-hasil MBIM sepenuhnya selalu disetujui oleh pihak Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), di Malaysia, keputusan akhir tentang apakah sebuah istilah layak digunakan dan disebarluaskan kepada khalayak umum bergantung pada Jawatankuasa Penapis Istilah, Dewan Bahasa dan Pustaka, bukan pada lembaga-lembaga istilah.

Bagi Malaysia, pembagian tugas dan kekuasaan antara pakar bidang ilmu dan ahli bahasa penting untuk diperkuat. Inilah mengapa DBP ahli bahasa mendapat posisi pertama sedangkan pakar bidang hanya berperan sebagai penasehat ilmu, seperti ditegaskan oleh direktornya, Datuk Haji Hassan bin Ahmad, pada tahun 1982:

"(...) orang yang terlibat dalam kerja pembinaan bahasa ini perlu mempunyai kekuatan bahasa yang tinggi. Pakar ilmu boleh mentakrifkan makna sesuatu istilah dari pada bahasa Inggeris, misalnya, tetapi ini sahaja tidak cukup (...) Kami di DBP sedang merancang untuk membina suatu tenaga pakar perancang bahasa, yang bukan sahaja pakar dalam ilmu bahasa (linguistik) tetapi lebih lagi, mempunyai wibawa yang tinggi dalam selok-belok sosiologi bahasa, supaya mereka dapat menguruskan kerja-kerja pembinaan dan pengembangan bahasa secara lebih `autoritatif lagi, dan tidaklah lagi mereka duduk dalam [Jawatankuasa Istilah] sebagai setiausaha yang cuma mencatat `minir mesyuarat."³⁴

³³ Lihat Datuk Haji Hasan Ahmad, "Istilah Bahasa Melayu Kerab Berubah", dalam Mior Hamzah Mior Hashim Aliah Abd. Rahim Abdullah Marjunid (Ed.), *Ke Arah Pembentukan Istilah yang Sempurna, 29 Desember 1972-29 Desember 1992* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hal. 13-22.

³⁴ Hasan Ahmad, "Istilah Bahasa Melayu Kerab Berubah",.....hal. 22.

Dalam hal ini, pihak Malaysia memiliki memiliki batasan tersendiri dalam konteks pengadopsian hasil-hasil MBIM, utamanya dalam hal peritilahan, yang karena sebab itu, mereka tidak serta merta menerima seluruh hasil dari MBIM. Dengan demikian, keputusan akhir bergantung pada DBP dan bukan pada lembaga-lembaga istilah. Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia itu bukan tidak menimbulkan ketegangan, karena jika Indonesia menganggap istilah yang diolah MABBIM sudah merupakan basil akhir, Malaysia masih mewajibkan istilah itu disahkan oleh lembaga bahasa.

Kondisi ini dalam pandangan Wilardjo sering membawa pada terjadinya ketegangan di antara para perwakilan masing-masing negara. Ketegangan ini misalnya terjadi dalam persidangan keenam yang dilaksanakan di Jakarta, 14-18 Desember 1975, ketika kedua pihak membahas dua konsep fisika, yaitu *force* dan *power* (Inggris). Istilah *force* di Indonesia diartikan dengan kata “gaya”, sementara di Malaysia istilah “force” diartikan dengan kata “daya”. Padahal di Indonesia istilah “daya” adalah padanan dari istilah “power”. Sementara di Malaysia “power” merupakan padanan kata dari “kuasa” yang di Indonesia mempunyai konotasi politik dan itu berarti di luar bidang fisika.

Dengan kondisi tersebut para fisikawan Indonesia, terutama Prof. Yohannes, mencari padanan baru istilah *force* (Inggris). Istilah yang sebelumnya dipakai, “gaya”, dianggap tidak sesuai lagi karena mengandung polisemi (berpadanan dengan Inggris *force* dan juga *style*). Saat itu, Prof. Johannes menawarkan belasan kata sebagai calon pengganti “gaya”. Semua kata itu membentuk “paradigma mirip-arti”, dengan makna pokok kuat. Jadi ada istilah “kukuh”, “kuat”, “sasa”, dan beberapa tawaran istilah lain. Oleh Liek Wilardjo usulan Prof. Johannes itu ditolak karena tiga adjektiva tersebut dinilai tidak sesuai dengan patokan pertama pembentukan istilah—ketepatan makna—yang digariskan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUI)*. Wilardjo berpendapat ketiganya dapat diterima untuk menerjemahkan *force* (Inggris) dalam arti umum saja, karena umumnya penutur menganggap “kuat” dan “lemah” sebagai antonim, sementara dalam fisika kekuatan dapat saja lemah. Meskipun demikian dalam bahasa Indonesia “kecepatan” diturunkan dari kata dasar “cepat”, padahal kecepatan dapat cepat atau pun lambat. Dengan demikian makna pokok *force*

adalah paksa. *Force* dalam pemahaman Wilardjo adalah sesuatu yang memaksa suatu benda atau sistem untuk mengubah keadaan geraknya. Jadi apakah ia kuat, atau lemah, tidaklah penting. Sanggahan itu diterima para peserta sidang.

Maka para fisikawan Indonesia berupaya mencari istilah lain yang mengandung makna *paksa*. Harry Yohannes mengusulkan transkripsi *forse* menjadi *forsa*, tetapi langsung ditolak pihak Malaysia yang menganggapnya "Kebarat-baratan". Ada pula Adhi Susanto, yang mengusulkan kata *paksa* sendiri. Ini pun tidak diterima, sebab pengertiannya sebagai verba, dan bukan nomina, sudah begitu melekat. Kata *perkosa* juga ditolak, sebab mengandung konotasi buruk. Dalam situasi tersebut Prof. Johannes mengusulkan kata *kakas*, dan istilah ini diterima oleh anggota sidang, khususnya para fisikawan Indonesia. sejak itu jadilah *kakas* sebagai padanan *force*. Dengan dasar itu, para fisikawan Indonesia mengusulkan kepada fisikawan Malaysia untuk meninggalkan istilah mereka, BM "daya", dan bersama-sama memungut "kakas" yang dihasilkan lewat pengaktifan kembali sebuah kata dasar yang sudah tak digunakan dan yang ditemukan dalam bahasa Melayu dan Jawa Kuno.³⁵

Pada persidangan ketujuh MBIM yang terlaksana di Kuala Lumpur, 4-9 Februari 1976, "kakas" dipilih sebagai padanan kata *force* (Inggris) oleh para anggota sidang, baik yang berasal dari Malaysia maupun Indonesia. Tetapi setelah Indonesia menemukan istilah *kakas* dan kepalang basah telah memasarkannya Malaysia justru tidak jadi menerima *kakas* sebagai padanan *force*. Pakar-pakar fisika Malaysia tidak mampu menghadapi veto pakar-pakar bahasa yang berkuasa di Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada kenyataannya para ahli linguistik DBP membatalkan keputusan para pakar bahasa yang terlibat dalam persidangan tahun 1976 dan mempertahankan padanan sebelumnya, yaitu *power* yang diartikan dengan "kuasa" (bahasa Malaysia) dan *force* (Inggris) dengan "daya".³⁶

Terkait hal ini Wilardjo tidak menjelaskan alasan penolakan "kakas", tetapi kita dapat membenarkannya dengan alasan yang sebanding dengan alasan

³⁵ Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kesan dan Pesan, Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hal. 84-85.

³⁶ Samuel, *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia*,...hal.386-387.

penolakan "gaya". Dalam bahasa Malaysia kata dasar "kakas" (juga ditulis "kekas"), mempunyai homonim dari bahasa Minangkabau yang berarti "kais, cakar [khususnya ayam atau jago]" dan Melayu yang berarti "mengerasi atau memaksa". Karena sudah terlanjur, pihak Indonesia pun mempertahankan posisinya, apalagi pada saat bersamaan produsen mobil Suzuki meluncurkan model sepeda motor baru yang dinamakan *Forsa*, sehingga timbul anggapan bahwa kata ini akan menjadi lebih populer di Indonesia.

Dengan demikian pihak Indonesia dan Malaysia tetap tidak sepeham tentang padanan istilah *force* yang sebenarnya telah disepakati dalam forum sidang dan tetap berpegang pada padanan yang dianut oleh masing-masing negara. Maka melalui kasus tersebut nyata bahwa jika Indonesia menganggap istilah yang diolah MBIM sudah merupakan hasil akhir, namun bagi Malaysia, istilah-istilah hasil sidang MBIM harus terlebih dahulu disahkan oleh pihak Jawatan Kuasa Penapis Istilah, Dewan Bahasa dan Pustaka, yang memang memiliki otoritas mutlak dalam hal penggunaan sebuah kata/istilah bagi masyarakat umum di Malaysia.

Terkait posisi Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia yang memiliki otoritas mutlak atas hasil-hasil keputusan MBIM, menurut hemat penulis, sejatinya hal tersebut tidak boleh lagi terjadi di masa mendatang. Alasannya sederhana, semua yang tergabung dalam keanggotaan MBIM adalah mereka yang dipercaya mampu dan memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing. Oleh karenanya, semua yang dihasilkan dalam forum persidangan tentu sudah melewati berbagai alur perjalanan, mulai dari perdebatan hingga berakhir pada sebuah kesepakatan di antara para pakar.

Dengan kondisi tersebut, menjadi tidak bijak ketika hasil-hasil dari MBIM yang telah disepakati bersama ditolak oleh salah satu pihak, dalam hal ini Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Jika terus terjadi kebijakan semacam ini dikhawatirkan, selain akan mengganggu harmonisasi sesama anggota MBIM juga akan menghambat gerak perkembangan dunia kebahasaan di masing-masing negara. Inilah mengapa penting untuk meredakan ego masing-masing pihak. Bahwa ketika kembali pada tujuan dasar MBIM akan jelas bahwa sejatinya MBIM dihadirkan sebagai media bagi kedua negara guna mempererat hubungan

yang sempat terputus akibat konfrontasi. Prinsip inilah yang seharusnya tetap terjaga, sehingga menghentikan kebijakan semacam itu akan jauh lebih baik ketimbang terus mempertahankannya.

4.4.3. Perwakilan Indonesia memiliki Pengetahuan Kebahasaan yang Lebih Baik dibanding Perwakilan Malaysia.

Seperti dijelaskan oleh Harimurti Kridalaksana bahwa pada setiap forum MBIM, perwakilan Indonesia selalu mampu memenangi setiap perdebatan seputar kata/istilah yang sedang menjadi pembahasan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dibanding perwakilan dari Malaysia, tokoh-tokoh dari Indonesia memiliki tingkat pengetahuan kebahasaan yang lebih baik. Dalam penguasaan bahasa misalnya, tokoh-tokoh Indonesia diketahui mampu menguasai lebih dari tiga bahasa. Selain Belanda dan Inggris—tentunya Indonesia—mereka juga menguasai bahasa-bahasa lain seperti bahasa Latin dan bahasa Arab, termasuk bahasa Sansekerta. Kemampuan ini misalnya dimiliki oleh Mien A Rifai, Harimurti, Anton Moeliono, Liek Wilardjo, Purbo-Hadiwidjoyo, dan Hadyana Pujaatmaka.

Mien A Rifai misalnya, selain menguasai bahasa Inggris dan Belanda dengan baik, ia dikenal sebagai tokoh yang begitu menguasai bahasa Latin. Lebih dari itu, ia juga menguasai bahasa Jerman dan bahasa Perancis. Begitu juga Anton Meoliono yang selain menguasai bahasa Inggris dan Belanda dengan baik, ia juga menguasai bahasa Perancis, Jerman, Arab, Latin dan Sansekerta. Sementara Harimurti, selain menguasai bahasa Belanda dan Inggris, juga menguasai bahasa Arab, Perancis, Jerman, Latin, dan Sansekerta. Liek Wilardjo, meskipun ahli fisika, ia menguasai bahasa Belanda, Jerman, Perancis, dan Latin. Sedangkan Hadyana Pujaatmaka, meskipun ahli fisika, ia begitu menguasai bahasa Latin dengan baik, termasuk tentunya bahasa Inggris dan Belanda. Pun demikian dengan dengan Purbo-Hadiwidjoyo yang dikenal menguasai bahasa Latin, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris dengan sangat baik.³⁷

Terlepas dari kemampuan yang dimiliki tokoh-tokoh asal Indonesia, menurut Harimurti, kemampuan perwakilan Indonesia dalam menguasai bahasa asing disebabkan oleh sistem pembelajaran yang diberlakukan di Indonesia.

³⁷ Wawancara dengan Harimurti Kridalaksana, Kampus UI Depok, 24 Februari 2012.

Menurutnya, faktor yang membuat ia mampu menguasai bahasa asing, selain karena belajar secara outodidak, juga disebabkan oleh atmosfer pembelajaran di Indonesia, khususnya di Universitas Indonesia. Dalam pandangannya, sistem pembelajaran di UI selalu mengarahkan setiap mahasiswanya untuk mampu menguasai bahasa asing dengan baik. Inilah yang dialaminya ketika masih menjadi mahasiswa Fakultas Sastra UI di era tahun 1960-an. Dalam kesehariannya, tampak bahwa aspek kemampuan bahasa begitu ditekankan oleh pihak universitas. Dalam kurikulum yang berlaku di UI pada tahun 1960-an misalnya, setiap mahasiswa diwajibkan untuk mempelajari bahasa asing dan bahasa Sansekerta.³⁸

Kondisi tersebut jelas sangat berbeda dengan yang berlaku di Malaysia. Kondisi pembelajaran di Malaysia pada era 1960-an, sangat didominasi oleh keharusan atas penguasaan bahasa Inggris. Mereka kala itu tidak pernah bersentuhan dengan bahasa Latin, bahasa Sansekerta, ataupun bahasa-bahasa asing lain selain Inggris. Inilah yang membuat dalam perkembangannya, ketika mereka dipertemukan dalam forum MBIM, perwakilan dari pihak Malaysia, hanya mampu memperdebatkan kata/istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Sedangkan ketika persidangan diarahkan pada pembahasan sekitar kata/istilah asing, baik dalam bahasa Latin ataupun Sansekerta misalnya, mereka akan cenderung menyetujui penjelasan yang diberikan oleh perwakilan Indonesia yang memang menguasai bahasa asing, termasuk bahasa Latin dan bahasa Sansekerta dengan baik.³⁹

Penjelasan di atas membawa kita pada sebuah kesimpulan sederhana, bahwa dalam beberapa hal, kebanyakan kata/istilah—khususnya yang berasal dari bahasa-bahasa selain Inggris—yang dihasilkan dalam forum MBIM merupakan hasil analisa dari perwakilan Indonesia, dan dalam konteks ini, Malaysia hanya mengamini apapun hasil-hasil MBIM, tanpa pernah mampu memperdebatkannya secara lebih mendalam. Dengan posisi seperti ini, begitu tampak bahwa dalam setiap persidangan, pihak Indonesia selalu menjadi prakarsa, menentukan laju

³⁸ Wawancara dengan Harimurti Kridalaksana, Kampus UI Depok, 24 Februari 2012, Meity Takdir, Pusat Bahasa Jakarta, 22 Februari 2012.

³⁹ Wawancara dengan Harimurti Kridalaksana, Kampus UI Depok, 24 Februari 2012.

pacu, dan diam-diam selalu memegang kendali atas Malaysia dalam berbagai persidangan yang membahas berbagai kata/istilah.⁴⁰

Namun demikian meskipun perwakilan Indonesia memiliki pengetahuan kebahasaan yang lebih baik dibanding perwakilan Malaysia penting dicatat bahwa hal tersebut tidak menimbulkan sebuah persoalan di tubuh MBIM, terutama dalam setiap persidangan yang dilakukan. Justru dengan kelebihan yang dimiliki perwakilan Indonesia, khususnya dalam hal penguasaan bahasa asing, forum-forum persidangan MBIM menjadi sangat hidup dan selalu menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru yang sangat berguna bagi semua pihak.

4.4.4. Tertanamnya Rasa Hormat Perwakilan Malaysia terhadap beberapa Tokoh Ahli Bahasa Indonesia

Dengan tingkat pengetahuan kebahasaan yang lebih baik, beberapa tokoh ahli bahasa asal Indonesia dalam sejarahnya dipandang sebagai “guru” bagi sebagian besar perwakilan Malaysia. Salah satu ahli bahasa yang mendapat tempat istimewa di kalangan perwakilan Malaysia adalah Anton Moeliono. Bagi sebagian perwakilan Malaysia, Anton Moeliono dianggap sebagai tokoh yang meninggalkan kesan mendalam pada perjalanan MBIM.

Abdullah Hasan misalnya, begitu terpukau ketika Anton Moeliono memaparkan pemikirannya seputar konsep perancangan bahasa di masa-masa awal terbentuknya MBIM. Dalam sebuah wawancara dengan Asmah Haji Omar, ia menuturkan:

“Pak Anton bercakap, selalunya ada falsafah ilmunya. Inilah perkara yang sebenarnya bagi pensyarah muda sangat memberi kesan. Apabila kita bercakap apa falsafah kamu, apa yang mendasari ilmu kamu, maka jadilah begini....Termasuklah perancangan bahasa. Pak Ton menyebut sejak MBIM di Palembang lagi, bahawa istilah tahap pertama. Kita jangan lagi (setelah itu) membentuk istilah. Tahap kedua dan ketiganya ialah bagaimana kita mengembang dan memasyarakatkan ilmu. Saya masih ingat lagi, dan saya merasa agak terkilan kita tidak faham apa yang beliau katakan. Kita sudah membuat pedoman istilah, sekarang buat sajalah istilah masing-masing. Kemudian lebih penting ialah membina ilmu, yang sampai sekarang kita baru mula-mula faham. Itu yang selalunya saya katakan, kita ini selalu mengasah parangnya saja, menebas belum.”⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Mien A Rifai, Ciomas, Bogor, 10 Februari 2012.

⁴¹ Dikutip dari Asmah Haji Omar, *Carik-Carik Bulu Ayam: Kisah Runding Bahasa Dunia Melayu*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010), hal. 108.

Beberapa tokoh lain seperti Datim Azizah Mokhzani juga mengungkapkan perasaan yang sama. Dalam sebuah wawancara ia menuturkan:

“ Saya mendapat kesan yang amat mendalam daripada Profesor Anton Moeliono, bukan kerana rigidnya, tetapi dari segi mentalnya, dari segi pemikirannya. Dia boleh berbincang, yang begitu meyakinkan. Dan dia tahu apa yang disebut itu seolah-olah itu kebenarannya, tak dapat disalahkan lagi. Very dominant character. Sampai sekarang saya kagum. Dan saya teringat cara dia berbincang-bincang.”⁴²

Selain Anton Moeliono, tokoh ahli bahasa lain yang juga dipandang “spesial” bagi sebagian perwakilan Malaysia adalah Amran Halim. Seperti halnya Moeliono, Amran Halim selain dianggap sebagai guru bagi sebagian besar ahli bahasa Malaysia juga dicatat sebagai tokoh yang telah banyak memberikan sumbangsih bagi proses tumbuh dan berkembangnya MBIM.⁴³

4.4.5. Kaderisasi terhadap Ahli Bahasa di Malaysia tidak Efektif Berjalan.

Dibanding dengan Malaysia, Indonesia terlihat lebih siap dalam proses kaderisasi atas calon-calon ahli bahasa. Seperti dijelaskan oleh Meiti Taqdir Qodratillah, proses kaderisasi calon-calon ahli bahasa di Indonesia begitu intensif berjalan. Hal ini setidaknya terlihat dari fenomena keterlibatan tokoh-tokoh ahli bahasa senior pada forum-forum MBIM (dalam konteks yang lebih jelas yakni MABBIM).

Sejak berubahnya MBIM menjadi MABBIM hingga saat ini, perwakilan pihak Malaysia masih saja dipercayakan kepada tokoh-tokoh ahli bahasa seperti Asmah Haji Omar ataupun Hasan bin Ahmad. Sebagai contoh, pada Sidang Eksekutif MABBIM keempat puluh tujuh tahun 2008 sementara perutusan Indonesia diwakili oleh Dendy Sugono, Sugiyono dan Meity Taqdir Qodratillah, perutusan Malaysia masih saja dipercayakan kepada Asmah bin Haji Omar dan Hassan bin Ahmad. Padahal tokoh-tokoh yang seangkatan dengan mereka, seperti Harimurti Kridalaksana, Liek Wilardjo, ataupun Mien A Rifai sudah lama—bahkan sejak akhir tahun 1980-an—tidak lagi terlibat dalam forum MABBIM karena sudah digantikan oleh tokoh-tokoh ahli bahasa yang lebih muda seperti

⁴² Dikutip dari Asmah Haji Omar, *Carik-Carik Bulu Ayam*:.....hal. 108-109.

⁴³ Dikutip dari Asmah Haji Omar, *Carik-Carik Bulu Ayam*:.....hal. 110.

Dendi Sugono (Ahli Linguistik),⁴⁴ Sugiyono (Ahli Linguistik), maupun Meiti Takdir Qodratillah (Ahli Terminologi/Pusat Bahasa).

Hal ini menandakan bahwa Malaysia begitu sangat bergantung pada sosok-sosok senior seperti Asmah haji Omar ataupun Hasan bin Ahmad. Sementara generasi muda ahli bahasa mereka, seperti Hajjah Noresah Baharom (Ahli Leksikografi/Perkamusan), Sa'adah Abdullah (Ahli Linguistik) maupun Hajjah Ratna Inzah binti Datuk Haji Mohd. Asri (Ahli Terminologi) hanya berada pada posisi yang cenderung “mengamini” apapun hasil keputusan MBIM. Bahkan seperti dijelaskan oleh Meity Taqdir Qodratillah bahwa sepanjang pengalamannya mengikuti forum MABBIM, tidak tampak generasi muda ahli bahasa Malaysia berdebat serius dengan perwakilan Indonesia tentang beberapa kata/istilah. Mereka dalam beberapa hal terlihat pasif, menunggu hasil dari setiap persidangan dan begitu kurang percaya diri ketika harus berdebat menentukan padanan sebuah kata/istilah.⁴⁵ Fakta tersebut setidaknya penting digarisbawahi bahwa dalam segi kebahasaan, Indonesia dengan para ahli bahasa, baik generasi tua maupun generasi muda, memang masih berada di posisi yang setingkat lebih baik dibanding Malaysia.

⁴⁴ Sejauh ini ia selain dikenal sebagai ahli linguistik ia juga telah dipercaya sebagai Ketua Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) Indonesia, sejak 2001 hingga tahun 2008.

⁴⁵ Wawancara dengan Meity Taqdir Qodratillah, Pusat Bahasa, Rawamangun, Jakarta Timur, 22 Februari 2012.

BAB VI

KESIMPULAN

Dengan apa yang telah diperagakan selama kurang lebih 14 tahun, MBIM dalam sejarahnya telah berhasil memposisikan diri sebagai ruang dialog paling efektif dalam konteks memperbincangkan beragam hal terkait perkembangan dunia kebahasaan di Indonesia dan Malaysia. Sebagai sebuah bentuk kerjasama, MBIM pada akhirnya telah berhasil memberikan kontribusi tidak hanya pada proses pengembangan bahasa kedua negara tapi juga pada proses membangkitkan memori kolektif kesejarahan Indonesia-Malaysia.

Melalui MBIM kita bisa paham bahwa sejatinya Indonesia dan Malaysia pernah memiliki hubungan spesial dan sangat jauh dari kesan berjarak oleh sebab perselisihan (konfrontasi). Dan melalui MBIM pula kita mendapat pelajaran berharga betapa sebuah rantau budaya bahasa yang terpisah baik oleh kolonialisme maupun oleh sebab pertikaian politik dapat bersatu kembali melalui sebuah komitmen bersama yang sepenuhnya didorong oleh adanya kesamaan misi, dalam hal ini yakni misi kebahasaan.

Semasa konfrontasi, kedua negara memang seperti melupakan fakta bahwa mereka berasal dari rumpun yang sama, Melayu. Karena konfrontasi pula proses komunikasi di antara kedua negara begitu memburuk. Tapi selepas konfrontasi, perubahan terjadi dan penguatan kerjasama kebahasaan—yang selanjutnya terejawantahkan dalam MBIM—menjadi salah satu contoh perubahan tersebut. Pada masa awal kemunculannya selain mampu menenggelamkan trauma konfrontasi yang pernah dirasakan oleh kedua negara, MBIM juga tercatat mampu menghadirkan ragam hasil di ranah kebahasaan.

Salah satu keluaran penting yang dihasilkan dari adanya serangkaian persidangan MBIM adalah semakin kuatnya kedua negara dalam konteks merancang dan menyempurnakan—termasuk mempergunakan—sistem ejaan yang di Indonesia dikenal sebagai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan di Malaysia dinamakan Ejaan Rumi Baru Bahasa Malaysia (ERB). Selain ejaan,

keluaran lain yang juga penting dicatat adalah sebuah pedoman pembentukan istilah. Di Malaysia pedoman ini dikenal sebagai *Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu* (PUIBM), sementara di Indonesia pedoman ini dikenal sebagai *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (PUI). Pedoman tersebut serentak mulai digunakan oleh masing-masing negara sejak tahun 1975.

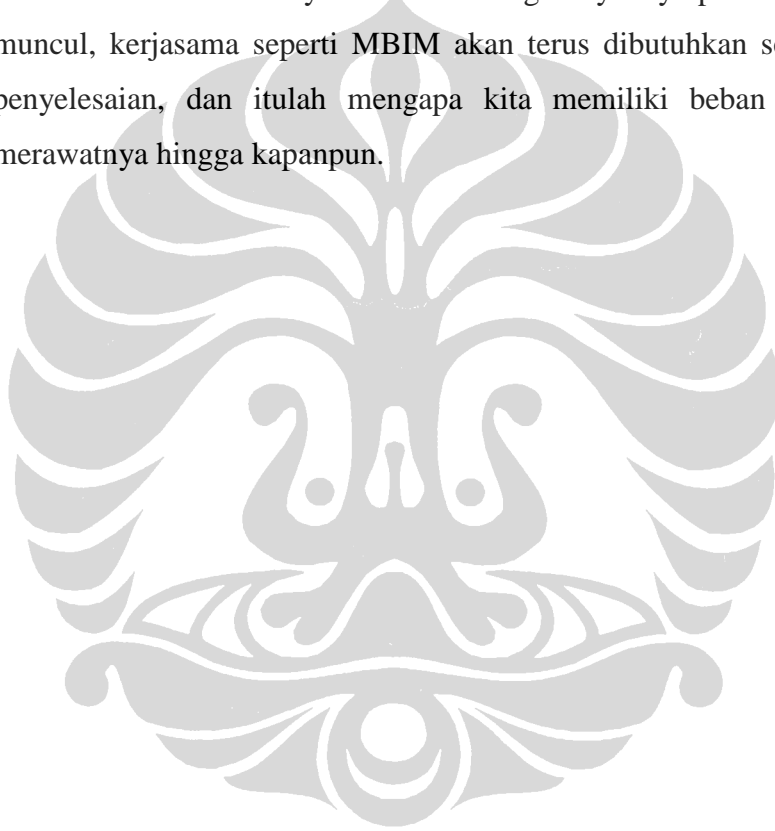
Pertanyaannya, sudahkah hasil-hasil MBIM tersebut digunakan dan diimplementasikan dalam kehidupan kebahasaan kita saat ini? Jika sudah, mengapa saat ini kita masih dihadapkan pada serangkain persoalan kebahasaan, seperti misalnya fakta semakin terpinggirkannya bahasa Melayu/Indonesia di tengah pemakainya, terutama di ruang-ruang publik yang cenderung menggunakan bahasa asing serta memakai bahasa secara tidak teratur, ataupun fakta memuncaknya rasa kagum terhadap kemajuan perekonomian Barat (Inggris dan Amerika) sehingga menjadikan bahasa Inggris dipandang lebih tinggi nilai dan gengsinya untuk digunakan di bidang ekonomi dan teknologi dibandingkan bahasa Indonesia/Melayu.

Beberapa persoalan tersebut mungkin sempalan kecil dari gumpalan besar persoalan kebahasaan yang kita miliki. Dan jika dikaji lebih jauh semua persoalan tersebut berakar pada satu muara bahwa nyatanya kita tidak bisa memanfaatkan pelbagai hal yang sebenarnya telah kita rancang dan kita hasilkan, dalam hal ini apa-apa yang telah diberikan oleh MBIM. Di sini mungkin akan muncul dua dugaan, *pertama*, keberadaan hasil-hasil MBIM—khususnya pedoman ejaan dan istilah—mungkin belum diketahui oleh khalayak umum, sehingga masyarakat kita tidak menggunakannya di kehidupan mereka sehari-hari. *Kedua*, bisa saja karena kita yang memang sudah benar-benar hidup dalam cakupan globalisasi sehingga apa yang kita lakukan tidak memerlukan sebuah panduan. Saat ini, kita diberikan kebebasan untuk bergabung dengan dunia luar termasuk kebebasan untuk turut serta menggunakan bahasa yang digunakan pihak luar tanpa lagi memperdulikan fakta bahwa kita memiliki panduan yang telah tersusun dengan rapih dan siap untuk digunakan.

Demikianlah bahwa nasib dunia kebahasaan (bahasa Melayu), baik di Indonesia maupun Malaysia, seperti berada di simpang jalan. Satu sisi bahasa Melayu di gadang-gadang mampu menjadi bahasa resmi internasional di

lingkungan Perhimpunan Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN). Namun di sisi lain sulit dipungkiri bahwa bahasa Melayu masih banyak diselimuti persoalan yang seyogyanya dapat diselesaikan dengan cepat dan bijak.

Di titik inilah MBIM menjadi institusi yang penting dijaga keberadaannya. Terlepas statusnya yang telah berubah wujud menjadi MABBIM—dengan berbagai pernik perubahan yang menghiasinya—diharapkan bahwa institusi ini tidak pernah melupakan spirit awal pergerakannya yang selalu berupaya menghadirkan keharmonisan—khususnya dalam dimensi kebahasaan—di antara sesama komunitas Melayu. Bahwa seiring banyaknya persoalan kebahasaan yang muncul, kerjasama seperti MBIM akan terus dibutuhkan sebagai sebuah forum penyelesaian, dan itulah mengapa kita memiliki beban moral untuk selalu merawatnya hingga kapanpun.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi Pemerintah (Sumber-Sumber Resmi Tercetak)

Background to Indonesia's policy towards Malaysia, (Federal Departement of Information, Kuala Lumpur, 1964)

Malaysia Year Book 1971 (Federal Departement of Information, Kuala Lumpur: A Malay Mail Publication, 1972)

Joint Agreement of the Minister of Education and Cultural of the Republic of Indonesia and the Minister of Education of the Kingdom of Malaysia on Education Cooperation 1972 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1972)

Laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Ejaan Yang Disempurnakan dalam Sidang Kabinet, 1 Agustus 1972 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1972)

Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Ejaan Yang Disempurnakan, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1972)

Persetudjuan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia tentang Kerdjasama dibidang Pendidikan, 23 Mei 1972 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1972)

Report of the Education Committee 1956, The Razak Report, (Kuala Lumpur, 1964)

Government of Malaysia, *Second Malaysia Plann 1971-1976*, (Kuala Lumpur: Government Press, 1971)

Government of Malaysia, *Malaysia Plann 3, 1976-1980*, (Kuala Lumpur: Government Press, 1976)

Speeches by the Deputy Prime Minister Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Al-Haj, 1965-1967, 3 Volumes, (Johore Bahru, State Printer Johore, 1969)

Wawancara

Wawancara dengan Anton Meoliono, (Pelaku Sejarah - Ketua Perwakilan MBIM)
Jalan Kartanegara No 51, Jakarta Selatan, 11 Februari 2011

Wawancara dengan Mien A Rifai, (Pelaku Sejarah - Anggota Perwakilan MBIM)
Tang Lebus, Ciomas, Bogor, 10 Februari 2012

Wawancara dengan Sugiyono, (Pelaku Sejarah - Ketua Perwakilan MABBIM) Pusat
Bahasa, Rawamangun, Jakarta Timur, 22 Februari 2012

Wawancara dengan Meity Takdir Qodratillah, (Pelaku Sejarah - Anggota Perwakilan
MABBIM) Pusat Bahasa, Rawamangun, Jakarta Timur, 22 Februari 2012

Wawancara dengan Harimurti Kridalaksana, (Pelaku Sejarah - Sektetaris Perwakilan
MBIM) Kampus UI Depok, 24 Februari 2012

Wawancara dengan Benny H Hoed, (Pelaku Sejarah-Kerjasama Indonesia-Malaysia
bidang olahraga tahun 1966) Kemang Utara Raya No.22, Jakarta Selatan, 24
Februari 2012

Wawancara dengan Djoko Kentjono, (Pelaku Sejarah - Anggota Perwakilan MBIM)
Ciputat, Tangerang, 25 Februari 2012

Wawancara dengan Liek Wilardjo, (Pelaku Sejarah - Anggota Perwakilan MBIM)
Gedung Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga,
Jawa Tengah, 29 Februari 2012

Wawancara dengan Sri Sukei Adimimarta, (Pelaku Sejarah - Anggota Perwakilan
MBIM) Rempoa, Tangerang, 12 Maret 2012

Artikel & Buku

Abdullah, Ahmad Kamal. "Kesusastraan Indonesia-Malaysia Mutakhir: Antara
Sensitiviti dan Imajinasi", Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia,
Susastra 3: Jurnal Ilmu Sastra dan Budaya, Vol.2. No. 3, 2006

Adimimarta, Sri Sukei. "Komisi Istilah Direktorat Bahasa dan Kesusastraan",
Bahasa dan Kesusastraan, Vol.1, No.1

Universitas Indonesia

- Ahmad, Hasan. "Peraturan2 Ejaan Sekarang", *Dewan Bahasa* No.15, 1971
- Ahmad, Zakaria Haji (Ed.). *Government and Politics of Malaysia*, (Singapore: Oxford Unicersity Press, 1987)
- Ali, Lukman. (ed.). *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Tjerman Manusia Indonesia Baru*, (Jakarta: Gunung Agung, 1967)
- . *Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2000)
- Ali, Fachry & Bahtiar Effendy. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekontruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1986)
- Andayana, Watson Barbara & Leonard Y Andayana. *A History of Malaysia*, (Honolulu, University of Hawai, 2001)
- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995)
- Anwar, Rosihian. *Indonesia 1966-1983: Dari Koresponden Kami di Jakarta* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992)
- Azam, Noor. *Perspektif 1969-1979* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981)
- Boileau, Julian M. *Golkar, Functional Group politics in Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi, Centre for Strategic and International Studies, 1983)
- Bhattacharjee, G.P. S, *Southeast Asian Politics: Malaysia and Indonesia*, (India: Minerva Associates PVT.LTD, 1976)
- Bowie, Alasdair & Danny Unger. *The Politics of Open Economies: Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand*, (New York: Cambridge University Press, 1997)
- Cabré, Maria Teresa. *Terminology: Theory, Methods, and Applications*, (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1999)
- Cady, John. F. *South East Asia: Its Historical Development*, (New York: Mcgraw-Hill, 1964)
- . *The History of Post War Southeast Asia: Independence Problems*, (Athens, Ohio: Ohio University Press, 1974)

Universitas Indonesia

- Case, William. *Elites and Regimes in Malaysia: A Constitutional Democracy Revisited*, (Victoria, Australia: Monash Asia Institute, 1996)
- Carstens, Sharon A. *Histories, Cultures, Identities: Studies in Malaysian Chinese Worlds* (Singapore: Singapore University Press, 2005)
- Cheah Boon Kheng. *Malaysia: The Making of A Nation*, (Singapore: ISEAS, 2003).
- Chin, Christine B. N. "The State of the 'State' in Globalization: Social Order and Economic Restructuring in Malaysia" *Third World Quarterly*, Vol. 21, No. 6, 2000
- Chin Yong Liow, Joseph. *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*, (London: RoutledgeCurzon, 2005)
- Chua Beng Huat (ed.). *Singapore Studies II, Critical Surveys of the Humanities and Social Sciences*, (Singapore: Singapore University Press, 1999)
- Cribb, Robert, *Historical Atlas of Indonesia* (Richmond Surrey: Curzon Press, 2000)
- Cribb, Robert & Audrey R.Kahin, *Historical Dictionary Of Indonesia*, (USA: Scarecrow Press, 2004)
- . *Digital Atlas of Indonesian History* (Copenhagen: Nias Press, 2010)
- Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia*, (Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1978)
- . *Government and Society in Malaysia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1996)
- Daftar Istilah MBIM (Hasil Sidang Ke-7-23 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia) 1974-1985: Istilah Sumber-Istilah Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986).
- Dang Thu Huong, Thi. *A Comparative Analysis of the Strategies the New Order and UMNO Regimes in Indonesia and Malaysia adopted to deal with Islam in 1965-1998*, (Jerman: Grind Verlag, 2005)
- Dewan Bahasa dan Pustaka dan Gabungan Persatuan Penulis Nasional, *Kertas Kerja Seminar Kesusastraan Nusantara, 1973*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1974).

- Emmerson, Donald K. (Ed.). *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2001)
- Faaland, Just & John Richard Parkinson, *Dasar Ekonomi Baru: Pertumbuhan Negara dan Pencapaian Ekonomi Orang Melayu*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991)
- Gordon, Bernard K. *The Dimensions of Conflict in Southeast Asia*, (New Jersey: Prentice Hall, 1966)
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI-Press, 1986)
- Goh, Charles T. *The May Thirteenth Incident and Democracy in Malaysia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1971)
- Halim, Amran (ed.). *Politik Bahasa Nasional: Kumpulan Makalah untuk "Pra Seminar Bahasa Nasional" dan "Seminar Bahasa Nasional", 1974 dan 1975*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)
- , *Bahasa dan Pembangunan Bangsa* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981)
- Hamzah, Mior, dkk. (ed.), *Ke Arah Pembentukan Istilah yang Sempurna, 29 Desember 1972-29 Desember 1992* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992)
- Husken, Frans, (ed.). *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial: Indonesia Di Bawah Orde Baru*, (Jakarta: Grasindo, 1997)
- John Boyce, Peter. *Malaysia and Singapore in International Diplomacy: Documents and Commentaries*, (Sidney: Sidney University Press, 1968)
- Kahin, G. Mc. (ed.), *Government and Politics of Southeast Asia*, (Ithaca, N.Y: Oxford University Press, 1969)
- Kari, Fatimah & Yong Sook Loo (ed.), *Applied Economics Issues in Malaysia*, (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2006)
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1993)

- Khoo Boo Teik. "Searching for Islam in Malaysian Politics: Confluences, Divisions and Governance," *Southeast Asia Research Centre Working Paper Series*, City University of Hong Kong, No. 72, September 2004
- King, Gary, Robert O. Keohane & Sidney Verba, *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*, (New Jersey: Princeton University Press, 1994)
- Kridalaksana, Harimurti. *The New Spelling for Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bhratara, 1968)
- & Djoko Kentjono, *Seminar Bahasa Indonesia 1968*, (Ende: Nusa Indah, 1971)
- & Djoko Kentjono, *Seminar Bahasa Indonesia 1972*, (Ende: Nusa Indah, 1972)
- Lee Hock Guan. "Ethnic Relations in Peninsular Malaysia: The Cultural and Economic Dimensions", ISEAS Working Papers, *Social and Cultural Issues*, No. 1, Agustus, 2000
- Legge, J.D. *Indonesia*, (USA: Prentice Hall, 1964)
- *Sukarno: A Political Biography*, (Sydney, Allen & Unwin, 1972)
- Lubis, Mochtar, *Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya, Seri 1: Politik Dalam Negeri dan Masalah Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997)
- Mackie, J.A.C. *Konfrontasi: the Indonesia-Malaysia Dispute, 1963-1966* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974)
- Mahathir, Mukhriz & Khairy Jamaludin, *Dasar Ekonomi Baru: Intipati*, (Kuala Lumpur: Utusan Pubs, 2004)
- Mahmood, Abdul Hamid, dkk. *Memartabatkan Warisan Pendeta Za'ba* (Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2005).
- Maidment, Richard & David Goldblatt, (Ed.). *Governance in the Asia-Pacific*, (London, Routledge, 1998)
- Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992)

Universitas Indonesia

- Mallarangeng, Rizal. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992*, (Jakarta: Freedom Institute, 2004)
- Mas'ood, Mohtar. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Masittah, Raja Ariffin, *Tokoh Pembinaan Bahasa Melayu Serantau: 35 Tahun MABBIM* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010)
- Means, G. *Malaysian Politics: The Second Generation*, (Singapore: Oxford University Press, 1991)
- Milne, R.S & Diane K. Mauzy. *Politics and Government in Malaysia*, (Singapore and Vancouver: Times Books International and University of British Columbia Press, 1980)
- . *Malaysian Politics under Mahathir*, (New York: Routledge, 1999)
- Mohammad, Mahathir. *The Malay Dilemma*, (Singapore: Times Book International, 1979)
- Muniandy, Kunaseelan. *Hubungan Malaysia Indonesia 1957- 1970*, (Kuala Lumpur: Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996)
- Noor, Farish A. *Islam Embedded: The Historical Development of the Pan-Malaysian Islamic Party PAS 1951-2003*, (Malaysian Sociological Research Institute, Kuala Lumpur, 2004)
- Omar, Asmah Haji. *The Teaching of Bahasa Malaysia in the Context of National Language Planning* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1976)
- . *Language and Society in Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982)
- . *Carik-Carik Bulu Ayam: Kisah Runding Bahasa Dunia Melayu*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010)
- Pluvier, J.M. *Confrontations: A Study in Indonesian Politics*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1965)
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975)

Universitas Indonesia

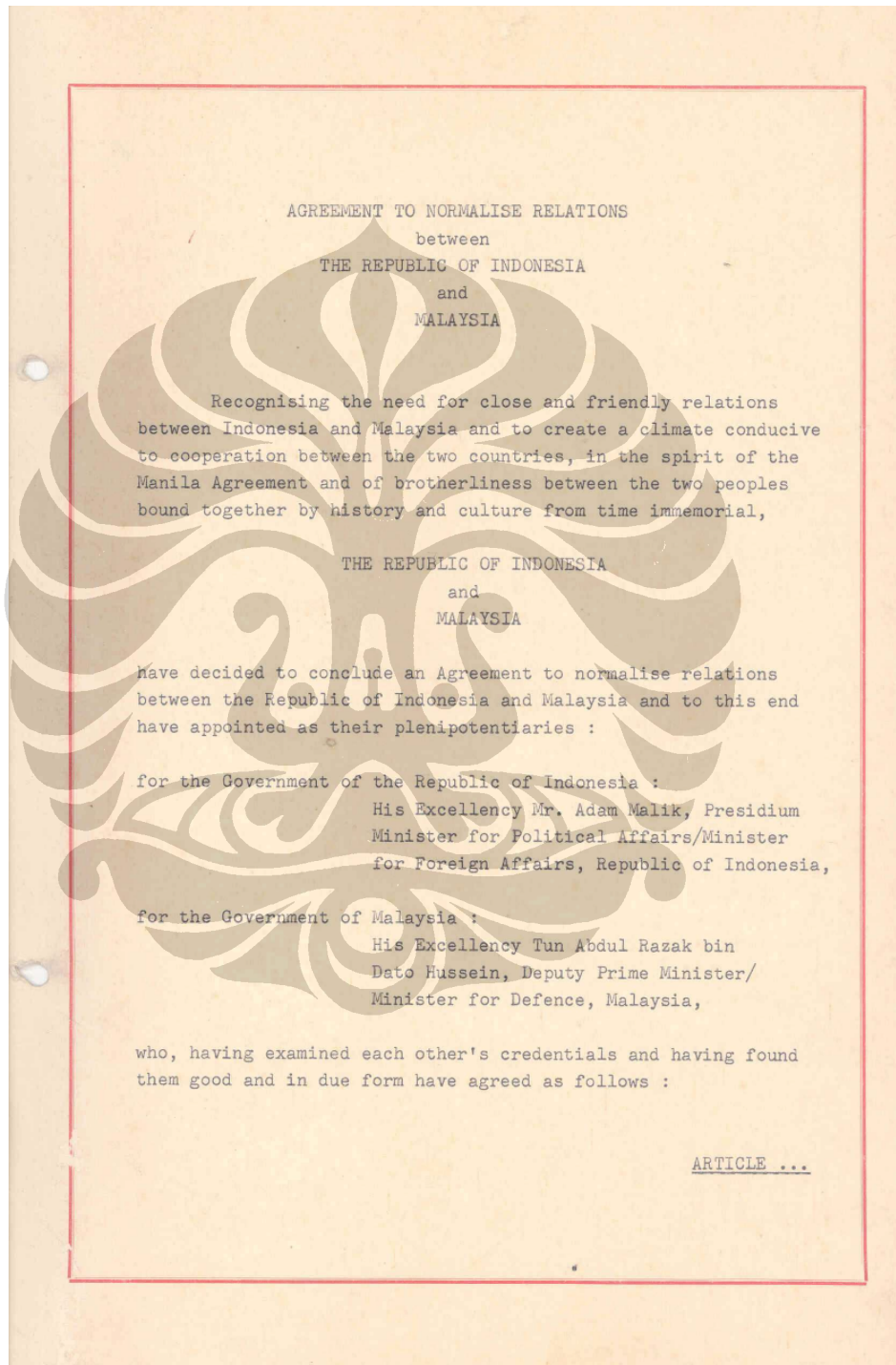
- Polomka, Peter. *Indonesia Since Sukarno*, (Penguin Book, 1971)
- Poulgrain, Graig. *The Genesis of Konfrontasi: Malaysia, Brunei, Indonesia. 1945-1965'*, (Bathurst: Crafword House Publishing, 1988)
- Purcell, Victor. *Malaysia*, (New York: Walker and Company, 1965)
- Puryadi, Dedi. *Perkembangan Peristilahan dalam Bahasa Indonesia: Sejarah, Hasil, dan Pemasyarakatan*, Disertasi, Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, 2006
- Reeve, David. *Golkar of Indonesia, An Alternative to the Party Systems*, (New York: Oxford University Press, 1985)
- Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Terj. Satrio Wahono, dkk), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005)
- Rubin, Joan, dkk, (ed.). *Language Planning Process* (New York: Mouton Publisher, 1977)
- Queljoe, David H de. *A Preliminary Study of Malay/Indonesian Orthography*, (Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University, 1969)
- Sabir, M. *ASEAN, Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1992)
- Said, Kamaruddin M. *500 Tahun Melayu Menghadapi Cabaran*, (Shah Alam: Kris Publications, 2004)
- Sakri, Adjat, (ed.). *Ilmuwan dan Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penerbit ITB, 1988).
- Samuel, Jerome. *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan*, (Jakarta: KPG, EFEO, 2008)
- Shaw, William. *Tun Razak, His Life and Times*, (London: Longman Group Ltd. 1976)
- Sihombing, Liberty P. (ed.). *Bahasawan Cendekia: Seuntai Karangan untuk Anton M. Moeliono* (Jakarta: PT. Intermedia, 1994)
- Subagyo, *Rekaman Peristiwa '84*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985)
- Sugono, Dendi (ed.). *Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998)

Universitas Indonesia

- Supra, Djajanto & Anton J.Lake. *Seminar Bahasa Indonesia 1972*, (Ende: Nusa Indah, 1972)
- Surodjo, Benedicta A. & J. M. V. Soeparno, *Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku: Pledoi Omar Dani* (Jakarta: Media Lintas Inti Nusantara untuk Institut Studi Arus Informasi, 2001)
- Tarling, Nicholas, *Southeast Asia: a Modern History*. (Oxford: Oxford University Press, 2005).
- Tim Dewan Bahasa dan Pustaka. *Bahasa dan Sastra Nusantara, Sejarah dan Masa depannya, Kertas Kerja Pertemuan Sasterawan Nusantara III*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1984)
- . *Dewan Bahasa dan Pustaka: A Language & Literature Planning & Development Agency of Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka/DBP, 1989)
- Tim Kompas, *Warisan (daripada) Soeharto* (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2008)
- Tim Persekutuan Bahasa Melayu, *Laporan tentang Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia: Kertas Kerja Kongres III Bahasa dan Persuratan Melayu Malaya*, (Universitas Malaya, 1956).
- Tim Ejaan Baru, *Ejaan Baru Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1967).
- Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984)
- . *Kesan dan Pesan MABBIM: Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993)
- . *Sosok Pokok Tokoh MABBIM, Dua Dasawarsa Kerjasama Kebahasaan*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993)
- . *Pemartabatan Bahasa Kebangsaan: Kondisi, Tantangan, dan Strategi*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- . *MBIM Hingga MABBIM: Bibliografi* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

- Tunku Abdul Rahman, *13 Mei: Sebelum dan Selepas*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2007).
- Umar, Musni dan Pudentia MPSS. *Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Indonesia-Malaysia* (Jakarta: INSED dan EPG Indonesia, 2011)
- Vatikiotis, Michael R.J. *Indonesian Politics under Suharto, Order, Development and Pressure for Change*. (London:RoutledgeCurzon, 1993)
- Vikor, Lars S. *Perfecting Spelling: Spelling Discussions and Reforms in Indonesia and Malaysia, 1900-1972*, (Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1988)
- . *Penyempurnaan Ejaan: Pembahasan dan Pembaharuan Ejaan di Indonesia dan Malaysia 1900-1972*, (Terj.), (Jakarta: Intermedia, 1990)
- Wariya, Chamil. *Abdullah Ahmad Badawi: Perjalanan Politik PM ke-5*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 2004)
- Weinstein, F.B. *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1976)
- Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*, (USA: Cambridge University Press. 1999)
- Yong, J.L.C. "Visions of 'Serumpun': Tun Abdul Razak and the golden years of Indo-Malay blood brotherhood, 1967-75", *South East Asia Research*, Vol. 11, No. 3, November 2003.
- Zaidan, Abdul Rozak. *Tradisi dan Kreativitas Sastra dalam Menjawab Tantangan Zaman: Dahulu, Sekarang, dan Yang Akan Datang: Risalah Seminar Kesusastraan I Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera), Jakarta, 16-17 Februari 1998*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999).
- Zaidi, Ilias. *Biografi Penulis dan Karya* (Kuala Lumpur: Fargoes, 1976)
- Zainal, Baharuddin, dkk. *Wajah: Biografi Seratus Penulis* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981)

Naskah Perjanjian Kesepakatan Melakukan Normalisasi Hubungan Kenegaraan



- 2 -

ARTICLE 1

1. The Government of Malaysia in order to resolve the problems between the two countries arising out of the formation of Malaysia, agrees to afford the people of Sabah and Sarawak who are directly involved, an opportunity to reaffirm, as soon as practicable, in a free and democratic manner through General Elections, their previous decision about their status in Malaysia.

ARTICLE 2

2. The Government of the Republic of Indonesia in its desire for close cooperation and friendship between Indonesia and Malaysia, agrees, and the Government of Malaysia concurs, that diplomatic relations between the two countries shall be established immediately and that they shall exchange diplomatic representation as soon as possible.

ARTICLE 3

3. The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia agree that in view of the above, hostile acts between the two countries shall cease forthwith.

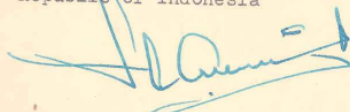
ARTICLE 4

4. This Agreement shall come into force on the date of signature.

This in witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by the respective Governments, have signed this Agreement.

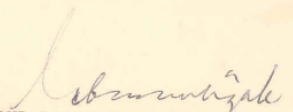
Done at Djakarta in duplicate, this eleventh day of August, 1966.-

For the Government of the
Republic of Indonesia



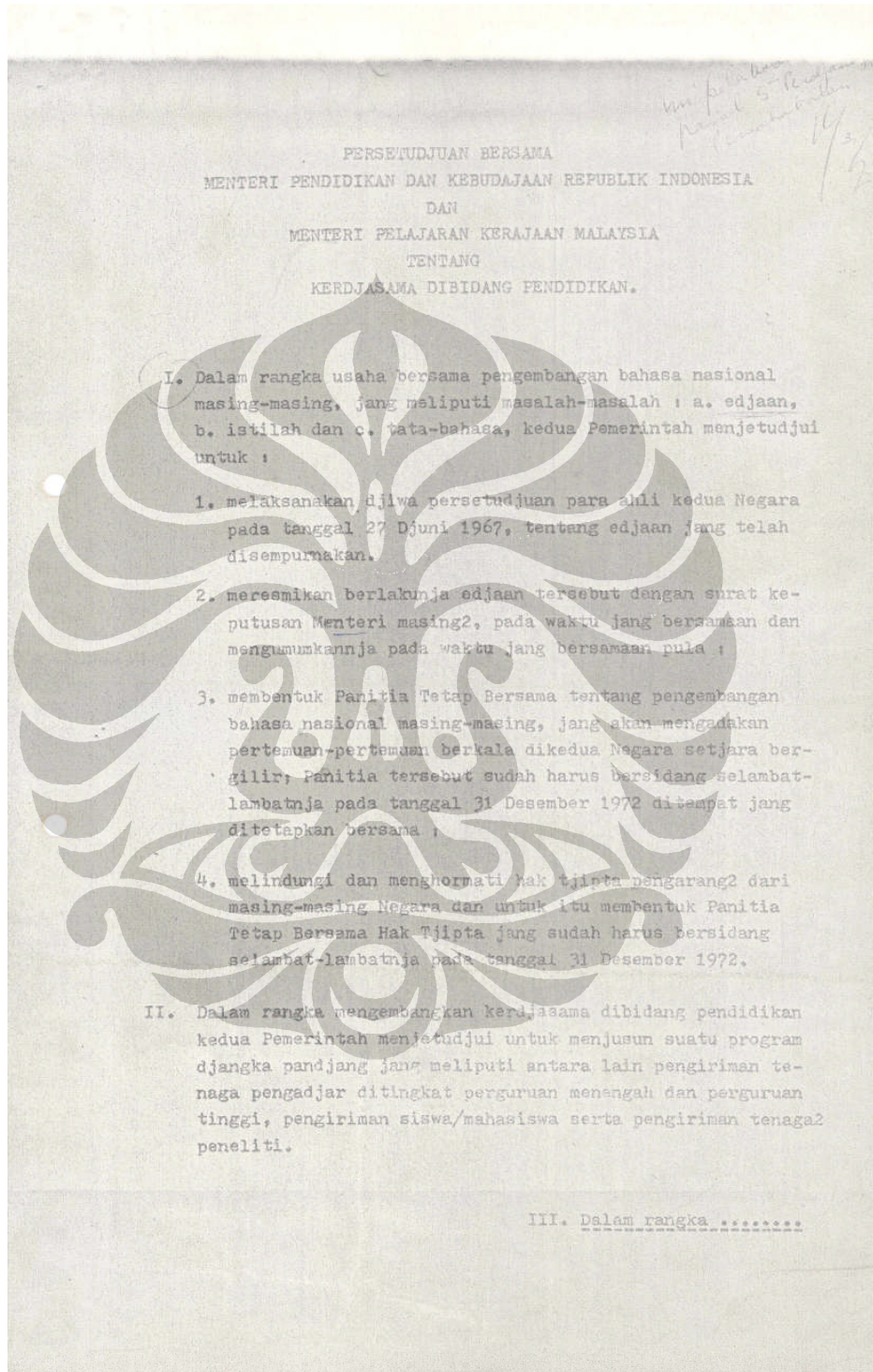
A D A M M A L I K .-

For the Government of
Malaysia



TUN ABDUL RAZAK BIN DATO HUSSEIN.-

Naskah Persetujuan Bersama Indonesia-Malaysia di Bidang Pendidikan



(Lanjutan)

III. Dalam rangka pengiriman tenaga pengadjar dan peneliti kedua Pemerintah menjetudjui untuk memperlakukan per-
sjaratan sama dengan pengadjar dan peneliti setempat
jang sama statusnja.

IV. Dalam rangka pengiriman tenaga pengadjar, peneliti dan mahasiswa, kedua Pemerintah menjetudjui untuk selalu menempuh prosedur melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipihak Indonesia dan Kementerian Pelajaran serta Universiti2 dipihak Malaysia.

V. Dalam rangka pertukaran pengalaman antara para pegawai utama kedua Negara, kedua Pemerintah menjetudjui untuk menjelenggarakan kundjungan-kundjungan berkala setjara bergilir dari pegawai2 utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pelajaran Kerajaan Malaysia.-

Djakarta, 23 Mei 1972.

MENTERI PELAJARAN
KERAJAAN MALAYSIA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

(HUSSEIN ONN).-

(MASHURI).-

Naskah Komunike Bersama Indonesia-Malaysia

KOMUNIKASI BERSAMA

Dalam rangka kunjungan Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia ke Indonesia, pada tanggal 23 Mei 1972 telah diadakan pertemuan antara :

a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, MA HURI, beserta staf, dan

b. Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia, MOHD HUSSEIN OMAR, beserta staf,

yang telah menghasilkan Persefudjuan Bersama yang meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

I. Dalam rangka usaha bersama pengembangan bahasa nasional masing-masing, yang meliputi masalah-masalah: a. edjaan, b. istilah dan c. tata-bahasa, kedua Pemerintah menje-
tudjuil untuk :

1. melaksanakan diijua persefudjuan para ahli kedua Negara pada tanggal 27 Djuni 1967, tentang edjaan yang telah disempurnakan;
2. meresmikan berlakunya edjaan tersebut dengan surat keputusan Menteri masing2, pada waktu yang bersamaan dan mengumpulkannya pada waktu yang bersamaan pula;
3. membentuk Panitia Tetap Bersama tentang pengembangan bahasa nasional masing2, yang akan mengadakan pertemuan2 berkala di kedua Negara selalva bergilir; Panitia tersebut sudah harus bersidang selambat-lambatnja pada tanggal 31 Desember 1972 ditempat yang ditetapkan bersama;
4. melindungi dan menghormati hak tjipta pengarang2 dari masing2 Negara dan untuk itu membentuk Panitia Tetap Bersama Hak Tjipta yang sudah harus bersidang selambat-lambatnja pada tanggal 31 Desember 1972.

II. Dalam rangka...

(Lanjutan)

II. Dalam rangka mengembangkan kerja sama dibidang pendidikan kedua Pemerintah menyetujui untuk menyusun suatu program jangka panjang yang meliputi antara lain pengiriman tenaga pendajar dibidang peruruan menengah dan peruruan tinggi, pengiriman siswa/mahasiswa serta pengiriman tenaga2 peneliti.

III. Dalam rangka pengiriman tenaga pendajar dan peneliti kedua Pemerintah menyetujui untuk memperlakukan persjantaran sama dengan pendajar dan peneliti setempat yang sama statusnya.

IV. Dalam rangka pengiriman tenaga pendajar, peneliti dan mahasiswa, kedua Pemerintah menyetujui untuk selalu menepuh prosedur melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipihak Indonesia dan Kementerian Pelajaran serta Universiti2 dipihak Malaysia.

V. Dalam rangka bertukaran pengalaman antara para pegawai utama kedua Negara, kedua Pemerintah menyetujui untuk menjelenggarakan kunjungan-kunjungan berkala setjara bergilir dari pegawai2 utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pelajaran Kerajaan Malaysia.

Djakarta, 23 Mei 1972.

MENTERI PELAJARAN
KERAJAAN MALAYSIA.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

TTD

TTD

(HUSSEIN ONN).-

(MASHURI).-

Piagam Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia

**PIAGAM
MAJELIS BAHASA INDONESIA-MALAYSIA (MBIM)**

Sebagai lanjutan dari Komunique Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia pada tanggal 23 Mei 1972 yang, antara lain, menyebutkan bahwa

- 1) melaksanakan jiwa persetujuan para ahli kedua negara pada tanggal 27 Juni 1967 tentang ejaan yang disempurnakan;
- 2) meresmikan berlakunya ejaan tersebut dengan surat keputusan Menteri masing-masing, pada waktu yang bersamaan dan mengumumkan pada waktu yang bersamaan pula;
- 3) membentuk panitia tetap bersama tentang pengembangan bahasa nasional masing-masing yang akan mengadakan pertemuan-pertemuan berkala di kedua negara secara bergilir;

maka pertemuan antara Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia yang telah ditetapkan oleh Menteri masing-masing negara dan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 26 hingga Desember 1972 bersetuju mengenai hal-hal berikut.

- 1) Kedua negara membentuk suatu majelis tetap bersama yang disebut Majelis bahasa Indonesia-Malaysia yang berfungsi sebagai berikut.
 - a) bertindak sebagai suatu badan bersama yang akan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk memikirkan, menelaah, dan memperbincangkan bersama di bidang tata bahasa, tata istilah, ejaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan soal bahasa pada umumnya di kedua negara Indonesia dan Malaysia;
 - b) menampung dan menyalurkan bahan-bahan mengenai bahasa dan kedua belah pihak untuk kegunaan dan kajian bersama;
 - c) menyerahkan kepada Menteri masing-masing negara bahan-bahan bahasa yang menyangkut kepentingan nasional negara masing-masing untuk dipertimbangkan dan diputuskan.
- 2) Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia dianggotai oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia.
- 3) Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia apabila bersidang hendaklah dihadiri oleh wakil-wakil yang ditetapkan oleh Menteri yang berkenaan di negara masing-masing.
- 4) Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia bersidang sekurang-kurangnya dua kali setahun. Tempat persidangan ditentukan secara bergilir.
- 5) Waktu untuk persidangan ditentukan dalam sidang sebelumnya.
- 6) Persidangan dipimpin dan diurus oleh anggota negara tempat persidangan dilangsungkan.
- 7) Tata Kerja Majelis Bahasa ini adalah sebagai berikut.
 - a) Tugas majelis Bahasa dilaksanakan dengan
 - (1) tukar-menukar bahan;
 - (2) sanggar kerja;
 - (3) persetujuan bersama.
 - b) Tukar Bahan
 - (1) tukar-menukar bahan dilakukan dengan surat-menyurat;
 - (2) bahan-bahan yang diberikan atau diterima adalah yang diminta atau tidak diminta oleh kedua belah pihak.
 - c) Sanggar Kerja
 - (1) sanggar kerja, yang dihadiri oleh anggota-anggota Majelis Bahasa, diselenggarakan untuk bertukar pikiran secara mendalam mengenai suatu masalah;
 - (2) sanggar kerja diarahkan untuk mencapai pendekatan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia;
 - (3) keputusan sanggar kerja hanya akan diumumkan setelah mendapat izin dari Menteri kedua negara.
 - d) Persetujuan bersama bersifat politis dan menjadi wewenang Menteri masing-masing negara.

Kuala Lumpur, 29 Desember 1972

Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia,	Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia,
Dr. Amran Halim Ketua	Datuk Haji Sujak bin Rahiman Pengerusi

(Sumber: Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992)

Lampiran V

Contoh Tanda Tangan Ketua (Pengerusi) Perwakilan MBIM



(Sumber: Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, *Persidangan dan Keputusan 1972-1992*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992)

DAFTAR NAMA PERWAKILAN SIDANG MBIM (1972-1985)

Sidang Pertama (Kuala Lumpur, 26 - 30 Desember 1972)

Malaysia

1. Tuan Haji Sujak Rahiman
2. Encik Hassan Ahmad
3. Dr. Mohd. Ghazali Hj. Abdul Rahman
4. Dr. Asmah Haji Omar
5. Dr. Abdullah Hassan
6. Encik Abdul Rahman Arshad
7. Dr. Noramly Muslim
8. Encik Kamaluddin Muhammad
9. Encik Jalal Ahmad Abdullah

Indonesia

1. Dr. Amran Halim
2. Bapak Anton M. Moeliono
3. Bapak Lukman Ali
4. Bapak Harimurti Kridalaksana
5. Prof. A. Hakim Nasoetion
6. Dr. Hadyana Pudjaatmaka
7. Bapak Mucharam

Sidang Kedua (Bogor, Jawa Barat, 12 - 14 Agustus 1973)

Malaysia

1. Tuan Haji Sujak Rahiman
2. Encik Hassan Ahmad
3. Dr. Asmah Haji Omar
4. Dr. Ghazali Haji Abdul Rahman
5. Dr. Noramly Muslim
6. Dr. Abdullah Hassan
7. Encik Abdul Rahman Arshad
8. Encik Kamaluddin Muhammad
9. Encik Jalal Ahmad Abdullah

(Lanjutan)

Indonesia

1. Dr. Amran Halim
2. Bapak Anton M. Moeliono
3. Prof. Ir. H. Johannes
4. Nyonya S.W. Rudjiati Muljadi
5. Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka
6. Dr. Muljanto Sumardi
7. Prof. Dr. A. Hakim Nasoetion

Sidang Ketiga (Pulau Pinang, 2 - 5 Desember 1973)

Malaysia

1. Tuan Haji Sujak Rahiman
2. Encik Hassan Ahmad
3. Dr. Ghazali Haji Abdul Rahman
4. Dr. Asmah Haji Omar
5. Dr. Abdullah Hassan
6. Dr. Noramly Muslim
7. Encik Abdul Rahman Arshad
8. Encik Kamaluddin Muhammad
9. Dr. Chio Hwi Tek
10. Encik fatal Ahmad Abdullah

Indonesia

1. Dr. Amran Halim
2. Prof. Ir. Johannes
3. Drs. Anton M. Moeliono
4. Dra. Rudjiati Mulyadi
5. Dr. Muljanto Sumardi
6. Drs. Harimurti Kridalaksana
7. Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka
8. Mucharam Suryawidjaja (Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia)

Sidang Keempat (Semarang, Indonesia, 24 - 26 Juni 1974)

Malaysia

1. Tuan Haji Sujak Rahiman
2. Tuan Haji Hassan Ahmad

(Lanjutan)

3. Prof. Dr. Ghazali Haji Abdul Rahman
4. Dr. Asmah Haji Omar
5. Dr. Abdullah Hassan
6. Dr. Noramly Muslim
7. Encik Kamaluddin Muhammad
8. Dr. Chio Hwi Tek
9. Encik Ismail Dahaman

Indonesia

1. Dr. Amran Halim
2. Prof. Andi Hakim Nasoetion
3. Prof. H. Johannes
4. Prof. Achmad Amiruddin
5. Drs. Anton M. Moeliono
6. Dr. Mien A. Rifai
7. Djoko Kentjono
8. S. Effendi
9. I Made Sandy
10. Drs. Harimurti Kridalaksana

Sidang Kelima (Johor Bahru, Malaysia, 2 - 4 Desember 1974)

Malaysia

1. Tuan Haji Sujak Rahiman
2. Tuan Haji Hassan Ahmad
3. Prof. Dr. Mohd. Ghazali Haji Abdul Rahman
4. Dr. Asmah Haji Omar
5. Dr. Abdullah Hassan
6. Dr. Noramly Muslim
7. Encik Kamaluddin Muhammad
8. Encik Abdul Razak Ismail
9. Encik Alias Shamsuddin
10. Dr. Chio Hwi Tek
11. Puan Zaharah Haji Mahmud
12. Encik Ismail Dahaman

Indonesia

1. Dr. Amran Halim
2. Dra. Rudjiati Muljadi
3. Drs. Anton M. Moeliono
4. Drs. Harimurti Kridalaksana
5. Drs. Lukman Ali

(Lanjutan)

6. Drs: Djoko Kentjono
7. Dr. Mien A. Rifai
8. Prof. Dr. Achmad Amiruddin
9. Dra. Sri Sukesri Adiwimarta
10. Drs. Lukman Hakim

Sidang Keenam (Jakarta, 14 - 18 Julai 1975)

Malaysia

1. Tuan Haji Sujak Rahiman
2. Tuan Haji Hassan Ahmad
3. Prof. Dr. Mohd. Ghazali Hj. Abdul Rahman
4. Dr. Asmah Haji Omar
5. Dr. Abdullah Hassan
6. Dr. Noramly Muslim
7. Encik Kamaluddin Muhammad
8. Encik Alias Shamsuddin
9. Dr. Chio Hwi Tek
10. Puan Zaharah Haji Mahmud
11. Encik Ismail Dahaman

Indonesia

1. Dr. Amran Halim
2. Drs. Anton M. Moeliono
3. Prof. Ir. H. Johannes
4. Prof. Dr. Andi Hakim Nasoetion
5. Prof. Dr. A. Amiruddin
6. Dr. Mien A. Rifai
7. Dr. I. Made Sandy
8. Ny. S.W. Rudjiati Mulyadi
9. Drs. Lukman All
10. Drs. Harimurti Kridalaksana

Sidang Ketujuh (Kuala Lumpur, 4 - 9 Februari 1976)

Malaysia

1. Datuk Haji Sujak Rahiman
2. Tuan Haji Hassan Ahmad
3. Datuk Prof. Mohd. Ghazali Haji Abdul Rahman
4. Prof. Dr. Asmah Haji Omar
5. Dr. Abdullah Hassan
6. Cik Asiah Abu Samah

(Lanjutan)

7. Encik Kamaluddin Muhammad
8. Encik Alias Shamsuddin
9. Encik Ismail Dahaman
10. Prof. Madya Dr. Awang Had Salleh
11. Dr. Amir Awang
12. Encik Abdul Aziz Din
13. Prof. Madya Abu Bakar Hamid
14. Dr. Muhammad Hj. Salleh
15. Dr. Abdul Halim Hassan
16. Dr. Shaharir Mohd. Zain
17. Dr. Mohd. Zawawi Ismail
18. Dr. Sulaiman Haji Nordin
19. Dr. Ariffin Suhaimi
20. Dr. Chio Hwi Tek
21. Encik Farid Wardi Sudin
22. Encik Hashim Abdullah

Indonesia

1. Dr. Amran Halim
2. Drs. Anton M. Moeliono
3. Drs. Lukman Ali
4. Ir. Soefaat
5. Dr. Goeswono Soepardi
6. Prof. Dr. Winarno Surachmad
7. Drs. Harimurti Kridalaksana
8. Drs. S. Effendi
9. Drs. M. Salleh Saad
10. Adun Sjubarasa

Sidang Kedelapan (Bogor, 9 - 13 Agustus 1976)

Malaysia

1. Tuan Haji Hassan Ahmad
2. Datuk Prof. Dr. Mohd. Ghazali Haji Abdul Rahman
3. Prof. Madya Dr. Mohd. Zawawi Ismail
4. Prof. Madya Dr. Ariffin Suhaimi
5. Prof. Madya Dr. Abdul Halim Hassan
6. Prof. Madya Dr. Awang Had Salleh
7. Prof. Madya Dr. Abdullah Hassan
8. Prof. Madya Abu Bakar Hamid
9. Dr. Shaharir Mohd. Zain
10. Tuan Haji Nik Mohyiddin Musa
11. Encik Abdul Aziz Din
12. Encik Abdul Samad Hadi
13. Encik Hashim Abdullah

(Lanjutan)

14. Cik Asiah Abu Samah
15. Encik Alias Shamsuddin
16. Encik Ismail Dahaman

Indonesia

1. Dr. Amran Halim
2. Dr& Anton M. Moeliono
3. Drs. Lukman Ali
4. Dra. Ny. S.W. Rudjiati Mulyadi
5. Dra. Sri Sukesu Adiwimarta
6. Prof. Ir. H. Johannes
7. Dr. Liek Wilardjo
8. Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasoetion
9. Dr. Bana Kartasasmita
10. Dr. Mien A. Rivai
11. Dr. Alina Sutasurya
12. Dr. Goeswono Soepardi
13. Ir. Syafii Manan
14. Ir. Soefaat
15. Ir. Yuswadi
16. Dr. I. Made Sandy
17. Dr. M.M. Poerbohadiwidjojo
18. Drs. Ismail Arianto
19. Dra. Elisa Harahap
20. Drs. Harimurti Kridalaksana
21. Drs. S. Effendi
22. Drs. M. Saleh Saad
23. Drs. M. S. Hutagalung
24. Laksamana Drs. Haji Bahrum Rangkuti
25. Drs. Soedarno

Sidang Kesembilan (Kuantan, 22 - 26 Februari 1977)

Malaysia

1. Tuan Haji Hassan Ahmad
2. Prof. Dr. Asmah Haji Omar
3. Prof. Madya Dr. Abdullah Hassan
4. Dr. Noramly Muslim
5. Haji Kamaluddin Muhammad
6. Cik Asiah Abu Samah
7. Prof. Madya Alias Shamsuddin
8. Dr. Baharuddin Yatim
9. Dr. Shahrir Mohd. Zain

(Lanjutan)

10. Prof. Madya Dr. Ariffin Suhaimi
11. Prof. Madya Dr. Abdul Halim Hassan
12. Dr. Sulaiman Nordin
13. Prof. Madya Abdul Aziz Din
14. Prof. Madya Farid Wardi Sudin
15. Encik Ismail Dahaman

Indonesia

1. Prof. Dr. Amran Halim
2. Drs. Harimurti Kridalaksana
3. Ir. Soefaat
4. Ir. Yuswadi Salya
5. Dr. Goeswono Soepardi
6. Ir. Syaflı Manan
7. Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasoetion
8. Dr. Bana Kartasasmita
9. Dr. Liek Wilardjo
10. Dr. Mien A. Rifai

Sidang ke-10 (Jakarta, 3 - 8 Oktober 1977)

Malaysia

1. Tuan Haji Hassan Ahmad
2. Prof. Dr. Asmah Haji Omar
3. Dr. Zakaria Awang Soh
4. Tuan Haji Nik Mohyideen Musa
5. Dr. Mohd. Sham Kassim
6. Encik Abdul Halim Haji Mohyiddin
7. Encik Mohd. Noh Che'Noh
8. Encik Ismail bin Dahaman

Indonesia

1. Prof. Dr. Amran Halim
2. Drs. Anton M. Moeliono
3. Drs. Harimurti Kridalaksana
4. Prof. Dr. Sutarman
5. Dokter S. Amin Singgih
6. Drs. M.M. Purbo Hadiwidjojo
7. Drs. Ilih Abdurachim
8. Drs. Ramli Harun
9. Drs. Zainal Abidin Ahmad
10. Drs. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
11. Drs. Komaruddin

(Lanjutan)

12. Dr. Rustam Didong
13. Drs. M. S. Sihite
14. M. Moeslim

Sidang ke-11 (Kuala Lumpur, 12 -18 Maret 1978)

Malaysia

1. Tuan Haji Hassan bin Ahmad
2. Datuk Prof. Dr. Mohd. Ghazali Haji Abd Rahman
3. Prof. Dr. Asmah Haji Omar
4. Prof. Madya Dr. Abdullah Hassan
5. Dr. Noramly Muslim
6. Cik Asiah Abu Samah
7. Tuan Haji Kamaluddin Muhammad
8. Prof. Madya Alias Shamsuddin
9. Encik Shaari bin Isa
10. Encik Zulkifli Haji Mustapha
11. Dr. Hussain Abdul Ghani
12. Drs. Enoch Markum
13. Dr. Mohd. Sham Kassim
14. Encik Mohd. Nor Che' Noh
15. Encik Rahmat Hussin
16. Encik Dol Ramly
17. Encik Hashim Amir Hamzah
18. Encik Shamsuddin Kassim
19. Prof. Madya Nik Abdul Rashid Nik Abdul Majid
20. Encik Ismail Dahaman

Indonesia

1. Prof. Dr. Amran Halim
2. Drs. Anton M. Moeliono
3. Drs. Julius Habib
4. Dra. Sri Sukesri Asiwimarta
5. Drs. Djajanto Supraba
6. Drs. Komaruddin
7. Dr. Sumarmo Markam
8. Drs. M.S. Sihite
9. Drs. Onong Uchjana Effendy
10. B.N. Marbun

(Lanjutan)

Sidang ke-12 (Jakarta, 14 - 20 November 1978)

Malaysia

1. Datuk Haji Hassan Ahmad
2. Datuk Prof. Dr. Mohd. Ghazali Haji Abdul Rahman
3. Prof. Madya Dr. Abdullah Hassan
4. Prof. Madya Dr. Farid Onn
5. Cik Asiah Abu Samah
6. Encik Hashim Amir Hamzah
7. Prof. Madya Nik Abdul Rashid Nik Abdul Majid
8. Dr. Mohd. Sham Kassim
9. Dr. Anuar Haji Masduki
10. Dr. Syed Mohsin Syed Sahil
11. Encik Muhamad Awang
12. Encik Mat Saat Baki
13. Encik Ismail Dahaman
14. Encik Manshoor Haji Ahmad

Indonesia

1. Prof. Dr. Amran Halim
2. Drs. Anton M. Moeliono
3. Drs. Harimurti Kridalaksana
4. Dr. Hendra T. Laksman
5. Drs. Cipatasurasa
6. Drs. M. Bambang Lesmono
7. Sdr. B.N. Marbun
8. Drs. Pariata Westra
9. Drs. Onong Uchjana Effendi
10. Drs. Suwardi Idris
11. Drs. Enoch Markum
12. Dra. Ediasri Totoatmodiwirjo

Sidang ke-13 (Melaka, 3 - 7 September 1979)

Malaysia

1. Datuk Haji Hassan Ahmad
2. Prof. Dr. Mohd. Ghazali Haji Abdul Rahman
3. Prof. Dr. Asmah Haji Omar
4. Prof. Dr. Normaly Muslim
5. Cik Asiah Abu Samah
6. Prof. Madya Dr. Farid M. Onn
7. Tuan Haji Amar Juhari Moain
8. Datuk Dr. Hussain Abdul Ghani

(Lanjutan)

9. Encik Ismail Dahaman
10. Dr. Mohd. Sham Kassim
11. Dr. Anuar Haji Masduki
12. Dr. Syed Mohsin Syed Sahil
13. Dr. Mohd. Suhaimi Mustapha
14. Encik Muhamad Awang
15. Dr. Ling Chu Poh
16. Encik Zawawi Mahmood
17. Dr. Mansor Haji Salleh
18. Puan Siti Zauyah Darus
19. Encik Nasiman Sapari

Indonesia

1. Prof. Dr. Amran Halim
2. Drs. Anton M. Moeliono
3. Dra. Sri Sukesri Asiwimarta
4. Dokter Hendra T. Laksman
5. Drs. Tjiptasoerasa
6. Drs. M. Bambang Lesmono
7. Ir. Thio Khan Hie
8. Drs. Enoch Markum
9. Dra. Edisari Toto Atmodiwirjo
10. Dr. Ir. Darmawan Harsokoesoemo
11. Dr. Goeswin Agoes

Sidang ke-14 (Bali, 10-14 Maret 1980)

Malaysia

1. Datuk Haji Hassan bin Ahmad
2. Datuk Prof. Dr. Haji Mohd. Ghazali
3. Haji Abdul Rahman
4. Prof. Dr. Asmah Hj. Omar
5. Prof. Madya Dr. Farid M. Onn
6. Prof. Madya Amat Juhari Moain
7. Tuan Syed Abu Bakar Syed Ahmad Barakbah
8. Ir. Mohd. Zawawi Mahmood
9. Dr. H. Hussin
10. Encik Mohd. Zuhudi Muda
11. Prof. Madya Dr. Mohd. Nawi Abd. Rahman
12. Prof. Madya Dr. Mohd. Fauzi Haji Yaacob
13. Prof. Madya Dr. Harun Derauh
14. Prof. Madya Hairi Abdullah
15. Encik Ismail Dahaman
16. Tuan Haji Khalid M. Hussain
17. Encik Hussein Jamil

(Lanjutan)

Indonesia

1. Prof. Dr. Amran Halim
2. Drs. Anrini Sofion
3. Drs. M.J. Melalatoa
4. Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasoetion
5. Dr. Barizi
6. Ir. Thio Kian Hie
7. Drs. M.M. Purbo-Hadiwidjojo
8. Dr. Ir. Darmawan Harsokoesoemo
9. Drs. Warsowiwoho
10. Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar
11. Drs. Anidal Hasjir

Sidang ke-15 (Kota Kinabalu, 2-6 September 1980)

Malaysia

1. Y.B. Datuk Haji Hassan Ahmad
2. Prof. Dr. Asmah Haji Omar.
3. Prof. Madya Dr. Abdullah Hassan
4. Prof. Madya Haji Arnat Juhari Moain
5. Cik Asiah Abu Samah
6. Encik Ismail bin Dahaman
7. Prof. Madya Hairi bin Abdullah
8. Encik Nazaruddin Mohd. Jali
9. Prof. Madya Dr. Mohd. Fauzi Haji Ya'acob
10. Prof. Madya Dr. Mohd. Nawī Abd. Rahman
11. Dr. H. Husin
12. Puan Siti Zaayah Darus
13. Encik Abd. Aziz Mohamad
14. Encik Azmi Abd. Khalid
15. Prof. Madya Dr. Zakaria Awang Soh
16. Encik Teh Siew Keat
17. Dr. Ismail Mohd. Nor
18. Encik Peh Cheng Hock

Indonesia

1. Prof. Dr. Amran Halim
2. Drs. Anton M. Moeliono
3. Dra. Sri Sukesri Adiwimarta
4. Dra. Anidal Hasjir
5. Dra. Anrini Sofion
6. Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasoetion
7. Ir. Thio Kian Hie

(Lanjutan)

8. Drs. R. Wikarno
9. Djenal Siddik
10. Komar Kantaatmadja S.H.
11. Dr. Barizi
12. Ir. Abdul Rauf Rambe
13. J. Soepranto
14. Drs. M.M. Purbo-Hadiwidjojo
15. Ir. Ny. Indresari Guritno
16. Ir. Moerwanto Martodinomo

Sidang ke-16 (Yogyakarta, 15 - 20 Mac 1981)

Malaysia

1. Datuk Haji Hassan bin Ahmad
2. Prof. Dr. Asmah Haji Omar
3. Prof. Madya Dr. Farid M. Onn
4. Cik Asiah binti Abu Samah
5. Dr. Chio Hwi Tek
6. Dr. H. Hussin
7. Encik Abd. Aziz bin Mohamad
8. Prof. Madya Hajah Zaharah Mahmud
9. Puan Normah Aris
10. Encik Ismail bin Ahmad
11. Encik Chow Kok Kee
12. Prof. Madya Dr. Zakaria Awang Soh
13. Prof. Madya Dr. Ismail Mohd. Nor
14. Encik Peh Cheng Hock
15. Ir. Law Kong Fook
16. Encik Abd. Ghaffar Laili
17. Haji Sulaiman b. Haji Mohd. Nor

Indonesia

1. Prof. Dr. Amran Halim
2. Dr. Anton M. Moeliono
3. Dra. Sri Sukesi Adiwimarta
4. Ir. Thio Kian Hie
5. Ir. Achmad Zamil Amadar
6. Dra. Sri Timur Suratman
7. Djenal Sidik Suraputra, S.H.
8. Ny. Sri Setyaningsih, S.H.
9. Dr. S.W. Rujati Mulyadi
10. Prof. Drs. Soesilo
11. Drs. Suryadi Wh.
12. Dra. Saodah N. Elgersma

(Lanjutan)

13. Dr. Masri Singarimbun
14. Kartomo Wirosuharjo S.E., M.A.
15. Dra. Ny. Azwini Kartoyo
16. Maman Sumantri
17. Drs. M.M. Purbo-Hadiwidjojo
18. Ir. Ny. Indreswari Guritno
19. Ir. Daniel Murdiyarso, M.S.
20. Dr. Marwanto Martodinoto
21. A. Latif, M.A.
22. Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka
23. Umi Basiroh

Sidang ke-17 (Kuala Lumpur, 24-29 Agustus 1981)

Malaysia

1. Datuk Haji Hassan bin Ahmad
2. Datuk Prof. Dr. Mohd. Ghazali bin Haji Abd. Rahman
3. Prof. Dr. Asmah bind Haji Omar
4. Prof. Madya Dr. Abdullah Hassan
5. Prof. Madya Dr. Farid M. Onn
6. Prof. Madya Haji Amat Juhari Moain
7. Cik Asiah Abu Samah
8. Dr. H. Hussin
9. Prof. Madya Dr. Zakaria Awang Soh
10. Prof. Madya Dr. Ismail Mohd. Noor
11. Encik Peh Cheng Hock
12. Ir. Law Kong Fook
13. Prof. Madya Zahrah Buang
14. Encik Shaari Isa
15. Encik Ahmad Berek
16. Datuk Dr. Hussain bin Abd. Ghani
17. Prof. Madya Dr. Anuar Masduki
18. Dr. Sham Kassim
19. Prof. Madya Hajah Zaharah Mahmud
20. Encik Ismail Ahmad
21. Encik Chow Kok Kee
22. Encik Abdul Ghaffar bin Laili

Indonesia

1. Prof. Dr. Amran Halim
2. Dr. Anton M. Moeliono
3. Dra. Sri Sukesu Adiwimarta
4. Drs. M.M. Poerbo-Hadiwidjojo

(Lanjutan)

5. Drs. Kartomo Wirosuhardjo S.E.M.A
6. Prof. Drs. Soesilo Prawirowardoyo
7. Drs. Rush Ramli
8. Zeid Ahmad, S.E.
9. Dr. Kemal N. Siregar, S.K.M.

Sidang ke-18 (Palembang, 28 Maret - 3 April 1982)

Malaysia

1. Datuk Haji Hassan bin Ahmad
2. Prof. Dr. Asmah Haji Omar
3. Prof. Madya Dr. Farid M. Onn
4. Prof. Madya Dr. Abdullah Hassan
5. Prof. Madya Haji Amat Juhari Moain
6. Cik Asiah binti Abu Samah
7. Datuk Dr. Haji Hussain bin Abd. Ghani
8. Encik Shaari bin Isa
9. Datin Rugayah bt. Abd. Rashid
10. Puan Rohani Rustam
11. Encik Omar bin Abd. Razak
12. Dr. Mamot bin Said
13. Dr. Ramli Abdullah
14. Prof. Madya Dr. Zakaria Awang Soh
15. Prof. Madya Dr. Ismail bin Mohd. Noor
16. Ir. Law Kong Fook
17. Encik Abd. Ghaffar b. Laili
18. Tuan Haji Sulaiman bin Mohd. Noor

Indonesia

1. Prof. Dr. Amran Halim
2. Dr. Anton M. Moeliono
3. Dra. Sri Sukesri Adiwimarta
4. Drs. Rush Ramli
5. Bahri Nurdin
6. Drs. Soewarso
7. Dr. Kemal N. Siregar
8. Ny. L.K. Somadikarta
9. Dra. Ipon Sukarsih Purawijaya
10. Prof. Dr. Ir. H. Siti Sutarmi Tjitrosomi
11. Prof. Dr. Nawangsari Sugiri
12. Prof. Dr. S. Somadikarta
13. Ir. Soesarsono Wijandi
14. Drs. M. Bambang Lesomono

(Lanjutan)

15. Drs. Djoko Hargono
16. Drs. M.M. Purbo-Hadiwidjojo
17. Ir. Ny. Indreswari Guritno
18. Ir. Moerwanto Martodinomi

Brunei (Pemerhati)

1. Haji Ahmad Kadi
2. Haji Yahya bin Haji Ibrahim
3. Haji Mohammad Suni bin Hj. Idris

Sidang ke-19 (Kuala Lumpur, 8 -13 November 1982)

Malaysia

1. Datuk Haji Hassan bin Ahmad
2. Prof. Abdullah Hassan
3. Cik Asiah bt. Abu Samah
4. Prof. Madya Dr. Farid M. Onn
5. Prof. Madya Haji Amat Juhari bin Moain
6. Datin Azizah Mokhzani
7. Datuk Prof. Dr. Haji Mohd. Ghazali bin Haji Abd. Rahman
8. Tuan Syed Abu Bakar Barakbah
9. Encik Abd. Ghaffar Laili
10. Datin Rogayah bt. Abd. Rashid
11. Puan Rohani Rustam
12. Prof. Madya Dr. Zakaria Awang Soh
13. Prof. Madya Dr. Ismail Mohd. Noor
14. Ir. Law Kong Fook
15. Encik Peh Cheng Hock
16. Prof. Madya Zahrah Buang
17. Drs. Haji Khalid M. Hussain
18. Prof. Madya Dr. Ismail Hamzah
19. Dr. Ramli Abdullah
20. Encik Mohd. Salleh bin Mohd. Said
21. Prof. Madya Dr. Mansor Salleh
22. Prof. Madya Shahimi Hj. Shafie
23. Prof. Madya Abdul Hamid Hamidon
24. Encik Omar Abd. Razak
25. Encik Abdullah Ariffin
26. Prof. Dr. Ahmad Mandzan Ayob
27. Dr. Mohd. Ghazali Haji Mohayiddin

Indonesia

1. Prof. Dr. Amran Halim
2. Dr. Anton Moeliono
3. Sri Sukesi Adiwimarta
4. Abdul Latief M. A.
5. Abdul Mutalib
6. Ir. Susarsono Wiyandi
7. Ny. L.K. Somadikarta
8. Prof. Dr. Siti Sutarmi Tjitrosomi
9. Ir. Abdul Madjid
10. Dr. Ing. K.T. Sirait
11. Ir. Suarno Suardjo
12. Ny. Ir. Indreswari Guritno
13. Drs. M. M. Purbo Hadiwidjojo
14. Ir. Murwanto Martodinomo
15. Ir. Muhamad Yahya

Brunei (Pemerhati)

1. Pangiran Badaruddin bin Pangiran Ghani
2. Rosli Umar
3. Ibrahim bin C. A. Muhammad
4. Jaya Haji Sahat
5. Awang Ali Haji Kayum
6. Hanafiah Zaini

Sidang ke-20 (Jakarta, 25 -30 Juli 1983)

Malaysia

1. Datuk Haji Hassan bin Ahmad
2. Prof. Dr. Hajah Asmah Haji Omar
3. Prof. Dr. Asiah Abu Samah
4. Prof. Dr. Farid M. Onn
5. Datin Azizah Mokhzani
6. Encik Ghaffar Laili
7. Prof. Madya Dr. Mansor Salleh
8. Prof. Dr. Ahmad Mandzan Ayob
9. Dr. Ismail Hamzah
10. Prof. Dr. Noramly Muslim
11. Dr. Mohamad Yahya
12. Datin Rugayah Abdul Rashid
13. Puan Rohani Rustam
14. Prof. Madya Dr. Abdul Razak Salleh
15. Prof. Madya Dr. Haron Budin

(Lanjutan)

Indonesia

1. Prof. Dr. Anton M. Moeliono
2. Dra. Sri Sukesi Adiwimarta
3. Dra. Imas Siti Masitoh
4. Dr. Ing. K.T. Sirait
5. Prof. T.M. Sulaiman
6. Ir. Suwarno Suardjo
7. Dra. Saodah Nasution Elgersma
8. Dr. Abdul Majid
9. Ir. Soedharoedjian Ronoprawiro
10. Ir. Sjarif Hidajat Iskandar
11. Djoko Kentjono
12. Dra. Hartini Supadi
13. Dr. Mien A. Rifai
14. Prof. Dr. Ir. Triharso
15. Ir. Hartini Ramlan
16. Drs. Adi Sunaryo
17. Drs. Zulkarnain
18. Dr. Liek Wilardjo
19. Dr. Suwanto Martosudirdjo
20. A. Latief
21. Drs. Sumardi
22. Ny. L.K. Somadikarta
23. Luwarsih Pringgoadisurjo
24. Dra. Ipon S. Purawijaya
25. Dra. Jumariam

Brunei (Pemerhati)

1. Encik Hamdan Yahya
2. Awang Hanafiah Zaini

Sidang ke-21 (Kuala Lumpur, 16 - 21 April 1984)

Malaysia

1. Datuk Haji Hassan bin Ahmad
2. Prof. Dato' Dr. Hajah Asmah binti Haji Omar
3. Prof. Dr. Noramly Muslim
4. Datuk Prof. Dr. Haji Mohd. Ghazali bin Hj. Abd. Rahman
5. Prof. Abdullah Hassan
6. Prof. Dr. Farid M. Onn
7. Cik Asiah binti Abu Samah
8. Prof. Madya Haji Amat Juhari bin Moain

(Lanjutan)

9. Datin Azizah Mokhzani
10. Prof. Madya Dr. Ismail Hamzah
11. Dr. Muhammad bin Awang
12. Prof. Madya Dr. Harun bin Budin
13. Prof. Madya Dr. Abdul Razak Salleh
14. Encik Mohd. Rahmat Ramly
15. Encik Mohd. Ashaari Haji Reduan
16. Encik Hasrom Haron
17. Encik Mohd. Salleh Abdul Rahman
18. Prof. Madya Dr. Karsono Haji Mohd. Dasuki
19. Dr. Muhamad Mat Salleh
20. Dr. Abdul Halim Shaari
21. Prof. Dr. Shahrir bin Mohamad Zain
22. Prof. Madya Dr. Abdul Razak Salleh
23. Drs. Haji Khalid M. Hussain
24. Encik Sulaiman Masri
25. Tuan Haji Sulaiman bin Mohd. Noor

Indonesia

1. Prof. Dr. Amran Halim
2. Prof. Dr. Anton M. Moeliono
3. Dra. Sri Sukei Adiwimarta
4. Dr. Mien A. Rifai
5. Dr. Bana Kartasasmita
6. Drs. H.C. Yohannes
7. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LLM
8. Djenal Sidik Suraputra, S.H.
9. Moch. Hanafi
10. Leman Kolonel Laut (P) Drs. Sutanto
11. Ir. Jonggi Sibarani
12. Wasono, N.A.

Brunei (Pemerhati)

1. Dayang Fatimah Haji Hussain
2. Awang Amin bin Mudim Hj. Sirat
3. Haji Abdullah Haji Bungsu

(Lanjutan)

Sidang ke-22 (Jakarta, 29 Oktober - 2 November 1984)

Malaysia

1. Datuk Haji Hassan bin Ahmad
2. Datuk Prof. Dr. Haji Mohd. Ghazali bin Abd. Rahman
3. Prof. Dr. Abdullah Hassan
4. Y.B. Dato' Haji Nik Muhammad bin Nik Yahya
5. Prof. Dr. Farid M. Onn
6. Prof. Madya Haji Amat Juhari Moain
7. Prof. Madya Dr. Ismail Hamzah
8. Encik Rahmat Ramly
9. Dr. Zakaria Mohd. Amin
10. Lt. Kdr. Othman Abdul Kadir
11. Tuan Haji Khalid M. Hussain
12. Encik Sulaiman Masri
13. Tuan Haji Sulaiman bin Hj. Mohd. Nor

Indonesia

1. Prof. Dr. Anton M. Moeliono
2. Dra. Sri Sukesri Adiwimarta
3. Drs. Harimurti Kridalaksana
4. Drs. Hasjmi Dini
5. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja
6. Djenal Sidik Suraputra
7. A.S. Natabaya S.H.
8. Drs. Koetamadi
9. Dr. M.V. Hariyanti E.Y.
10. Moch. Hanafi
11. Lt. Kol. Laut (P) Drs. Sutanto
12. Dra. Sri Timur Suratman
13. Drs. Ahmad Barita
14. Prof. Dr. Ir. H. Siti Sutarmi Tjitrosomi
15. Dr. Singgih Sigit
16. Drs. S. Effendi
17. Dra. Saodah N. Elgersma
18. Prof. Dr. Soekeni Soedigdo
19. Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka
20. Dra. Susilowati
21. Drs. Hans Lapoliwa
22. Umi Basirah
23. Drs. Adjat Sakri
24. Hartono B. A.
25. J. Soetarmo

(Lanjutan)

Brunei (Pemerhati)

Awang Haji Alidin bin Haji Othman
Haji Mohd. Jali bin Latif
Dayangku Mariam bind Pengiran Metarsad
Awang Mohd. Amin bin Haji Sirat

Sidang ke-23 (Kuala Lumpur, 25 - 29 Maret 1985)

Malaysia

1. Datuk Haji Hassan bin Ahmad
2. Datuk Prof. Dr. Haji Mohd.
3. Ghazali bin Haji Abdul Rahman
4. Prof. Dr. Abdullah Hassan
5. Prof. Dr. Noramly Muslim
6. Prof. Dr. Farid M. Onn
7. Prof. Madya Haji Amat Juhari Moain
8. Cik Asiah Abu Samah
9. Datin Azizah Mokhzani
10. Dr. Zakaria Mohd. Amin
11. Dr. A. Hamid A. Hadi
12. Prof. Madya Dr. Ismail Hamzah
13. Encik Mohd. Rahmat Ramly
14. Encik Mohd. Ashaari Haji Reduan
15. Encik Hasrom Haron
16. Encik Mohd. Salleh Abdul Rahman
17. Prof. Madya Dr. Karsono Haji Mohd. Dasuki
18. Dr. Muhamad Mat Salleh
19. Dr. Abdul Halim Shaari
20. Prof. Dr. Shahrir bin Mohamad Zain
21. Prof. Madya Dr. Abdul Razak Salleh
22. Drs. Haji Khalid M. Hussain
23. Encik Sulaiman Masri
24. Tuan Haji Sulaiman bin Mohd. Noor

Indonesia

1. Prof. Dr. Anton M. Moeliono
2. Dra. Sri Sukesu Adiwimarta
3. Prof. Dr. Soekemi Soedigdo
4. Prof. Dr. Nawangsari Sugiri
5. Dr. M. Ansyar
6. Dr. Liek Wilardjo
7. Drs. Adjat Sakri

(Lanjutan)

Brunei (Pemerhati)

1. Y.M. Tuan Haji Ahmad Kadi
2. Awang Amin bin Begawan Pehin Khatib Haji Sirat
3. Awang Ali bin Abd. Razak
4. Awang Hanafiah bin Awang Zaini
5. Dayang Hajah Halimah Md. Yaakob
6. Dayang Norsiah binti Ghaffar

Sidang ke-24 (Jakarta, 4 - 8 November 1985)

Malaysia

1. Datuk Haji Hassan Ahmad
2. Prof. Dr. Abdullah Hassan
3. Prof. Dr. Farid M. Onn
4. Cik Asiah Abu Samah
5. Prof. Madya Haji Amat Juhari Moain
6. Dr. Zakaria Mohd. Amin
7. Prof. Madya Dr. Ismail Hamzah
8. Prof. Madya Dr. Abdul Razak Salleh
9. Prof. Madya Dr. Muhamad Yahya
10. Prof. Madya Takiah Mohd. Iskandar
11. Drs. Hj. Khalid M. Hussain
12. Encik Sulaiman Masri
13. Encik Zainal Abidin Abu Bakar

Indonesia

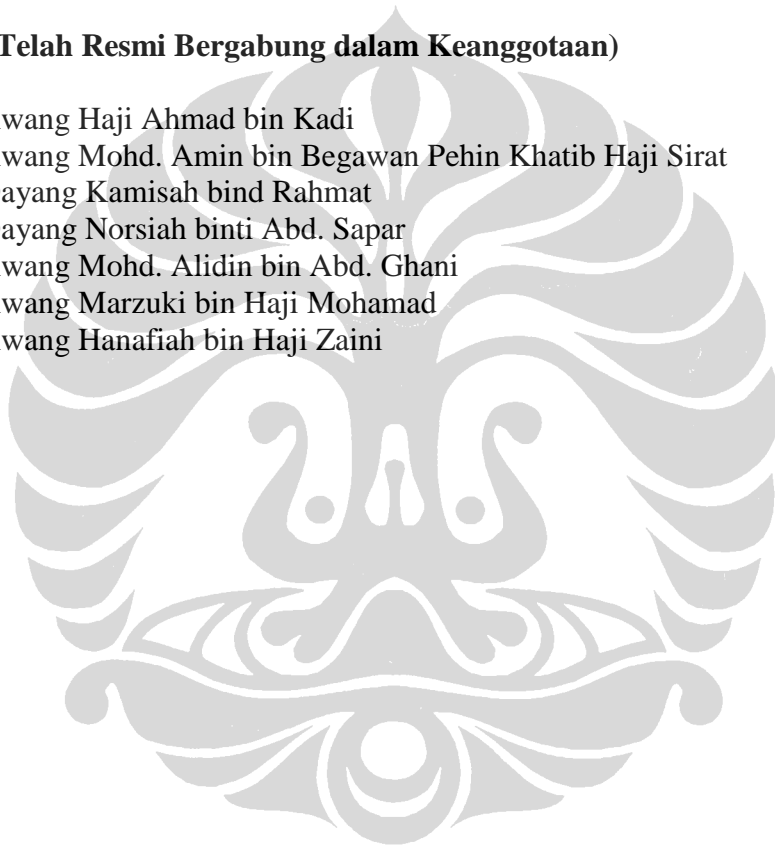
1. Prof. Dr. Anton M. Moeliono
2. Dra. Sri Sukesu Adiwimarta
3. A. Latief
4. Drs. S. Effendi
5. Dr. Liek Wilardjo
6. Drs. Herman C. Yohannes
7. Dr. Bernardus F. Da Silva
8. Drs. Tony Rachmadie
9. Dr. M. Ansyar
10. Drs. Rawuh
11. Dr. Belawati
12. Drs. A. Patoni
13. Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka
14. Dra. Patimah Murwani
15. Drs. Agus Taufiq

(Lanjutan)

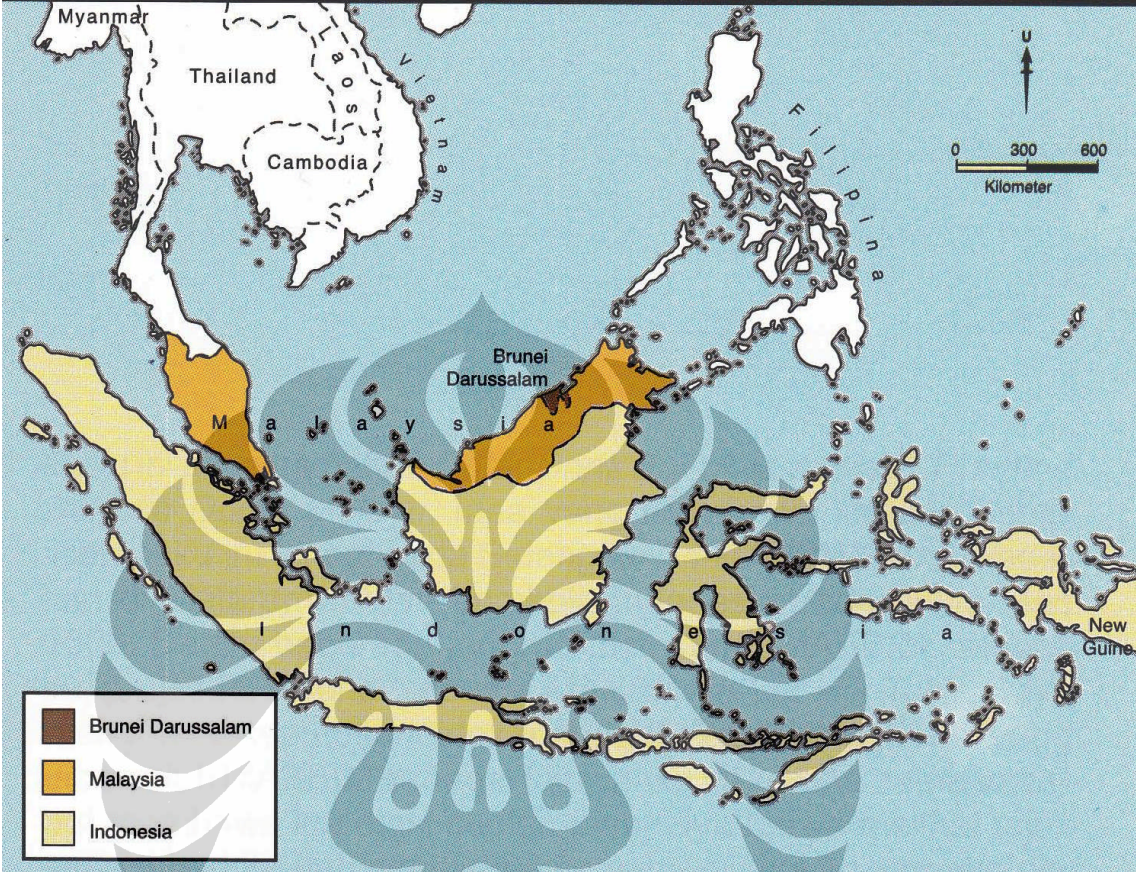
16. Dra. Nikmah Sunardjo
17. Dr. Mien A. Rufai
18. Prof. Dr. Achmad Joenoes
19. Drs. Sumitro Sunitiyoso
20. Drs. Sundowo Harminto
21. Drs. A. Banta
22. Prof. Drs. Sumardjo Tjitrosidojo
23. Dra. Kusbandijah A. Kadir
24. Drs. A. Ghaffar Ruskhan

Brunei (Telah Resmi Bergabung dalam Keanggotaan)

1. Awang Haji Ahmad bin Kadi
2. Awang Mohd. Amin bin Begawan Pehin Khatib Haji Sirat
3. Dayang Kamisah bind Rahmat
4. Dayang Norsiah binti Abd. Sapar
5. Awang Mohd. Alidin bin Abd. Ghani
6. Awang Marzuki bin Haji Mohamad
7. Awang Hanafiah bin Haji Zaini



Peta Wilayah Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM)



(Sumber: Asmah Haji Omar, *Carik-Carik Bulu Ayam: Kisah Runding Bahasa Dunia Melayu*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010)

DOKUMENTASI FOTO



Foto 1: Suasana persidangan pertama MBIM yang diadakan di Malaysia pada bulan Desember 1972 (Sumber: Omar, 2010)



Foto 2: Forum sidang MBIM ke-4 di Semarang, Indonesia pada tahun 1974. Tampak Tuan Haji Sujak Rahiman, Ketua Perwakilan Malaysia, sedang menyampaikan sambutan mewakili pihak Malaysia di depan Gubernur Semarang. Sementara di samping kiri beliau yaitu Rudjiati Muljadi Ketua Perwakilan Indonesia (Sumber: Omar, 2010)



Foto 3: Forum sidang MBIM ke-4 yang dilaksanakan pada tahun 1974 di Semarang, Indonesia (Sumber: Omar, 2010)



Foto 4: Acara Sambutan Tuan Rumah yang diadakan pada sidang ke-4 MBIM di Semarang, Indonesia pada tahun 1974 (Sumber: Omar, 2010)



Foto 5: Suasana persidangan MBIM ke-13 di Malaka, Malaysia pada 3-6 September 1978. Kelompok pertama yang berada di depan adalah kelompok eksekutif sedangkan kelompok di belakangnya adalah kelompok pakar bidang (Sumber: Omar, 2010)



Foto 6: Diskusi persiapan perwakilan Malaysia dalam menyambut MBIM ke-11 yang akan dilaksanakan pada 13-6 September 1978 di Kuala Lumpur. Agenda diskusi tersebut berlangsung pada 22 Februari 1978 (Sumber: Omar, 2010)



Foto 7: Suasana diskusi pembentukan istilah dalam sidang MBIM ke-13 di Malaka, Malaysia pada bulan September 1979 (Sumber: Omar, 2010)



Foto 8: Dr. Hasan Ahmad, Ketua Perwakilan Malaysia dan Prof. Dr. Amran Halim, Ketua Perwakilan Indonesia dalam sidang MBIM ke-18 yang diadakan di Palembang, Sumatera, Indonesia pada 29 - 3 April 1982 (Sumber: Omar, 2010)



Foto 9: Jawatankuasa Tetap Majelis Bahasa Malaysia (JKTBM) sedang melakukan diskusi seputar hasil MBIM di Dewan Bahasa dan Pustaka pada 26 Oktober 1982 (Sumber: Omar, 2010)



Foto 10: Suasana Sidang ke-23 MBIM pada 25-29 Maret 1985. Pada sidang ini Brunei mulai masuk sebagai anggota MBIM dan sejak saat itu MBIM berubah nama menjadi MABBIM (Sumber: Omar, 2010)

DOKUMENTASI SURAT KABAR (KORAN) SEZAMAN

Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Ejaan Indonesia - Malaysia Tersusun

Jakarta, Kompas.

Majelis Bahasa Indonesia - Malaysia berhasil menyusun pokok2 pedoman umum pembentukan istilah dan ejaan bagi bahasa Indonesia dan Malaysia. Persetujuan itu di capai dalam sidangnya keempat di Semarang tgl. 24 s/d 26 Juni yl. Demikian Dra. Rudjiati Mulyadi selaku ketua Lembaga Bahasa Nasional, anggota perutusan Indonesia ke sidang di Semarang Sabtu pagi di kantornya.

Berdasar pokok2 pedoman itu para anggota akan segera menyelesaikan versi pembentukan istilah dan ejaan untuk negara masing2. Di harapkan bulan Agustus mereka sudah menyerahkan hasilnya kepada pemerintah masing2 untuk dimintakan pengesahannya.

Sidang majelis selanjutnya akan diadakan di Johor Baru, Malaysia bulan Desember. Sidang itu akan membicarakan secara khusus pembentukan istilah untuk kimia, geografi, matematika, biologi dan fisika. Ke lima bidang itu perlu segera digarap karena dianggap sudah mende-

sak. Jika tidak lekas digarap kita akan tetap memakai istilah2 yang belum dirubah. Makin cepat diadakan perubahan makin baik, demikian Rudjiati menambahkan.

Majelis Bahasa Indonesia - Malaysia bersidang pertamakali tahun 1972 di Kuala Lumpur. Mereka bersidang se tahun duakali. Sidang2 diadakan di Puncak, Pulau Pinang dan Semarang.

Dalam sidang terakhir utusan Indonesia diwakili Dr. Amran Halim (ketua), Anton M. Moeliono M.A., Ir. Johannes, Prof. Amiruddin, Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Dr. Mien Rifa'i, Dr. Made Sandy, Drs. Effendy, Djoko Kencono M.A. dan Drs. Hari murti Kridalaksana selaku sekretaris.

Pihak Malaysia oleh Haji Sujak bin Rahiman selaku pengerusi (ketua), Haji Hassan Ahmad, Prof. Dr. Chazali Abdul Rahman, Dr. Asmah Haji Omar, Dr. Abdullah Hassan, Dr. Noralmy Muslim, Kamaluddin Muhammad, Dr. Chio Hwi Tek dan Ismail bin Dahaman selaku sekretaris.

Menurut Sudjiati, sidang kali ini mendapat perhatian luarbiasa dari pemerintah daerah setempat. Para peserta berkesempatan bertemu dengan pejabat2 daerah, mengunjungi beberapa tempat bersejarah dan beramah-tamah dengan anggota2 Ikatan Guru Bahasa Indonesia Jateng. (ms)

Kompas, 30 Juni 1974

Pedoman Umum Ejaan dan Pembentukan Istilah Berlaku Resmi Mulai 31 Agustus 1975

Berikut adalah ringkasan dari isi pedoman tersebut:

Pedoman Umum Ejaan dan Pembentukan Istilah ini menggantikan Pedoman Umum Ejaan yang berlaku pada tahun 1945. Pedoman ini diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 1975. Pedoman ini berlaku untuk seluruh instansi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan.

Pedoman ini bertujuan untuk menyamakan ejaan dan pembentukan istilah di seluruh Indonesia. Hal ini penting untuk memudahkan komunikasi dan administrasi di seluruh negeri.

Pedoman ini mengatur tentang ejaan, pembentukan kata, dan pembentukan istilah. Hal-hal yang diatur meliputi:

- Ejaan:** Menetapkan ejaan yang benar untuk kata-kata yang sering digunakan.
- Pembentukan Kata:** Menetapkan aturan untuk membentuk kata-kata baru yang sesuai dengan bahasa Indonesia.
- Pembentukan Istilah:** Menetapkan aturan untuk membentuk istilah-istilah yang digunakan dalam berbagai bidang.

Pedoman — —

(dari Prof. Fran-djalnya, Ke-3 tahun 1928. Hal-lain suatu pen-apan sidang pen-gaji, Indone-berjudi, Indo-merupakan suda-hi, pengikat ma-nahman sepertijuga

tar 40 judul buku nye. Hasil anta-lok yglaeng ber-ke hubun dari pa-si negara dan hak e warga, dalam or-gare. Itu. Dalam lerutama stilah khas Indone-sia atau Malaysia yang su-dah menderangsng. Namun

(Sambungan dari hal I)

yang dicapai sekarang methu paksaan hasil maksimal berkali-kali bersama panitia Indonesia dan Malaysia lewat 6 senu-lar dan ditambahkan.

Dapat ditambahkan, pelak-saran terdapat pedoman ke-pedoman itu sendiri di berbagai-bagai bidang. Pedoman ini mengatur tentang ejaan, pembentukan kata, dan pembentukan istilah. Hal-hal yang diatur meliputi:

- Ejaan:** Menetapkan ejaan yang benar untuk kata-kata yang sering digunakan.
- Pembentukan Kata:** Menetapkan aturan untuk membentuk kata-kata baru yang sesuai dengan bahasa Indonesia.
- Pembentukan Istilah:** Menetapkan aturan untuk membentuk istilah-istilah yang digunakan dalam berbagai bidang.

isn, Persemaian yang ter-uang dalam surat Keputusan Menteri Peik no. 0190/U/1975 itu. Kandungannya direvisi oleh Menteri, MA, dan Jurna. Menteri Peik dan Jurna. Persemaian ini diganti dengan surat yang di Sunang Sabtu pagi jeb-ri. MA, Mulyono mengatakan, baik pedoman ejaan maupun pembentukan istilah, monev-tur perundang-perundangan yang berlaku. Yang diterbitkan dalam 1972. Pedoman ejaan dan pembentukan istilah ini menggantikan pedoman yang diterbitkan pada tahun 1945. Hal ini penting untuk memudahkan komunikasi dan administrasi di seluruh negeri.

Penulisan kata menaokup keta dasar, turunan, ulang-nya. Perlu diperhatikan hal-hal yang selama ini menjadi kebiasaan. Misalnya: bert-uk tangan, garis bawahi, menganak sunjay, sebar luas-kan, memberlakukan, dilip-kan dan sebagainya, angka dan bilangan. Dalam penulisan-nya perlu diperhatikan hal-hal yang selama ini menjadi kebiasaan. Misalnya: bert-uk tangan, garis bawahi, menganak sunjay, sebar luas-kan, memberlakukan, dilip-kan dan sebagainya, angka dan bilangan.

Penulisan unsur serapan e-tah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang penulisan istilah. Ditekuk aspek tata bahasa, penulisan aspek semantik dan morfologi. Tentang aspek morfologi, istilah asing yang dituliskan dapat disusun dalam kata-kata. Misalnya: seminar, sim-poseum, konferensi, dll. (penulisan bukan keja-saman dan keja-saman), kata-kata dan keja-saman), kata-kata dan keja-saman), kata-kata dan keja-saman).